



Katalog BPS: 2302004



INDIKATOR PASAR TENAGA KERJA INDONESIA FEBRUARI 2015



BADAN PUSAT STATISTIK



INDIKATOR PASAR TENAGA KERJA INDONESIA FEBRUARI 2015



INDIKATOR PASAR TENAGA KERJA INDONESIA

FEBRUARI 2015

ISSN: 2088-5679

No. Publikasi: 04120.1501

Katalog BPS: 2032004

Ukuran Buku: 21 cm x 29 cm

Jumlah Halaman: 20 + 98 halaman

Naskah:

Subdirektorat Statistik Ketenagakerjaan

Gambar Kulit:

Subdirektorat Publikasi dan Kompilasi Statistik

Diterbitkan oleh:

Badan Pusat Statistik, Jakarta-Indonesia

Dicetak oleh:

Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya

KATA PENGANTAR

Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) selama periode Februari 2011-Agustus 2014 dilaksanakan secara triwulanan, dan sejak Februari 2015 dilaksanakan secara semesteran. Survei ini mencakup seluruh wilayah Indonesia dan diharapkan dapat memonitor dinamika ketenagakerjaan secara teratur dan berkesinambungan. Sakernas Februari menghasilkan angka estimasi sampai dengan level provinsi, sedangkan Sakernas Agustus mampu menyajikan angka estimasi hingga tingkat kabupaten/kota.

Publikasi ini menyajikan series *Key Indicators of the Labour Market* (KILM) Triwulan I (Februari 2014), Triwulan III (Agustus 2014), dan semester I (Februari 2015). Indikator-indikator yang ditampilkan mengacu pada KILM yang direkomendasikan ILO, dengan harapan bisa dijadikan sebagai acuan mengenai kondisi pasar tenaga kerja di Indonesia. Dari 20 KILM yang direkomendasikan ILO (*International Labour Organization*), baru 13 KILM yang dapat ditampilkan pengukurannya melalui data Sakernas. Beberapa indikator KILM menurut provinsi dan tabel pendukung dalam indikator KILM yang ditetapkan, disajikan pada lampiran publikasi ini.

Kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan publikasi ini, disampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih. Kritik dan saran dari pengguna sangat diharapkan demi kesempurnaan publikasi edisi berikutnya.

Jakarta, Juni 2015
Kepala Badan Pusat Statistik
Republik Indonesia

Dr. Suryamin

DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN (AKRONIM)

AK	Angkatan Kerja
BAK	Bukan Angkatan Kerja
BPS	Badan Pusat Statistik
EPR	<i>Employment-to-Population Ratio</i>
ICLS	<i>The International Conference of Labour Statisticians</i>
ILO	<i>International Labour Organization</i>
ISCED	<i>International Standard Classification of Education</i>
ISIC	<i>International Standard Industrial Classification</i>
KBLI	Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
KILM	<i>Key Indicators of the Labour Market</i>
MDG's	<i>Millenium Development Goals</i>
OECD	<i>Organisation for Economic Co-Operation and Development</i>
Sakernas	Survei Angkatan Kerja Nasional
SP	Sensus Penduduk
STP	Setengah Penganggur
Supas	Survei Penduduk Antar Sensus
TPT	Tingkat Pengangguran Terbuka
TPAK	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN (AKRONIM).....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GRAFIK.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1. SAKERNAS DAN ANALISIS KETENAGAKERJAAN.....	1
1.2. SAKERNAS DAN KILM.....	2
1.3. PERAN KILM DI BIDANG KETENAGAKERJAAN.....	4
1.4. ANALISIS PASAR TENAGA KERJA MENGGUNAKAN KILM.....	6
BAB 2 PARTISIPASI DAN INDIKATOR TENAGA KERJA.....	9
KILM 1. TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA (TPAK).....	9
KILM 2. RASIO PENDUDUK BEKERJA TERHADAP JUMLAH PENDUDUK (<i>EMPLOYMENT TO POPULATION RATIO- EPR</i>).....	12
KILM 3. PENDUDUK YANG BEKERJA MENURUT STATUS PEKERJAAN UTAMA.....	15
KILM 4. PENDUDUK YANG BEKERJA MENURUT LAPANGAN USAHA.....	18
KILM 5. PEKERJA PARUH WAKTU.....	20
KILM 6. PENDUDUK YANG BEKERJA MENURUT JUMLAH JAM KERJA.....	24
KILM 7. PENDUDUK YANG BEKERJA DI SEKTOR INFORMAL.....	27
BAB 3 INDIKATOR PENGANGGURAN.....	31
KILM 8. PENGANGGURAN.....	31
KILM 9. PENGANGGURAN PADA KELOMPOK UMUR MUDA.....	33
KILM 11. PENGANGGURAN DAN PENDIDIKAN.....	36
KILM 12. SETENGAH PENGANGGUR (<i>UNDEREMPLOYMENT</i>).....	41
KILM 13. TINGKAT KETIDAKAKTIFAN.....	45
BAB 4 INDIKATOR PENDIDIKAN DAN MELEK HURUF.....	47
KILM 14. PENCAPAIAN PENDIDIKAN DAN MELEK HURUF.....	47
Penjelasan Teknis.....	51
Lampiran.....	67

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin, 2014–2015.....	15
Tabel 2.	Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin, 2014–2015.....	18
Tabel 3.	Tingkat Pengangguran Terbuka (persen), 2014–2015	31
Tabel 4.	Indikator Pengangguran Umur Muda di Indonesia, 2014–2015.....	35
Tabel 5.	Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Tingkat Pendidikan (persen), 2014-2015	37
Tabel 6.	Persentase Penganggur Menurut Tingkat Pendidikan, 2014-2015.....	38
Tabel 7.	Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Termasuk Setengah Penganggur (juta), 2014-2015.....	41
Tabel 8.	Indikator Setengah Penganggur, 2014-2015	42
Tabel 9.	Persentase Setengah Penganggur Menurut Tingkat Pendidikan, 2014-2015	44
Tabel 10.	Indikator Ketidaktifan (persen), 2014-2015	45
Tabel 11.	Persentase Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan, 2014-2015.....	48

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Jumlah Angkatan Kerja dan TPAK, 2014-2015	9
Grafik 2. TPAK Menurut Jenis Kelamin, 2014-2015.....	9
Grafik 3. TPAK Menurut Kelompok Umur (persen), Agustus 2014 dan Februari 2015	10
Grafik 4. TPAK Menurut Provinsi (persen), Agustus 2014 dan Februari 2015.....	11
Grafik 5. Employment to Population Ratio, 2014-2015.....	12
Grafik 6. Employment to Population Ratio menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal, 2014-2015.....	12
Grafik 7. Employment to Population Ratio menurut Kelompok Umur, 2014-2015	13
Grafik 8. Employment to Population Ratio menurut Kelompok Umur, 2014-2015	14
Grafik 9. EPR Menurut Provinsi, Agustus 2014 dan Februari 2015	14
Grafik 10. Persentase Pekerja Rentan, 2014-2015.....	16
Grafik 11. Persentase Pekerja Rentan Menurut Jenis Kelamin, Februari 2015	16
Grafik 12. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Termasuk Pekerja Rentan Menurut Provinsi, Agustus 2014 dan Februari 2015.....	17
Grafik 13. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Provinsi dan Lapangan Pekerjaan Utama, Agustus 2014 dan Februari 2015	19
Grafik 14. Tingkat Pekerja Paruh Waktu, 2014-2015.....	20
Grafik 15. Tingkat Pekerja Paruh Waktu menurut Jenis Kelamin (persen), 2014-2015	20
Grafik 16. Tingkat Pekerja Paruh Waktu menurut Daerah Tempat Tinggal (persen), 2014-2015.....	21
Grafik 17. Tingkat Pekerja Paruh Waktu Menurut Provinsi (persen), Agustus 2014 dan Februari 2015.....	22
Grafik 18. Share Perempuan pada Pekerja Paruh Waktu (persen), 2014-2015	22
Grafik 19. Share Perempuan pada Pekerja Paruh Waktu Menurut Provinsi (persen), Agustus 2014 dan Februari 2015.....	23

Grafik 20. Presentase Penduduk Bekerja menurut Jumlah Jam Kerja, 2014-2015	24
Grafik 21. Presentase Penduduk Bekerja Menurut Jam Kerja dan Jenis Kelamin, Februari 2015.....	24
Grafik 22. Presentase Penduduk Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja dan Daerah Tempat Tinggal, Februari 2015.....	25
Grafik 23. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Provinsi dan Jumlah Jam Kerja, Februari 2015	26
Grafik 24. Persentase Penduduk Bekerja Formal/informal, 2014-2015	27
Grafik 25. Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Sektor Formal/Informal dan jenis Kelamin, 2014-2015	28
Grafik 26. Persentase Penduduk yang Bekerja menurut Sektor Formal/ Informal dan Daerah Tempat Tinggal, 2014-2015.....	28
Grafik 27. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Berdasarkan Sektor Formal dan Informal Menurut Provinsi, Februari 2015	29
Grafik 28. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi (persen), Agustus 2014 dan Februari 2015	32
Grafik 29. TPT Penduduk Umur Muda (persen), 2014-2015	33
Grafik 30. TPT Penduduk Umur Muda menurut Jenis Kelamin (persen), 2014-2015	33
Grafik 31. TPT Penduduk Umur Muda menurut Daerah Tempat Tinggal (persen),2014-2015	34
Grafik 32. TPT Penduduk Umur Muda menurut Daerah Tempat Tinggal (persen),2014-2015	35
Grafik 33. Tingkat Pengangguran Terbuka menurut Tingkat Pendidikan, 2014-2015.....	36
Grafik 34. Persentase Penganggur Menurut Tingkat Pendidikan dan Provinsi, Februari 2015	40
Grafik 35. Persentase Setengah Penganggur Menurut Tingkat Pendidikan, Agustus 2014 dan Februari 2015	43
Grafik 36. Tingkat Ketidaktifan Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin (persen), Februari 2015	46
Grafik 37. Presentase Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan dan Kelompok Umur, Agustus 2014 dan Februari 2015.....	49

Grafik 38. Perbandingan Angkatan Kerja menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin (persen), Agustus 2014	49
---	----

<http://www.bps.go.id>

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin (ribu), 2014–2015	67
Lampiran 2.	Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas Menurut Kelompok Umur (juta), 2014–2015	70
Lampiran 3.	Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Termasuk Angkatan Kerja Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin (ribu), 2014–2015	71
Lampiran 4.	Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas Menurut Kelompok Umur (juta), 2014–2015	72
Lampiran 5.	Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Termasuk Angkatan Kerja Menurut Kelompok Umur (juta), 2014–2015	73
Lampiran 6.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Kelompok Umur (persen), 2014–2015	74
Lampiran 7.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin (persen), 2014–2015	75
Lampiran 8.	Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin (ribu), 2014–2015	76
Lampiran 9.	Rasio Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Terhadap Jumlah Penduduk (EPR) Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2014–2015	77
Lampiran 10	Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Provinsi dan Status Pekerjaan Utama, 2014–2015	78
Lampiran 12	Indikator Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Termasuk Pekerja Paruh Waktu Menurut Provinsi, 2014–2015	81
Lampiran 13	Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Jenis Kelamin, Daerah Tempat Tinggal, dan Jumlah Jam Kerja, 2014–2015	82
Lampiran 14	Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Provinsi dan Jumlah Jam Kerja, 2014	83

Lampiran 15	Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Provinsi dan Sektor Formal dan Informal, 2014.....	86
Lampiran 16	Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin (persen), 2014.....	87
Lampiran 17	Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi dan Tingkat Pendidikan (persen), 2014	88
Lampiran 18	Persentase Pengangguran Menurut Provinsi dan Tingkat Pendidikan, 2014	89
Lampiran 19	Persentase Setengah Penganggur Menurut Provinsi dan Tingkat Pendidikan, 2014	90
Lampiran 20	Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Termasuk Bukan Angkatan Kerja Menurut Provinsi (ribu), 2014–2015.....	91
Lampiran 21	Tingkat Ketidaktifan Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin (persen), 2014	92
Lampiran 22	Persentase Angkatan Kerja Menurut Provinsi dan Tingkat Pendidikan, 2014	93
Lampiran 23	Rata-rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Lapangan Usaha dan Jenis Kelamin (rupiah), 2014	94
Lampiran 24	Rata-rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Lapangan Usaha dan Klasifikasi Daerah (rupiah), 2014	95
Lampiran 25	Rata-rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin (rupiah), 2014.....	96
Lampiran 26	Rata-rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Provinsi dan Klasifikasi Daerah (rupiah), 2014.....	97
Lampiran 27	Tabulasi Silang Batasan Kegiatan Formal dan Informal Berdasarkan Status Pekerjaan dan Jenis Pekerjaan Utama.....	98

RINGKASAN EKSEKUTIF

Jumlah penduduk umur 15 tahun keatas yang termasuk angkatan kerja berdasarkan hasil Sakernas Februari 2015 mencapai 128,30 juta orang. Jumlah tersebut naik sebanyak 6,43 juta orang apabila dibandingkan dengan keadaan Agustus 2014 (121,87 juta orang) dan naik sebanyak 2,98 juta orang jika dibandingkan keadaan Februari 2014 (125,32 juta orang).

Meningkatnya jumlah angkatan kerja juga berpengaruh pada meningkatnya persentase TPAK dari 66,60 persen pada Agustus 2014 menjadi 69,50 persen pada Februari 2015, jika dibandingkan dengan keadaan setahun yang lalu (Februari 2014), TPAK Februari 2015 juga mengalami peningkatan yaitu meningkat sebesar 0,33 persen poin dari angka 69,17 persen.

Secara nasional angka EPR pada Februari 2015 adalah sebesar 65,46. Berdasarkan angka tersebut bisa diinterpretasikan bahwa dari 100 orang penduduk umur 15 tahun ke atas, terdapat sekitar 65 orang yang bekerja pada Februari 2015. EPR ini mengalami peningkatan jika dibandingkan keadaan Agustus 2014 maupun Februari 2014, dimana masing-masing meningkat sebesar 2,82 poin dan 0,23 poin.

Persentase penduduk yang bekerja menurut status pekerjaan utama pada Februari 2015 ini distribusinya tidak begitu berbeda jika dibandingkan dengan keadaan pada periode sebelumnya (Februari 2014 dan Agustus 2014). Persentase terbesar penduduk bekerja diduduki oleh penduduk dengan status berusaha (46,79 persen), diikuti dengan penduduk bekerja dengan upah/gaji (38,58 persen) dan urutan terakhir adalah penduduk bekerja dengan status pekerja keluarga (9,83 persen).

Pada Februari 2015 memperlihatkan bahwa kondisi lapangan pekerjaan utama di Indonesia mempunyai pola yang sama dengan tahun 2014 yaitu didominasi oleh sektor jasa-jasa dengan persentase penduduk yang bekerja pada sektor jasa-jasa sebesar 45,43 persen. Selanjutnya adalah sektor pertanian sebesar 33,20 persen, dan sektor manufaktur sebesar 21,37 persen.

Tingkat pekerja paruh waktu pada Februari 2015 mencapai 21,21 persen. Hal ini dapat diartikan bahwa dari 100 orang yang bekerja, terdapat sekitar 21 orang yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu. Tingkat pekerja paruh waktu ini mengalami penurunan terhadap Agustus dan Februari 2014 yaitu sebesar 1,55

persen poin dan 1,13 persen poin. Hasil Sakernas Februari 2015 menunjukkan bahwa tingkat pekerja paruh waktu perempuan mencapai hampir dua kali lipat lebih tinggi dibandingkan tingkat pekerja paruh waktu laki-laki, yaitu masing-masing sebesar 30,66 persen dan 15,11 persen.

Berdasarkan hasil Sakernas Februari 2015, sebagian besar penduduk bekerja di atas 35 jam per minggu yang mencapai hampir dua pertiga dari total penduduk yang bekerja. Sementara itu penduduk yang bekerja di bawah 35 jam per minggu mencapai 31,62 persen dan mengalami penurunan jika dibandingkan dengan Agustus (33,61 persen) dan Februari 2014 (33,47 persen), masing-masing sebesar 1,99 persen poin dan 1,85 persen poin.

Berdasarkan hasil Sakernas Februari 2015 menunjukkan bahwa dari 120,85 juta orang yang bekerja, sebanyak 51,85 persen merupakan penduduk yang bekerja di sektor informal (62,66 juta orang). Pada periode Februari dan Agustus 2014, serta Februari 2015 tampak adanya penurunan persentase penduduk bekerja di sektor informal, sesuai dengan usaha pemerintah untuk terus menumbuhkan pekerjaan di sektor formal. Persentase penduduk yang bekerja di sektor informal pada Februari 2014 sebesar 53,59 persen, turun menjadi 53,24 persen pada Agustus 2014, dan kembali turun pada Februari 2015 menjadi 51,85 persen. Sedangkan persentase sektor formal pada Februari 2014 mencapai 46,41 persen, naik menjadi 46,76 persen pada Agustus 2014, dan naik pada Februari 2015 hingga mencapai 48,15 persen.

TPT berdasarkan Sakernas Februari 2015 mencapai 5,81 persen, yang berarti bahwa dari 100 orang angkatan kerja di Indonesia, terdapat sebanyak 6 orang yang masuk kategori penganggur. Hasil Sakernas Februari 2015 menunjukkan bahwa TPT di Indonesia mengalami fluktuasi bila dibandingkan dengan keadaan Februari dan Agustus 2014. TPT pada Februari 2015 mengalami penurunan sebesar 0,13 persen poin bila dibandingkan dengan Agustus 2014 (5,94 persen), namun mengalami kenaikan sebesar 0,11 persen poin dibandingkan Februari 2014 (5,70 persen).

Berdasarkan hasil Sakernas Februari 2015 TPT penduduk pada kelompok umur muda mencapai 18,29 persen, yang dapat diartikan bahwa dari 100 orang penduduk berumur 15–24 tahun yang termasuk angkatan kerja, terdapat sekitar 18 orang yang menganggur. Angka tersebut turun sebesar 3,91 persen poin bila dibandingkan dengan hasil Sakernas Agustus 2014 dan naik sebesar 1,24 persen poin apabila dibandingkan Februari 2014.

Secara umum, berdasarkan hasil Sakernas Februari 2015, TPT tertinggi menurut tingkat pendidikan terdapat pada pendidikan sekolah menengah yaitu sebesar 8,50 persen, sementara yang terendah justru pada kelompok tidak pernah sekolah atau tidak pernah mengenyam bangku sekolah dengan TPT sebesar 2,46 persen.

Jumlah setengah penganggur di Indonesia berdasarkan Sakernas Februari 2015, mencapai 10,04 juta orang, yang terdiri dari 6,07 juta orang berjenis kelamin laki-laki dan sisanya sebanyak 3,97 juta orang adalah perempuan. Sedangkan menurut klasifikasi desa-kota, pada Februari 2015, jumlah setengah penganggur di daerah perdesaan mencapai hampir dua kali lipat dibandingkan dengan daerah perkotaan. Jumlah setengah penganggur di perdesaan mencapai 6,26 juta orang, sementara di perkotaan hanya sebanyak 3,78 juta orang.

Tingkat ketidakaktifan di Indonesia pada Februari 2014 mencapai 30,50 persen, artinya dari 100 orang penduduk usia kerja di Indonesia, yang tidak aktif dalam pasar kerja (bukan angkatan kerja) sebanyak 30 orang. Tingkat ketidakaktifan pada Februari 2015 menurun jika dibandingkan dengan keadaan Agustus maupun Februari 2014, dengan penurunan masing-masing sebesar 2,90 persen poin dan 0,33 persen poin. Sejalan dengan dengan penurunan tingkat ketidakaktifan, jumlah penduduk umur 15 tahun ke atas yang tergolong bukan angkatan kerja juga mengalami penurunan, sebanyak 4,82 juta orang dari Agustus 2014 (61,12 juta orang) ke Februari 2015 (56,30 juta orang).

Pada Februari 2015, secara nasional kontribusi angkatan kerja berdasarkan pendidikan tidak menunjukkan perubahan yang signifikan jika dibandingkan dengan kondisi Agustus 2014. Angkatan kerja pada Februari 2015 ini sebagian besar masih didominasi oleh mereka yang hanya tamat sekolah dasar yaitu sebesar 58,25 persen. Angkatan kerja yang menyelesaikan sekolah menengah sebesar 26,92 persen, sementara untuk tamatan sekolah tinggi hanya sebesar 10,90 persen. Kondisi yang kurang baik ini ditunjukkan pula dengan masih adanya angkatan kerja yang tidak pernah sekolah sekitar 3,93 persen.

BAB 1

PENDAHULUAN

Data ketenagakerjaan merupakan aspek penting untuk menggambarkan indikator pasar tenaga kerja di Indonesia. Salah satu sumber penyajian indikator ini berasal dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Dalam upaya memonitor dinamika ketenagakerjaan, agar para pengambil keputusan dapat lebih cepat dalam mengambil kebijakan untuk mengatasi dan memperbaiki permasalahan ketenagakerjaan khususnya di Indonesia. BPS sejak Triwulan I Februari 2011 menyusun publikasi yang merujuk pada publikasi Organisasi Buruh Internasional (*International Labour Organization-ILO*), yaitu Indikator Pasar Tenaga Kerja (*Key Indicators of the Labour Market-KILM*). ILO telah meluncurkan KILM pada tahun 1999 untuk melengkapi program pengumpulan data secara rutin dan untuk meningkatkan penyebaran data pada unsur utama dari pasar tenaga kerja dunia. Edisi KILM Indonesia ini merujuk pada KILM yang diterbitkan ILO pada tahun 2005.

1.1. SAKERNAS DAN ANALISIS KETENAGAKERJAAN

Data ketenagakerjaan yang dikumpulkan oleh BPS melalui sensus dan survei antara lain: Sensus Penduduk (SP), Survei Penduduk Antar Sensus (Supas), Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). Dari survei-survei tersebut, hanya Sakernas yang dirancang khusus untuk mengumpulkan data yang dapat menggambarkan keadaan umum ketenagakerjaan antar periode pencacahan.

Secara umum, tujuan pengumpulan data melalui Sakernas adalah menyediakan data pokok terkait ketenagakerjaan yang berkesinambungan. Secara khusus, untuk memperoleh informasi data jumlah penduduk yang bekerja, pengangguran dan penduduk yang pernah berhenti/pindah bekerja serta perkembangannya di tingkat kabupaten/kota, provinsi, maupun nasional.

Kegiatan pengumpulan data ketenagakerjaan pertama kali dilaksanakan tahun 1976. Sampai dengan saat ini, Sakernas mengalami berbagai perubahan, baik dalam periode pencacahan maupun cakupan sampel wilayah dan rumah tangga. Tahun 1986 sampai dengan 1993 Sakernas dilaksanakan secara triwulanan, tahun 1994 sampai dengan 2001 secara tahunan setiap bulan

Agustus, sedangkan tahun 2002 sampai dengan 2004 selain secara tahunan juga dilaksanakan secara triwulanan. Mulai tahun 2005 sampai dengan tahun 2010, Sakernas dilakukan secara semesteran.

Dengan semakin mendesaknya tuntutan data ketenagakerjaan, baik variasi, kontinuitas, kemutakhiran, dan peningkatan akurasi data yang dihasilkan, maka pengumpulan data Sakernas mulai tahun 2011 hingga tahun 2014 dilakukan kembali secara triwulanan yaitu bulan Februari (Triwulan I), Mei (Triwulan II), Agustus (Triwulan III), dan November (Triwulan IV), yang penyajian datanya dirancang sampai tingkat provinsi. Namun demikian, untuk pelaksanaan Sakernas Triwulan III (bulan Agustus) selain sampel triwulanan juga terdapat sampel tambahan, hal ini dilakukan untuk kepentingan angka estimasi penyajian data sampai tingkat kabupaten/kota. Pada November 2014 karena adanya berbagai alasan Sakernas tidak dilaksanakan.

Pada tahun 2015 ini, Sakernas kembali dilaksanakan semesteran (dua kali setahun) di seluruh wilayah Republik Indonesia. Pada tahun 2015 ini cakupan provinsi di Sakernas bertambah satu yaitu provinsi Kalimantan Utara. Kalimantan Utara merupakan provinsi termuda Indonesia, resmi disahkan menjadi provinsi dalam rapat paripurna DPR pada tanggal 25 Oktober 2012 berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2012. Jumlah sampel Sakernas pada Februari sekitar 50.000 rumah tangga dan 200.000 rumah tangga pada Sakernas Agustus .

Dari setiap rumah tangga terpilih dikumpulkan keterangan mengenai keadaan umum setiap anggota rumah tangga, yang mencakup nama, hubungan dengan kepala rumah tangga, jenis kelamin, dan umur. Khusus untuk anggota rumah tangga yang berumur 10 tahun ke atas, akan ditanyakan keterangan mengenai status perkawinan, pendidikan, pekerjaan, pengangguran, dan pengalaman kerja. Sebagai catatan, rumah tangga korps diplomatik, rumah tangga yang tinggal di blok sensus khusus, dan rumah tangga khusus yang berada di blok sensus biasa tidak dipilih dalam sampel.

1.2. SAKERNAS DAN KILM

Dengan berbagai macam variabel yang dikumpulkan pada Sakernas, dapat disusun serangkaian indikator kunci yang merujuk pada publikasi ILO, yaitu KILM. Tetapi yang perlu menjadi catatan adalah, pada saat melakukan interpretasi data hasil Sakernas dengan data ketenagakerjaan dari sumber lain

(SP, Supas, dan Susenas), perlu memperhatikan beberapa hal, karena data-data tersebut tidak dapat dibandingkan secara langsung.

Beberapa faktor perlu dipertimbangkan oleh para pemakai data dalam menginterpretasi dan menganalisis data ketenagakerjaan yang tersedia. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan tersebut meliputi:

1) Tujuan Survei

Sakernas merupakan survei khusus untuk mengumpulkan data ketenagakerjaan. Sedangkan SP maupun SUPAS bertujuan untuk mengetahui sifat demografi secara umum. Dengan demikian, informasi yang dikumpulkan dalam SP dan SUPAS lebih banyak dan beragam, antara lain meliputi data pendidikan, migrasi, Keluarga Berencana, dan ketenagakerjaan. Begitu pula informasi yang dikumpulkan melalui Susenas lebih beragam sifatnya, seperti data pengeluaran atau konsumsi, ketenagakerjaan, kesehatan, dan perumahan. Perbedaan tujuan survei ini menyebabkan kualitas data ketenagakerjaan antar berbagai survei tersebut relatif berbeda.

2) Ukuran Sampel

Ukuran sampel dalam Sakernas berbeda dengan ukuran sampel dalam SP, SUPAS, maupun Susenas. Perbedaan ini menyebabkan *sampling error* yang dikandung oleh angka perkiraan dari masing-masing sumber data juga berbeda. Semakin kecil ukuran sampel, maka akan semakin besar *sampling error*-nya.

3) Faktor Pengali/Penimbang

Data ketenagakerjaan pada Februari 2014, Agustus 2014 dan Februari 2015 menggunakan penimbang hasil Proyeksi Penduduk tahun 2010-2035.

4) Kualitas Petugas Lapangan

Sampai dengan Semester II (Agustus) 2006, petugas Sakernas hanya terdiri dari pencacah dan pengawas/pemeriksa. Mulai Sakernas Semester I (Februari) 2007 hingga Sakernas Semester II (Agustus) 2010, pencacahan dilakukan secara tim, dalam 1 (satu) tim terdiri dari 2 (dua) pencacah dan 1 (satu) koordinator tim. Petugas-petugas tersebut pada umumnya adalah pegawai BPS yang ada di kecamatan (Koordinator Statistik Kecamatan-KSK) dan BPS Kabupaten/Kota setempat. Sebagian besar dari mereka umumnya telah mempunyai pengalaman dalam berbagai survei maupun sensus serta lebih menguasai medan/ lapangan. Sejak 2011 hingga saat ini, petugas

Sakernas tidak lagi secara tim, tetapi terdiri dari pencacah dan pengawas, dimana seorang pengawas membawahi 2-3 orang pencacah.

5) Perencanaan Kuesioner

Cara menyusun pertanyaan mengenai ketenagakerjaan dalam kuesioner dapat berpengaruh terhadap hasil survei maupun sensus. Ini meliputi bentuk kalimat/ pertanyaan yang tertulis, urutan pertanyaan, pemilihan kata-kata yang tepat dalam pertanyaan, banyaknya pertanyaan, maupun jenis keterangan yang ditanyakan. Dalam Sakernas, telah diusahakan bentuknya ringkas/ sederhana, mudah dimengerti, serta pertanyaan pokoknya tidak berubah-ubah.

6) Waktu Pelaksanaan/Pencacahan

Waktu pelaksanaan lapangan antara Sakernas, Susenas, SP, dan Supas berbeda. Hal tersebut dapat menyebabkan perbedaan hasil yang diperoleh karena pengaruh musiman.

Penyusunan indikator pasar tenaga kerja (KILM) pada awalnya dirancang dengan dua tujuan utama, yaitu:

- 1) Menyajikan indikator inti pasar tenaga kerja;
- 2) Meningkatkan ketersediaan indikator-indikator ketenagakerjaan, untuk memantau perkembangan pasar tenaga kerja terkini. Indikator-indikator ini merupakan hasil kolaborasi yang melibatkan ILO bersama para ahli dari Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (*Organisation for Economic Co-operation and Development-OECD*) dan beberapa perwakilan nasional dari Departemen Tenaga Kerja dan kantor statistik berbagai negara.

1.3. PERAN KILM DI BIDANG KETENAGAKERJAAN

Identifikasi dan kuantifikasi *inefisiensi* dalam pasar tenaga kerja, seperti *underutilization* tenaga kerja dan defisit pekerjaan yang layak (*decent work*) merupakan langkah pertama dalam merancang kebijakan ketenagakerjaan, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk yang bekerja, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pandangan luas dunia kerja menuntut pengumpulan data yang lengkap, pengorganisasian, dan analisis informasi pasar tenaga kerja. Dalam konteks ini, KILM dapat berfungsi sebagai alat dalam memantau dan menilai banyak hal, yang terkait dengan fungsi pasar tenaga kerja. Berikut ini adalah beberapa contoh

bagaimana KILM dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan di bidang ketenagakerjaan.

Beberapa peran KILM dalam analisis pasar tenaga kerja antara lain:

1) Mempromosikan Agenda ILO: Pekerjaan yang Layak (*Decent Work*).

Salah satu tujuan agenda ILO mempromosikan pekerjaan yang layak adalah untuk memberikan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh pekerjaan produktif, dalam kondisi kebebasan, kesetaraan, dan keamanan. Menerapkan konsep "layak" untuk segala bentuk kegiatan ekonomi merupakan sesuatu yang multitafsir. Persepsi mengenai upah yang layak dapat berbeda secara signifikan dari satu orang ke orang lain. Selain pekerjaan yang layak, permasalahan yang muncul dalam dunia ketenagakerjaan adalah kurangnya kesempatan kerja. Kurangnya kesempatan kerja selain bisa diidentifikasi menggunakan pendekatan indikator pengangguran (KILM 8 dan KILM 9), juga bisa menggunakan indikator yang lebih rinci yaitu tingkat ketidakaktifan (KILM 13). Untuk mengetahui kualitas dan jenis pekerjaan dapat dilakukan pendekatan, misalnya, dengan mengidentifikasi individu yang masuk dalam kelompok pekerja rentan (*vulnerable employment*), yaitu penduduk bekerja berdasarkan status dan sektor (KILM 3 dan KILM 4), jam kerja yang berlebih/*exceeds working hours* (KILM 6), penduduk bekerja di sektor informal (KILM 7), dan setengah penganggur (KILM 12).

2) Pemantauan Pencapaian Tujuan *Millenium Development Goals* (MDGs).

Tujuan utama kebijakan nasional serta strategi nasional pembangunan sebagai bagian dari upaya untuk mencapai Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) adalah meningkatnya jumlah pekerja penuh (*full employment*), penduduk bekerja yang produktif, dan penyediaan pekerjaan yang layak (*decent work*). Pekerjaan yang layak dan produktif merupakan isu sentral untuk mengatasi kemiskinan dan kelaparan. MDGs pertama memasukkan target baru 1b (yang disepakati pada tahun 2008) yaitu "mencapai pekerja penuh dan layak bagi semua, termasuk perempuan dan orang-orang muda". Empat indikator yang dipilih untuk memantau kemajuan menuju sasaran 1b dalam MDGs tersedia dalam KILM, yaitu rasio penduduk bekerja terhadap jumlah penduduk (*Employment to Population Ratio-EPR*), proporsi penduduk bekerja yang hidup di bawah garis kemiskinan, tingkat pekerja rentan (*vulnerable employment*), dan tingkat pertumbuhan produktivitas tenaga kerja, sesuai dengan indikator KILM 2, KILM 3, KILM 18, dan KILM 20.

3) Memantau kesetaraan gender di pasar tenaga kerja.

Wanita menghadapi tantangan khusus dalam mencapai pekerjaan yang layak. Sebagian besar indikator KILM dipisahkan menurut jenis kelamin, yang memungkinkan untuk melakukan perbandingan kesempatan kerja laki-laki dan perempuan.

4) Mengkaji tenaga kerja di era globalisasi.

Globalisasi memiliki potensi manfaat bagi semua, namun sampai saat ini hal tersebut tidak mencakup orang banyak. Oleh karena itu, perlu satu cara untuk menghadapi era globalisasi dengan tetap mendorong penciptaan kesempatan kerja yang layak untuk semua. Salah satu cara untuk melakukannya adalah membuat tenaga kerja menjadi tujuan sentral dari kebijakan ekonomi makro dan sosial. Indikator KILM dapat bermanfaat dalam hal ini, dengan memonitor dinamika ketenagakerjaan yang terkait dengan globalisasi. Misalnya, adanya penelitian yang menunjukkan bahwa kehilangan pekerjaan/penciptaan serta perubahan upah dan produktivitas dipengaruhi oleh globalisasi. Jika indikator mencerminkan konsekuensi negatif dari globalisasi, maka pembuat kebijakan memiliki pilihan untuk mengubah kebijakan ekonomi makro sehingga dapat meminimalkan biaya penyesuaian (*adjustment cost*) dan mendistribusikan keuntungan dari globalisasi secara lebih adil.

1.4. ANALISIS PASAR TENAGA KERJA MENGGUNAKAN KILM

Semakin banyak negara yang mempublikasikan angka pengangguran nasional dan data ketenagakerjaan agregat. Namun, pengguna harus bijaksana menggunakan statistik ini dalam rangka melihat dinamika pasar tenaga kerja. Salah satu keuntungan menggunakan tingkat pengangguran agregat, misalnya, relatif lebih mudahnya dalam hal pengumpulan dan komparasi antardaerah. Akan tetapi, melihat angka pengangguran saja dengan mengabaikan unsur-unsur lain dari pasar tenaga kerja yang lain merupakan suatu kekeliruan. Penting untuk menyadari bahwa pengangguran “hanya” merupakan salah satu aspek dalam indikator ketenagakerjaan. Oleh karena itu, langkah pertama dalam analisis pasar kerja, adalah menentukan rincian status tenaga kerja dalam populasi.

Penduduk umur kerja dapat didekomposisi menjadi orang-orang yang tidak aktif secara ekonomi (di luar tenaga kerja/bukan angkatan kerja, KILM 13); bekerja (KILM 2), atau tidak bekerja dan mencari pekerjaan (menganggur, KILM

8). Semakin besar penduduk yang termasuk dalam kelompok pengangguran atau bukan angkatan kerja atau keduanya, menunjukkan *underutilized* yang besar dari angkatan kerja yang potensial. Pemerintah yang menghadapi situasi ini semestinya berusaha untuk menganalisis alasan untuk tidak aktif, yang pada gilirannya bisa menentukan pilihan kebijakan yang penting untuk mengubah situasi.

Jika mayoritas penduduk yang aktif secara ekonomi terdiri dari perempuan yang tidak bekerja karena mereka memiliki tanggung jawab rumah tangga, pemerintah mungkin dapat mendorong lingkungan yang bisa memfasilitasi partisipasi ekonomi perempuan, misalnya melalui pembentukan pusat-pusat penitipan anak atau jam kerja yang fleksibel bagi perempuan. Program untuk menggalakkan pekerjaan pada penyandang cacat juga dapat membantu menurunkan tingkat ketidakaktifan, jika cacat adalah alasan umum untuk tidak aktif. Hal yang lebih sulit adalah mengembalikan orang yang telah meninggalkan pasar kerja ke dalam angkatan kerja karena alasan "putus asa"/*discourage worker*, yaitu karena mereka merasa bahwa tidak tersedia pekerjaan yang sesuai bagi mereka, dan mereka tidak memiliki kualifikasi yang tepat, atau karena mereka tidak tahu ke mana harus mencari pekerjaan.

Pengangguran juga harus dianalisis menurut jenis kelamin (KILM 8), umur (KILM 9), lamanya menganggur (KILM 10), dan tingkat pendidikan (KILM 11), untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik dari komposisi pengangguran, sehingga bisa menentukan kebijakan pengangguran yang tepat.

Karakteristik lain dari pengangguran yang tidak ditampilkan dalam KILM, diantaranya latar belakang sosial-ekonomi, pengalaman kerja, juga penting untuk dianalisis apabila data karakteristik tersebut tersedia, sehingga dapat menentukan kelompok mana yang menghadapi kesulitan tertentu. Paradoksnya, tingkat pengangguran yang rendah mungkin menyamarkan tingkat kemiskinan dalam suatu negara (KILM 20), sedangkan tingkat pengangguran tinggi dapat terjadi di negara-negara dengan perkembangan ekonomi yang signifikan dengan insiden kemiskinan rendah.

Di negara-negara berkembang dengan ketersediaan perlindungan sosial yang baik atau bila terdapat berbagai jaminan sosial atau dukungan yang tersedia, maka bagi penduduk bekerja lebih dapat meluangkan waktu untuk mencari pekerjaan yang lebih diinginkan. Oleh karena itu, masalah di banyak negara

berkembang bukanlah tingkat pengangguran yang tinggi, melainkan kurangnya kesempatan kerja yang layak dan produktif bagi mereka yang bekerja.

Hal tersebut membawa kita pada kebutuhan untuk membedah jumlah total lapangan kerja serta untuk menilai kesejahteraan penduduk yang bekerja, di bawah suatu konsep bahwa tidak semua pekerjaan adalah "pekerjaan yang layak". Jika penduduk yang bekerja terdiri dari sebagian besar bekerja sendiri atau pekerja keluarga (lihat KILM 3), lalu, dibandingkan dengan total penduduk yang bekerja (KILM 2), apakah indikator ini akan kehilangan nilainya sebagai ukuran normatif? Apakah orang-orang ini bekerja? Ya, menurut definisi internasional. Apakah mereka dalam pekerjaan yang layak? Mungkin tidak. Meskipun secara teknis bekerja, beberapa penduduk bekerja yang berusaha sendiri atau pekerja keluarga akan bertahan dengan pekerjaan mereka saat ini sehingga batas antara bekerja dan menganggur sangat tipis. Hal ini terlihat ketika terbuka lowongan untuk pekerjaan yang bergaji (buruh/karyawan/pegawai) di ekonomi formal, rombongan tenaga kerja ini akan berlomba-lomba untuk mengajukan lamaran.

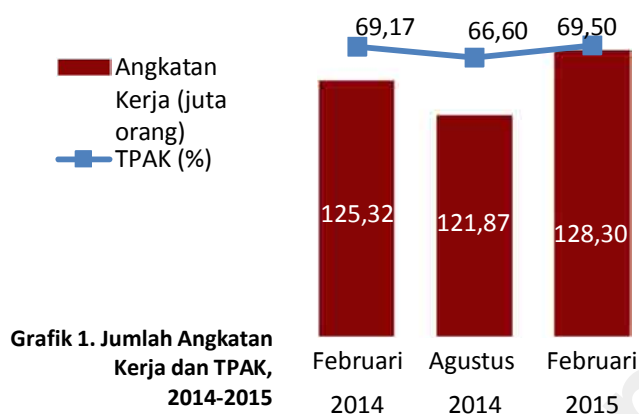
Identifikasi lebih lanjut harus dilakukan, untuk menentukan apakah penduduk yang bekerja tersebut umumnya miskin (KILM 20), terlibat dalam kegiatan pertanian tradisional (KILM 4), menjual barang-barang di pasar informal tanpa keamanan kerja (KILM 7), jam kerja yang berlebihan (KILM 6), atau ingin memperoleh pekerjaan tambahan (KILM 12).

BAB 2

PARTISIPASI DAN INDIKATOR TENAGA KERJA

KILM 1. TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA (TPAK)

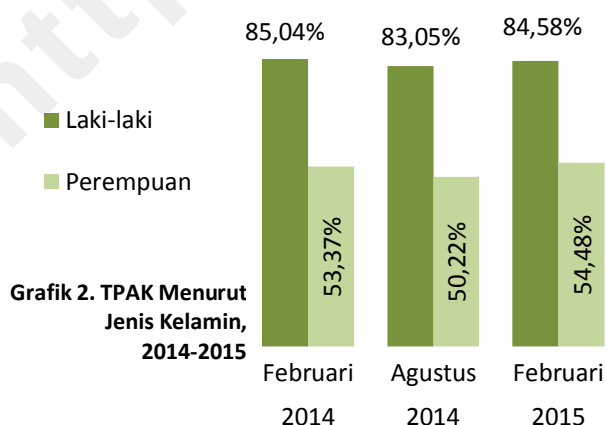
“Jumlah angkatan kerja dan TPAK meningkat”



Jumlah penduduk umur 15 tahun keatas yang termasuk angkatan kerja berdasarkan hasil Sakernas Februari 2015 mencapai 128,30 juta orang. Jumlah tersebut naik sebanyak 6,43 juta orang apabila dibandingkan dengan keadaan Agustus 2014 (121,87 juta orang) dan naik sebanyak 2,98 juta orang jika dibandingkan keadaan Februari

2014 (125,32 juta orang), lihat Lampiran 3. Meningkatnya jumlah angkatan kerja juga berpengaruh pada meningkatnya persentase TPAK dari 66,60 persen pada Agustus 2014 menjadi 69,50 persen pada Februari 2015, jika dibandingkan dengan keadaan setahun yang lalu (Februari 2014), TPAK Februari 2015 juga mengalami peningkatan yaitu meningkat sebesar 0,33 persen poin dari angka 69,17 persen.

“TPAK laki-laki masih lebih tinggi dari TPAK perempuan”



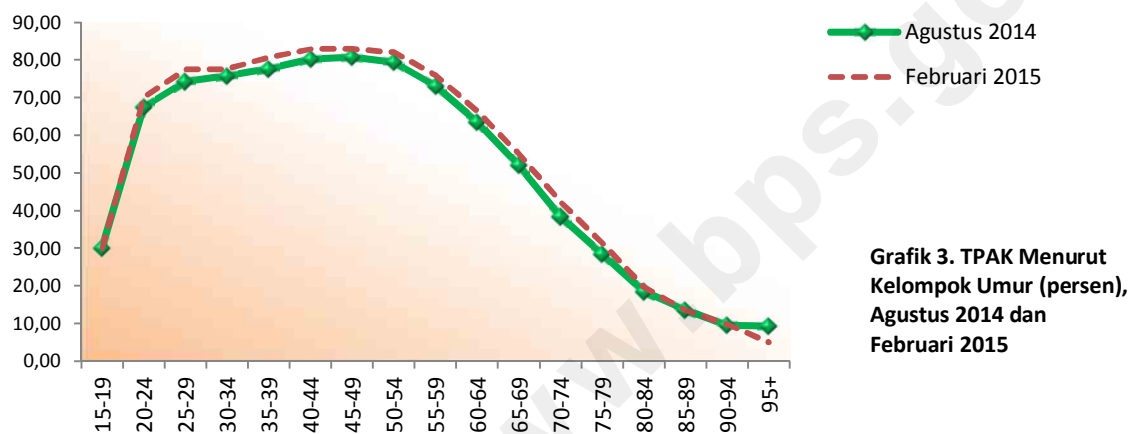
Di Indonesia, biasanya TPAK laki-laki jauh lebih tinggi dibandingkan dengan TPAK perempuan. Gambaran tersebut juga terlihat pada keadaan Februari 2015, dimana TPAK laki-laki mencapai 84,58 persen sementara pada perempuan hanya 54,48 persen.

Hal tersebut dapat diartikan bahwa dari 100 orang penduduk usia kerja laki-laki, yang termasuk angkatan kerja sekitar 85 orang, sementara pada perempuan dari 100 orang penduduk usia kerja

perempuan, hanya sekitar 54 orang yang termasuk angkatan kerja. Pola yang sama juga terjadi pada periode Agustus 2014 maupun Februari 2014, dimana TPAK laki-laki lebih tinggi sekitar 30 persen dibanding TPAK perempuan.

“TPAK Februari 2015 hampir selalu lebih tinggi dari Agustus 2014 pada tiap kelompok umur”

Secara total TPAK Februari 2015 lebih tinggi dari pada TPAK Agustus 2014, hal yang sama juga terjadi pada hampir semua kelompok umur, kecuali pada kelompok umur 15–19 tahun, kelompok umur 85–89 tahun, dan kelompok umur 95 tahun ke atas.



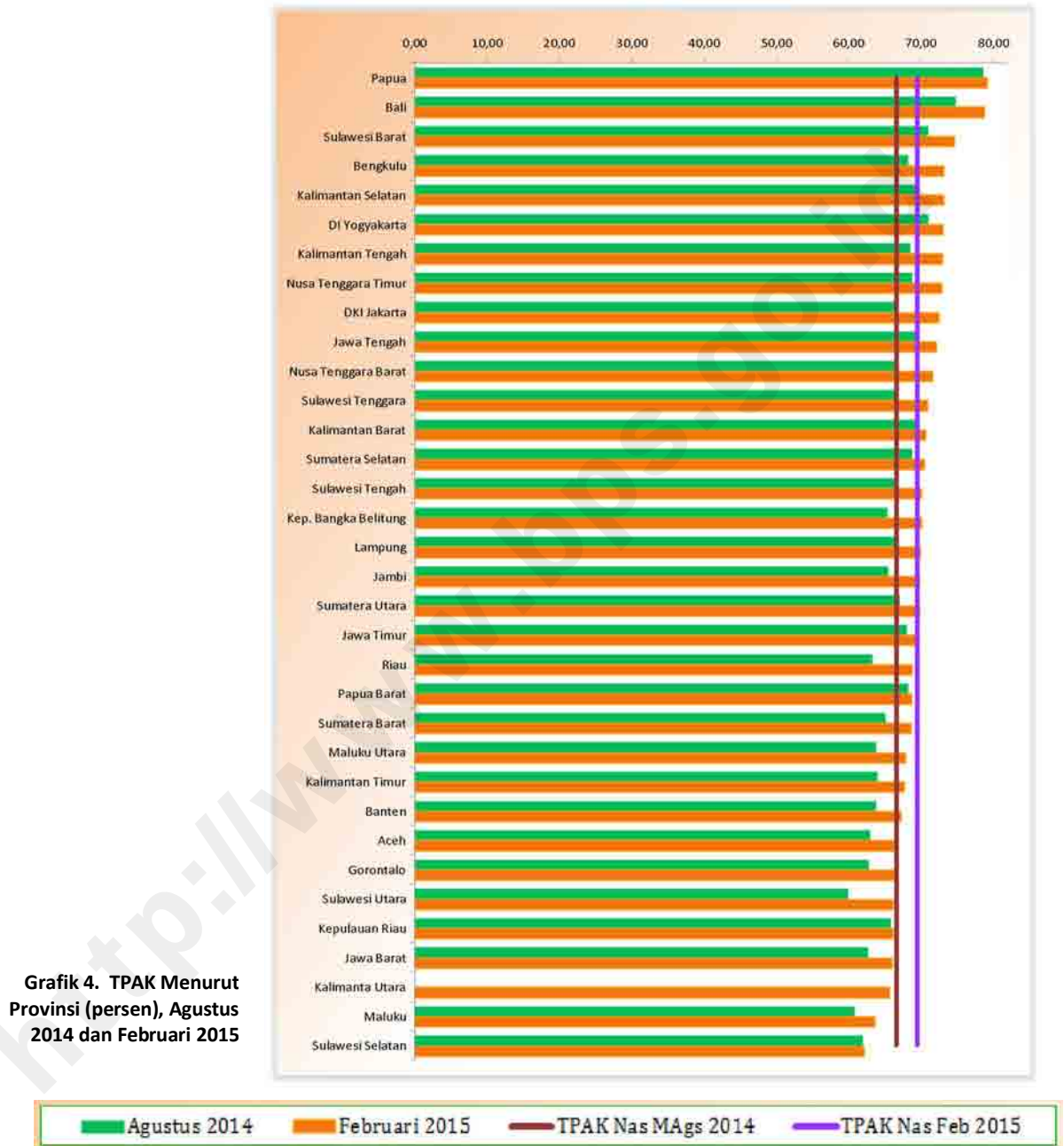
Grafik 3. TPAK Menurut Kelompok Umur (persen), Agustus 2014 dan Februari 2015

“Papua, Bali dan Sulawesi Barat memiliki TPAK tertinggi”

TPAK menurut provinsi berdasarkan Sakernas Februari 2015 menunjukkan bahwa provinsi dengan TPAK tertinggi berturut-turut adalah Provinsi Papua (79,26 persen), Provinsi Bali (78,86 persen) dan Provinsi Sulawesi Barat (74,74 persen). Kedudukan TPAK ketiga provinsi tersebut lebih tinggi dari TPAK nasional sebesar 69,50 persen. Ketiga provinsi tersebut juga memiliki TPAK yang tertinggi pada Agustus 2014 dengan urutan yang sama hanya persentasenya yang berbeda dimana Provinsi Papua mempunyai TPAK sebesar 78,67 persen, Provinsi Bali mempunyai TPAK sebesar 74,91 persen dan Provinsi Sulawesi Barat mempunyai TPAK sebesar 71,06 persen.

Urutan provinsi dengan TPAK terendah pada Februari 2015 ini diduduki oleh Provinsi Sulawesi Selatan (62,23 persen), Provinsi Maluku (63,71 persen), dan Provinsi Kalimantan Utara (65,70 persen). Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) merupakan Provinsi baru hasil pemekaran Provinsi Kalimantan Timur yang

datanya baru ada pada Sakernas Februari 2015 ini. Sedangkan tiga urutan provinsi dengan TPAK terendah pada keadaan Agustus 2014, berturut-turut diduduki oleh Provinsi Sulawesi Utara (59,99 persen), Provinsi Maluku (60,92 persen) dan Provinsi Sulawesi Selatan (62,04 persen) (Lihat Lampiran 7).

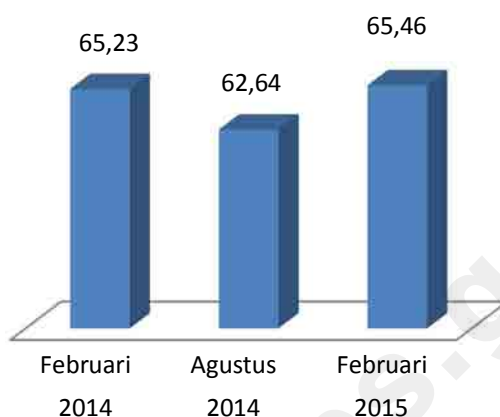


KILM 2. RASIO PENDUDUK BEKERJA TERHADAP JUMLAH PENDUDUK (*EMPLOYMENT TO POPULATION RATIO-EPR*)

“Rasio penduduk bekerja terhadap jumlah penduduk pada Februari 2015 adalah sebesar 65,46”

Salah satu indikator penting dalam pasar kerja adalah EPR, secara nasional angka EPR pada Februari 2015 adalah sebesar 65,46. Berdasarkan angka tersebut bisa diinterpretasikan bahwa dari 100 orang penduduk umur 15 tahun ke atas, terdapat sekitar 65 orang yang bekerja pada Februari 2015.

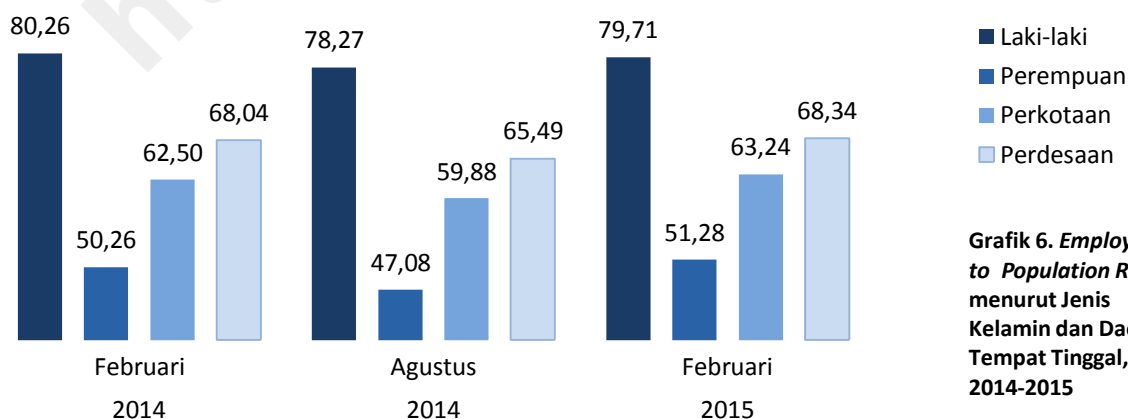
EPR ini mengalami peningkatan jika dibandingkan keadaan Agustus 2014 maupun Februari 2014, dimana masing-masing meningkat sebesar 2,82 poin dan 0,23 poin.



Grafik 5. *Employment to Population Ratio, 2014-2015*

“EPR laki-laki lebih tinggi dari EPR perempuan dan EPR di perdesaan lebih tinggi dari EPR di perkotaan”

Pada periode Februari 2014, Agustus 2014 maupun Februari 2015, dilihat berdasarkan jenis kelamin EPR laki-laki lebih tinggi sekitar 1,5 kali dibandingkan EPR perempuan. Sebagai contoh pada Februari 2015, EPR laki-laki pada periode ini adalah sebesar 79,71 sedangkan EPR perempuan hanya sebesar 51,28. Berdasarkan klasifikasi perbedaan wilayah, pada Februari 2015 EPR daerah perkotaan (63,24) lebih rendah dibanding EPR daerah perdesaan (68,34). Begitu

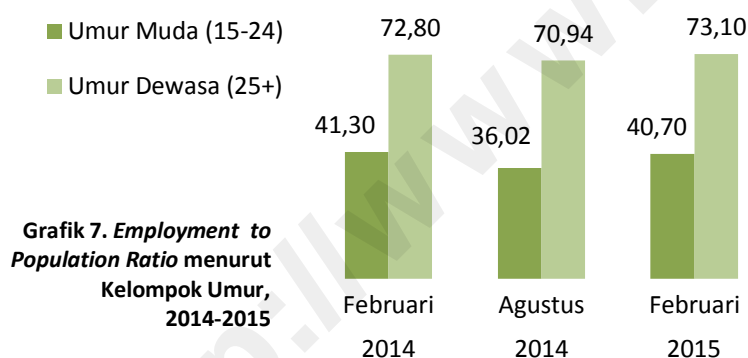


Grafik 6. *Employment to Population Ratio menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal, 2014-2015*

pula untuk periode Agustus 2014 dan Februari 2014, dimana wilayah perkotaan EPR-nya lebih rendah dibanding wilayah perdesaan. EPR daerah perkotaan periode Agustus 2014-Februari 2015 mengalami peningkatan, yaitu meningkat sebesar 3,36 poin sedangkan untuk wilayah perdesaan juga mengalami peningkatan yaitu meningkat sebesar 2,85 poin.

“EPR kelompok umur muda lebih rendah dari EPR kelompok umur dewasa”

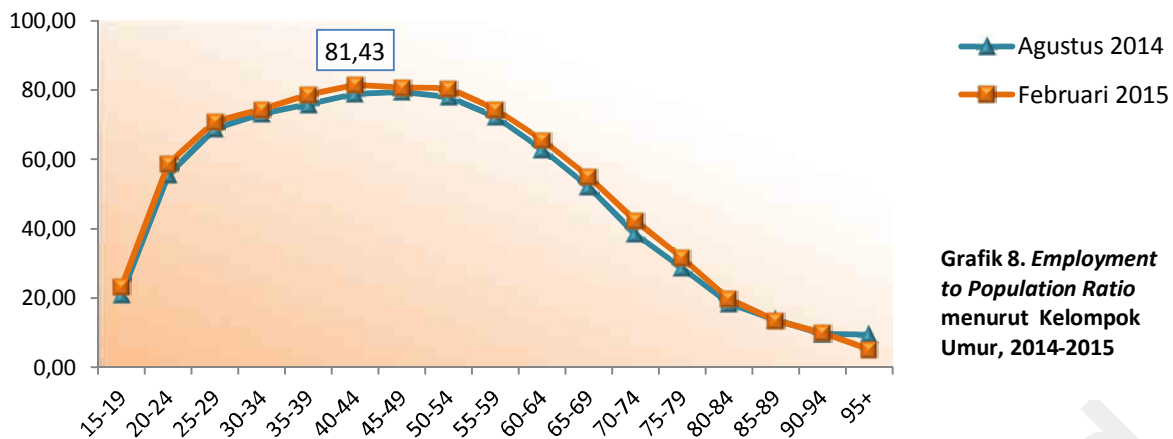
Grafik 7, memperlihatkan bahwa EPR penduduk kelompok umur muda selalu lebih rendah dari penduduk kelompok umur dewasa baik pada Februari 2014, Agustus 2014, maupun Februari 2015. EPR penduduk kelompok umur muda lebih rendah sekitar 30 persen dari penduduk kelompok umur dewasa. EPR penduduk kelompok umur muda (kelompok umur 15–24 tahun), pada periode Agustus 2014-Februari 2015 meningkat sebesar 4,68 poin dari 36,02 menjadi 40,70. Namun pada periode Februari 2014–Februari 2015 EPR penduduk kelompok umur muda mengalami penurunan yaitu menurun sebesar 0,60 poin. Sedangkan EPR untuk penduduk kelompok dewasa (umur 25 tahun ke atas), pada periode Agustus 2014-Februari 2015 mengalami peningkatan yaitu meningkat sebesar



2,16 poin, dari 70,94 menjadi 73,10. Begitu pula untuk periode Februari 2014–Februari 2015 EPR pada kelompok umur dewasa juga mengalami peningkatan, yaitu meningkat sebesar 0,30 poin dari angka 72,80.

“EPR tertinggi pada kelompok umur 40-44 tahun”

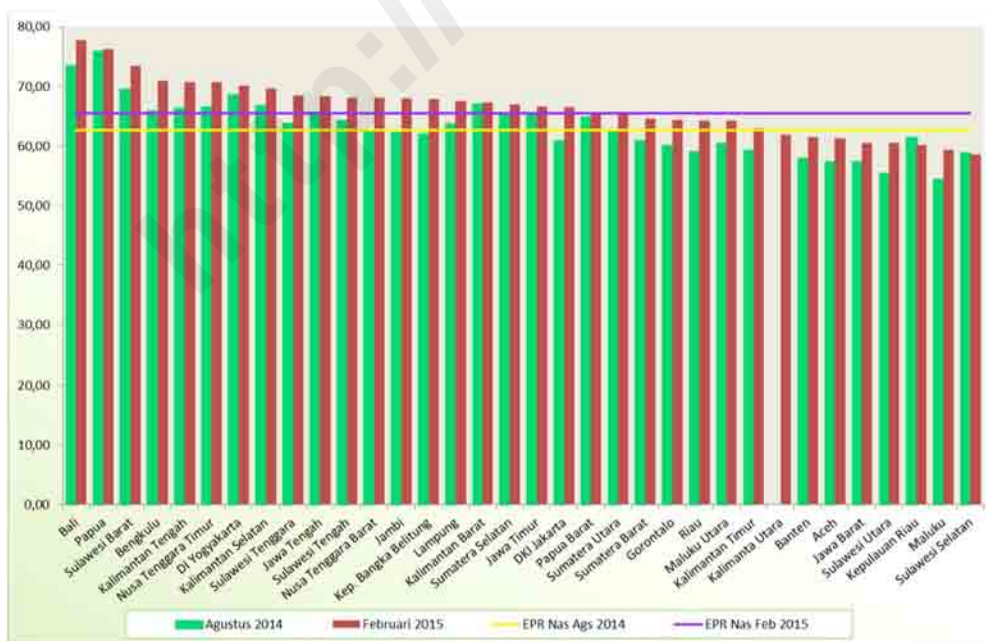
Pola EPR berdasarkan kelompok umur yang terlihat pada Grafik 8 mirip dengan pola TPAK pada Grafik 1. Hal ini menunjukkan dominasi jumlah penduduk bekerja pada komponen penduduk usia kerja. Dari grafik 8 terlihat bahwa puncak EPR untuk keadaan Februari 2015 ini berada pada kelompok umur 40–44 tahun dengan EPR 81,43. Grafik EPR periode Agustus 2014 dan Februari 2015 terlihat berhimpitan hampir pada semua kelompok umur, dengan nilai EPR Februari 2015 yang lebih tinggi pada hampir semua kelompok umur kecuali kelompok umur 85-89 tahun dan 95 tahun ke atas.



Grafik 8. *Employment to Population Ratio* menurut Kelompok Umur, 2014-2015

“EPR tertinggi di Provinsi Bali, Papua dan Sulawesi Barat”

Grafik 9 dan Lampiran 9, menunjukkan provinsi-provinsi dengan EPR tertinggi pada Februari 2015, yaitu Provinsi Bali (77,78), Provinsi Papua (76,31) dan Provinsi Sulawesi Barat (73,39), posisi ini hampir mirip jika dibandingkan dengan keadaan Agustus 2014 dimana provinsi dengan EPR tertinggi diduduki oleh Provinsi Papua (75,96), Provinsi Bali (73,48), dan Provinsi Sulawesi Barat (69,58). Sementara itu, provinsi dengan EPR terendah pada periode Februari 2015 adalah Provinsi Sulawesi Selatan (58,61) Provinsi Maluku (59,43) dan Provinsi Kepulauan Riau (60,18), sedangkan pada keadaan Agustus 2014 posisi ini diduduki oleh Provinsi Maluku (54,52), Provinsi Sulawesi Utara (55,47), dan Provinsi Aceh (57,38).



Grafik 9. EPR Menurut Provinsi, Agustus 2014 dan Februari 2015

KILM 3. PENDUDUK YANG BEKERJA MENURUT STATUS PEKERJAAN UTAMA

“Mayoritas pekerja di di Indonesia berstatus berusaha”

Persentase penduduk yang bekerja menurut status pekerjaan utama pada Februari 2015 ini distribusinya tidak begitu berbeda jika dibandingkan dengan keadaan pada periode sebelumnya (Februari 2014 dan Agustus 2014). Berdasarkan Tabel 1, persentase terbesar penduduk bekerja diduduki oleh penduduk dengan status berusaha (46,79 persen), diikuti dengan penduduk bekerja dengan upah/gaji (38,58 persen) dan urutan terakhir adalah penduduk bekerja dengan status pekerja keluarga (9,83 persen).

Tabel 1. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin, 2014–2015

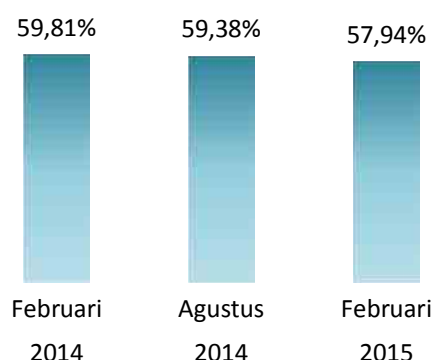
Status Pekerjaan Utama	2014		2015
	Februari	Agustus	Februari
(1)	(2)	(3)	(4)
Total	100,00	100,00	100,00
Penduduk bekerja dengan upah/gaji (buruh/karyawan/pegawai)	36,68	36,97	38,58
Berusaha	47,13	48,37	46,79
Pengusaha	3,51	3,65	3,48
Berusaha sendiri + berusaha dibantu buruh tidak tetap	33,90	34,69	33,47
Pekerja bebas	9,72	10,03	9,83
Pekerja keluarga	16,19	15,60	14,64

Pada Tabel 1, penduduk yang bekerja dengan status berusaha mengalami penurunan sebesar 1,58 persen poin untuk periode Agustus 2014–Februari 2015, untuk status buruh/karyawan/pegawai mengalami kenaikan sebesar 1,61 persen poin, sedangkan penduduk yang bekerja dengan status pekerja keluarga mengalami penurunan sebesar 0,96 persen poin.

Jika dibandingkan dengan periode setahun yang lalu (Februari 2014), penduduk bekerja dengan status berusaha mengalami penurunan sebesar 0,34 persen poin, buruh/karyawan/pegawai meningkat sebesar 1,90 persen, dan pekerja keluarga menurun sebesar 1,55 persen.

“Terjadi penurunan persentase pekerja rentan”

Khusus untuk pekerja rentan/*vulnerable employment* mencakup berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/tak dibayar, pekerja bebas dan pekerja keluarga pada Februari 2015 mencapai 57,94 persen, hal ini dapat dikatakan bahwa dari 100 orang penduduk yang bekerja

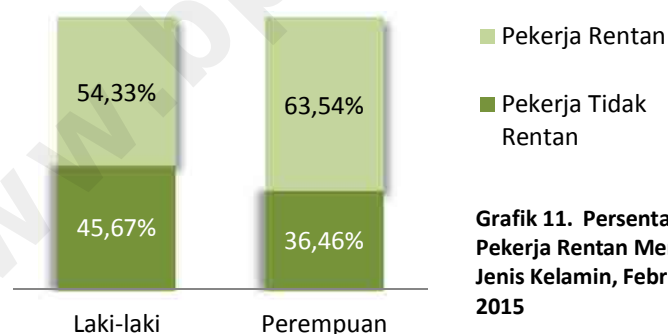


Grafik 10.
Persentase
Pekerja Rentan,
2014-2015

terdapat sekitar 58 orang yang masuk kategori pekerja rentan. Jika dibandingkan dengan keadaan Agustus 2014, maupun Februari 2014 persentase pekerja rentan terus mengalami penurunan masing-masing menurun sebesar 1,44 persen poin dan 1,87 persen poin.

“Sebagian besar perempuan masuk kategori pekerja rentan”

Berdasarkan hasil Sakernas Februari 2015, pada pekerja perempuan proporsi pekerja rentan sebesar 63,54 persen, yang berarti hampir dua per tiga pekerja perempuan masuk kategori rentan. Sementara pada laki-laki proporsi pekerja rentan sebesar 54,33 persen.

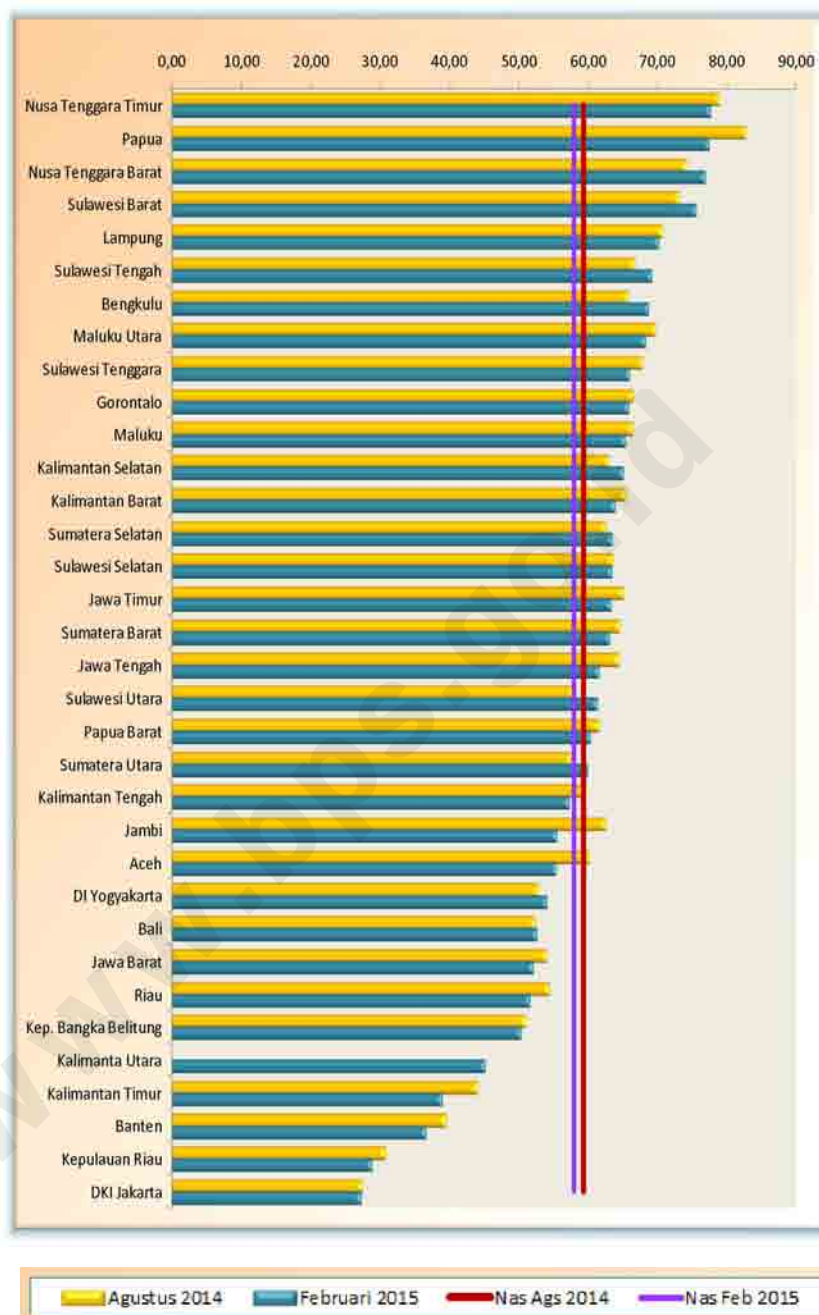


Grafik 11. Persentase
Pekerja Rentan Menurut
Jenis Kelamin, Februari
2015

“Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan provinsi dengan persentase pekerja rentan tertinggi”

Provinsi dengan persentase pekerja rentan tertinggi pada Februari 2015, yaitu Provinsi Nusa Tenggara Timur (77,70), Provinsi Papua (77,43) dan Provinsi Nusa Tenggara Barat (76,86). Jika dibandingkan dengan Agustus 2014, provinsi dengan persentase pekerja rentan tertinggi adalah Provinsi Papua (82,67 persen), Nusa Tenggara Timur (78,91 persen), dan Nusa Tenggara Barat (74,13 persen). Sebaliknya provinsi dengan persentase pekerja rentan terendah pada Februari 2015 ini diduduki oleh Provinsi DKI (27,30), Provinsi Kepulauan Riau (28,83) dan Provinsi Banten (36,64) (Grafik 12 dan Lampiran 10).

Grafik 12. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Termasuk Pekerja Rentan Menurut Provinsi, Agustus 2014 dan Februari 2015



KILM 4. PENDUDUK YANG BEKERJA MENURUT LAPANGAN USAHA

“Mayoritas penduduk bekerja di sektor jasa-jasa”

Kondisi lapangan pekerjaan utama di Indonesia pada Februari 2015 masih mempunyai pola yang sama dengan tahun 2014 yaitu didominasi oleh sektor jasa-jasa dengan persentase penduduk yang bekerja pada sektor jasa-jasa sebesar 45,43 persen. Selanjutnya adalah sektor pertanian sebesar 33,20 persen, dan sektor manufaktur sebesar 21,37 persen.

Tabel 2. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin, 2014–2015

Lapangan Pekerjaan Utama	2014		2015
	Februari	Agustus	Februari
(1)	(2)	(3)	(4)
Total	100,00	100,00	100,00
Pertanian	34,56	34,00	33,20
Manufaktur	20,76	21,16	21,37
Pertambangan	1,38	1,25	1,18
Industri	13,02	13,31	13,56
Listrik, Gas dan Air	0,26	0,25	0,26
Bangunan	6,10	6,35	6,38
Jasa-jasa	44,68	44,84	45,43
Perdagangan	21,84	21,66	22,05
Transportasi	4,50	4,46	4,30
Keuangan	2,70	2,65	3,02
Jasa Kemasyarakatan	15,64	16,07	16,06

Apabila dilihat lebih lanjut, penyumbang terbesar dari sektor jasa-jasa adalah sektor perdagangan sebesar 22,05 persen dan sektor jasa kemasyarakatan 16,06 persen. Sedangkan untuk sektor manufaktur penyumbang terbesarnya adalah sektor industri dan sektor bangunan dengan persentase masing-masing sebesar 13,56 persen dan 6,38 persen.

Selain mendominasi, sektor jasa-jasa juga mengalami kenaikan sebesar 0,59 persen poin dari Agustus 2014, sektor manufaktur juga mengalami kenaikan sebesar 0,21 persen poin sedangkan sektor pertanian mengalami penurunan sebesar 0,80 persen poin.

Begitu pula pada periode Sakernas Februari 2014 ke Februari 2015, sektor manufaktur dan sektor jasa-jasa mengalami kenaikan masing-masing sebesar

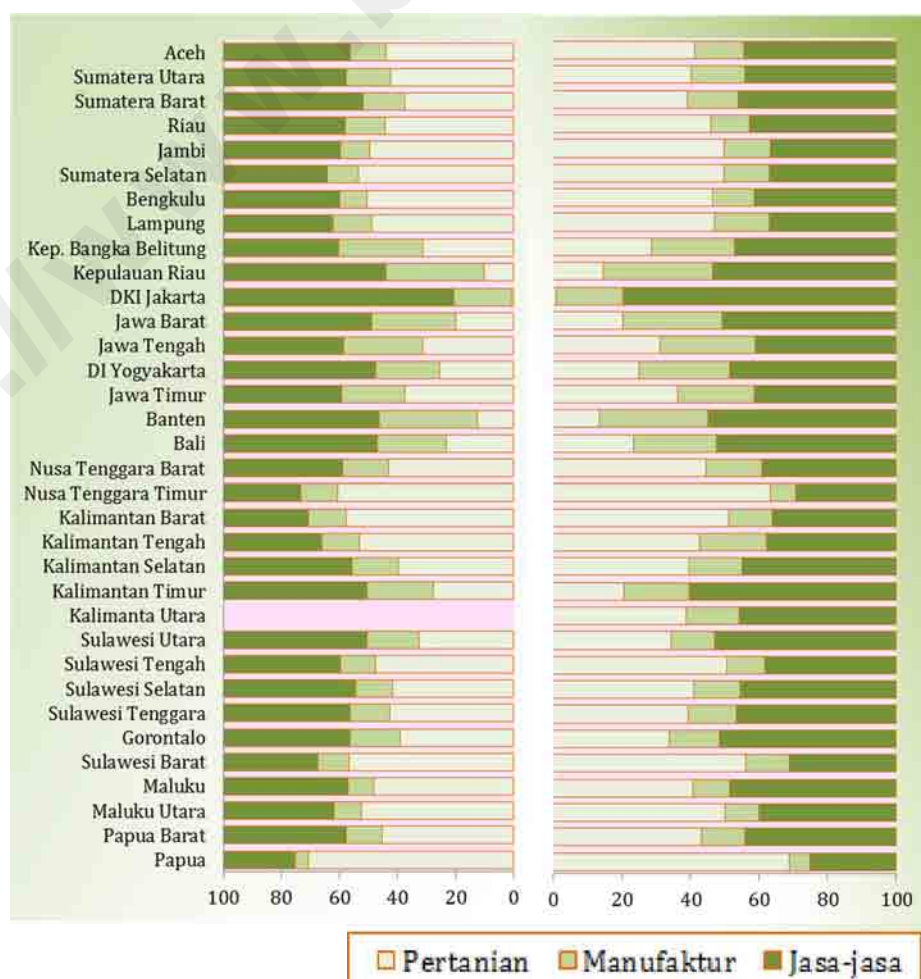
0,61 persen poin dan 0,75 persen poin sedangkan sektor pertanian mengalami penurunan yang cukup besar yaitu 1,35 persen poin.

“ Baik Februari 2015 dan Agustus 2014, provinsi dengan persentase tertinggi yang penduduknya bekerja di sektor pertanian adalah Papua”

Komposisi sektoral Sakernas Februari 2015 menurut provinsi menunjukkan bahwa provinsi dengan persentase tertinggi penduduk yang bekerja di sektor pertanian adalah Provinsi Papua (68,76 persen), provinsi dengan persentase tertinggi penduduk bekerja di sektor manufaktur adalah Provinsi Kepulauan Riau (32,03 persen) dan provinsi dengan persentase tertinggi penduduk bekerja di sektor jasa-jasa adalah Provinsi DKI Jakarta (79,58 persen).

Kondisi ini tidak mengalami perubahan pada periode Agustus 2014 dimana pada sektor pertanian Provinsi Papua masih mendominasi yaitu 70,59 persen, sektor manufaktur oleh Provinsi Kepulauan Riau sebesar 33,87 persen, dan sektor jasa-jasa oleh Provinsi DKI Jakarta sebesar 79,59 persen, lihat Grafik 13 dan Lampiran 11.

Grafik 13. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Provinsi dan Lapangan Pekerjaan Utama, Agustus 2014 dan Februari 2015

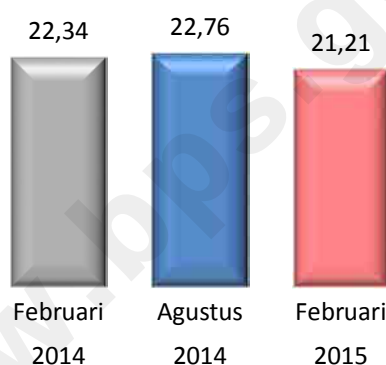


KILM 5. PEKERJA PARUH WAKTU

Jumlah jam kerja berdampak pada kesehatan dan kesejahteraan penduduk yang bekerja, serta tingkat produktivitas dan biaya tenaga kerja perusahaan. Mengukur tingkat dan tren jam kerja di masyarakat untuk berbagai kelompok penduduk bekerja dan untuk penduduk bekerja secara individu menjadi penting ketika melakukan pemantauan kerja dan kondisi hidup, maupun ketika menganalisis perkembangan ekonomi. Indikator pekerja paruh waktu terfokus pada individu dengan jumlah jam kerja kurang dari *full time*, sebagai persentase dari total penduduk bekerja.

“Tingkat pekerja paruh waktu 21,21 persen”

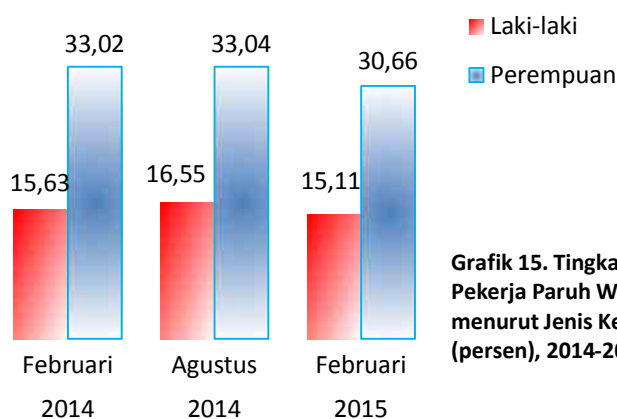
Pada Februari 2015, tingkat pekerja paruh waktu mencapai 21,21 persen. Hal ini dapat diartikan bahwa dari 100 orang yang bekerja, terdapat sekitar 21 orang yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu. Tingkat pekerja paruh waktu ini mengalami penurunan terhadap Agustus dan Februari 2014 yaitu sebesar 1,55 persen poin dan 1,13 persen poin.



Grafik 14. Tingkat Pekerja Paruh Waktu, 2014-2015

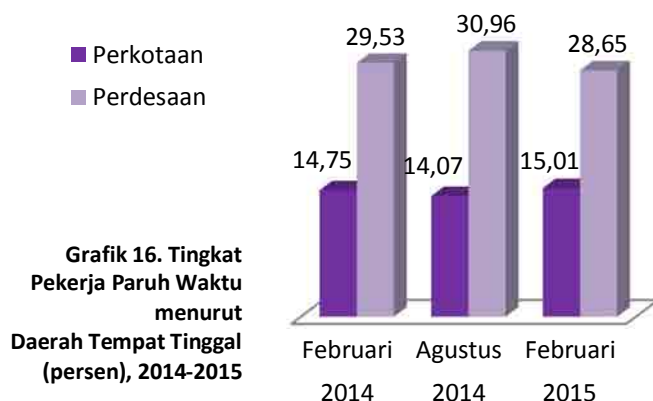
“Tingkat pekerja paruh waktu perempuan lebih tinggi dari pada tingkat pekerja paruh waktu laki-laki”

Hasil Sakernas Februari 2015 menunjukkan bahwa tingkat pekerja paruh waktu perempuan mencapai hampir dua kali lipat lebih tinggi dibandingkan tingkat pekerja paruh waktu laki-laki, yaitu masing-masing sebesar 30,66 persen dan 15,11 persen. Apabila dibandingkan baik dengan keadaan Agustus maupun Februari 2014, tingkat pekerja paruh waktu perempuan pada Februari 2015 mengalami penurunan sebesar 2,38 dan 2,36 persen poin.



Grafik 15. Tingkat Pekerja Paruh Waktu menurut Jenis Kelamin (persen), 2014-2015

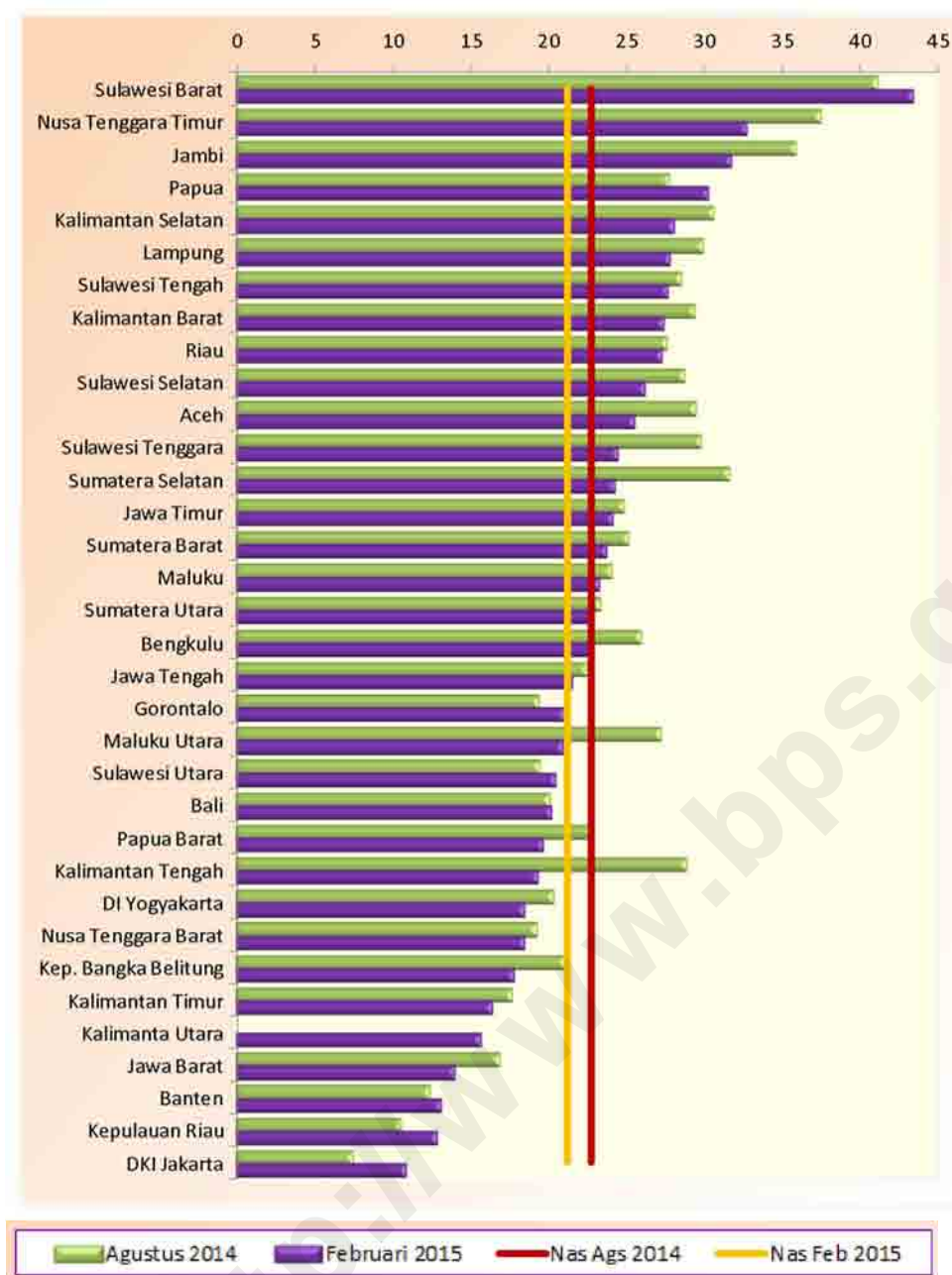
“ Tingkat pekerja paruh waktu perdesaan mengalami penurunan, sementara di perkotaan terjadi sebaliknya ”



Jika dilihat berdasarkan klasifikasi daerah, tingkat pekerja paruh waktu di perkotaan pada Februari 2015 mengalami kenaikan baik dibandingkan periode Agustus maupun Februari 2014 yaitu masing-masing sebesar 0,94 dan 0,26 persen poin. Sedangkan sebaliknya di perdesaan mengalami penurunan baik dibandingkan Agustus (turun 2,31 persen poin) maupun Februari 2014 (turun 0,88 persen poin).

“Provinsi Sulawesi Barat memiliki tingkat pekerja paruh waktu tertinggi ”

Merujuk kembali pada hasil Sakernas Februari 2015 (Grafik 17; Lampiran 12), tingkat pekerja paruh waktu tertinggi diduduki oleh Provinsi Sulawesi Barat (43,42 persen), posisi kedua diduduki oleh Provinsi NTT (32,73 persen), dan posisi ketiga diduduki oleh Provinsi Jambi (31,71 persen). Sama halnya dengan Sakernas Agustus 2014 tiga provinsi tersebut memiliki urutan teratas pada tingkat pekerja paruh waktu. Sedangkan tiga provinsi dengan tingkat paruh waktu terendah pada Februari 2015 adalah Provinsi DKI Jakarta (10,88 persen), Kepulauan Riau (12,85 persen) dan Banten (13,13 persen). Ketiga peringkat provinsi ini juga menjadi provinsi dengan tingkat pekerja paruh waktu terendah pada periode Sakernas Agustus 2014.



Grafik 17. Tingkat Pekerja Paruh Waktu Menurut Provinsi (persen), Agustus 2014 dan Februari 2015

“ *Share* perempuan pada pekerja paruh waktu sebesar 56,72 persen ”

Share perempuan pada pekerja paruh waktu hasil Sakernas Februari 2015 mencapai 56,72 persen, atau dapat diartikan bahwa dari 100 pekerja paruh waktu, sekitar 57 orang diantaranya adalah perempuan. *Share* perempuan pada pekerja paruh waktu periode Februari 2015 mengalami peningkatan bila



Grafik 18. *Share* Perempuan pada Pekerja Paruh Waktu (persen), 2014-2015

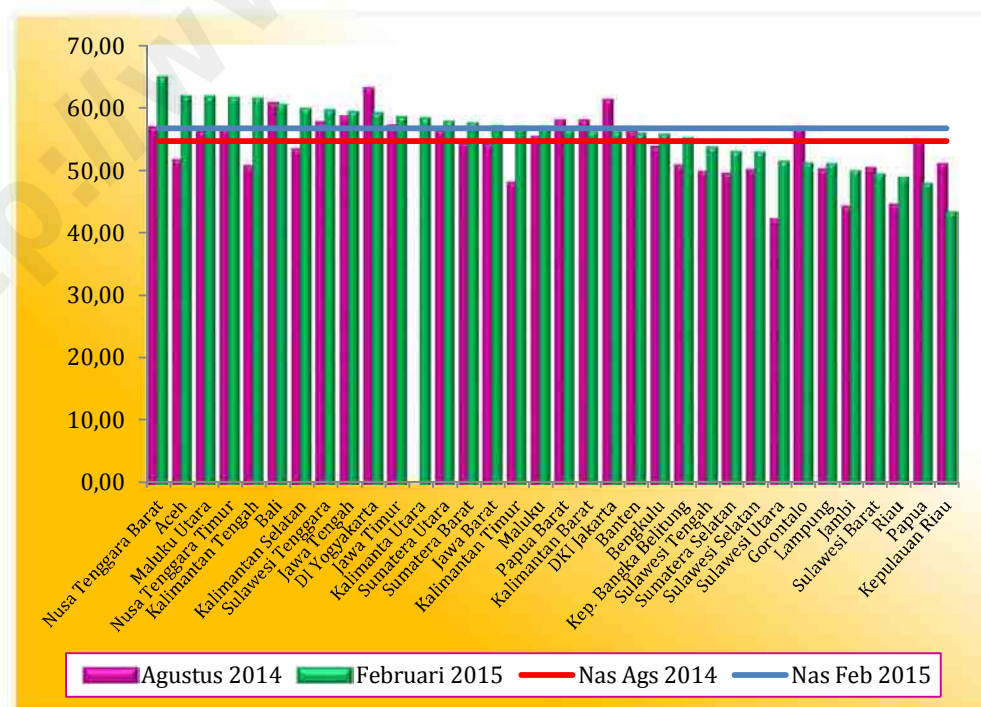
dibandingkan dengan keadaan Agustus 2014 sebesar 2,05 persen poin dan penurunan dari keadaan Februari 2014 sebesar 0,34 persen poin.

“ Nusa Tenggara Barat adalah provinsi dengan *share* perempuan pekerja paruh waktu tertinggi ”

Grafik 19 dan Lampiran 12 menunjukkan *share* perempuan pada pekerja paruh waktu menurut provinsi. Dari grafik tersebut dapat kita lihat bahwa provinsi dengan *share* perempuan pekerja paruh waktu tertinggi pada Februari 2015 terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (64,80 persen), Provinsi Aceh (61,65 persen) dan Maluku Utara (61,63 persen). Sedangkan pada periode Agustus 2014, provinsi dengan *share* perempuan pada pekerja paruh waktu tertinggi diduduki oleh Provinsi DI Yogyakarta (63,04 persen), Provinsi DKI Jakarta (61,12 persen) dan Provinsi Bali (60,68 persen).

Sebaliknya provinsi dengan *share* perempuan pekerja paruh waktu terendah berdasarkan hasil Sakernas Februari 2015 secara berturut-turut adalah Provinsi Kepulauan Riau sebesar 43,17 persen, Provinsi Papua sebesar 47,73 persen, dan Provinsi Riau sebesar 48,79 persen. Sedangkan pada Sakernas Agustus 2014, provinsi dengan *share* perempuan pekerja paruh waktu terendah diduduki oleh Provinsi Sulawesi Utara sebesar 42,03 persen, Provinsi Jambi sebesar 44,12 persen, dan Provinsi Riau sebesar 44,44 persen.

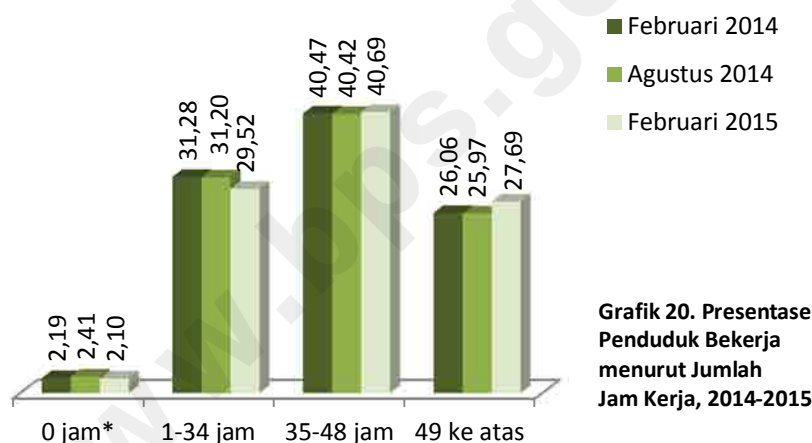
Grafik 19. Share Perempuan pada Pekerja Paruh Waktu Menurut Provinsi (persen),



KILM 6. PENDUDUK YANG BEKERJA MENURUT JUMLAH JAM KERJA

“ Mayoritas penduduk bekerja di atas 35 jam per minggu”

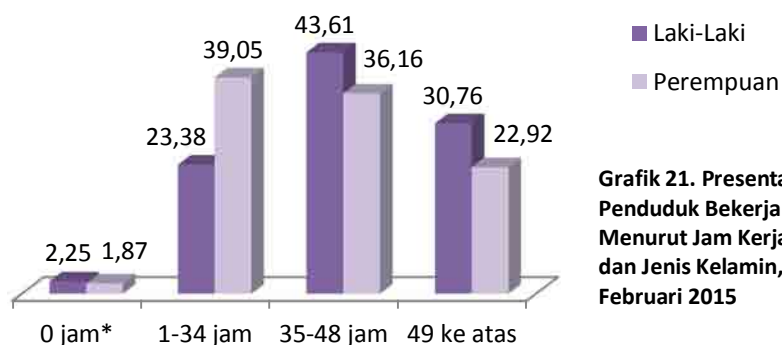
Berdasarkan hasil Sakernas Februari 2015, sebagian besar penduduk bekerja di atas 35 jam per minggu yang mencapai hampir dua pertiga dari total penduduk yang bekerja. Sementara itu penduduk yang bekerja di bawah 35 jam per minggu mencapai 31,62 persen dan mengalami penurunan jika dibandingkan dengan Agustus (33,61 persen) dan Februari 2014 (33,47 persen), masing-masing sebesar 1,99 persen poin dan 1,85 persen poin. Secara nasional, persentase tertinggi penduduk bekerja pada Februari 2015 berdasarkan jam kerja terdapat pada kelompok jam kerja 40–48 jam per minggu yaitu mencapai 30,34 persen. Selain itu masih banyak pula penduduk yang bekerja di atas 48 jam per minggu yaitu sekitar 27,68 persen (lihat Lampiran 13).



Grafik 20. Presentase Penduduk Bekerja menurut Jumlah Jam Kerja, 2014-2015

“ Penduduk perempuan lebih banyak yang bekerja di bawah 35 jam per minggu daripada laki-laki ”

Dapat dicermati pula pada Grafik 21, hasil Sakernas pada periode Februari 2015 secara umum menunjukkan bahwa lebih banyak penduduk perempuan yang bekerja di bawah 35 jam per minggu dibanding penduduk laki-laki. Persentase penduduk perempuan yang jam kerjanya di bawah 35 jam per minggu mencapai 40,92 persen, sementara persentase pada laki-laki dengan kategori jam kerja yang sama hanya sebesar 25,63 persen.

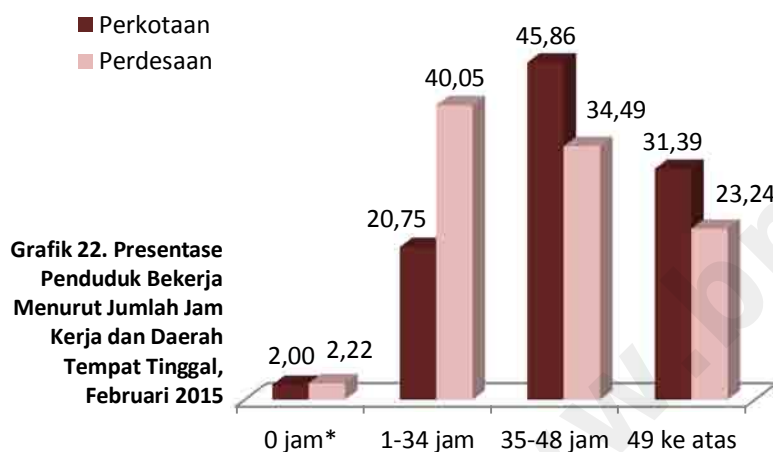


Grafik 21. Presentase Penduduk Bekerja Menurut Jam Kerja dan Jenis Kelamin, Februari 2015

Sedangkan untuk jam kerja di atas 48 jam per minggu persentase laki-laki cenderung lebih tinggi dibandingkan persentase perempuan yang bekerja pada kategori yang sama. Sakernas Februari 2015 menunjukkan persentase penduduk perempuan yang bekerja di atas 48 jam per minggu sebesar 22,92 persen, sementara persentase penduduk laki-laki mencapai 30,76 persen.

“Penduduk perdesaan lebih banyak yang bekerja di bawah 35 jam per minggu dibanding penduduk perkotaan”

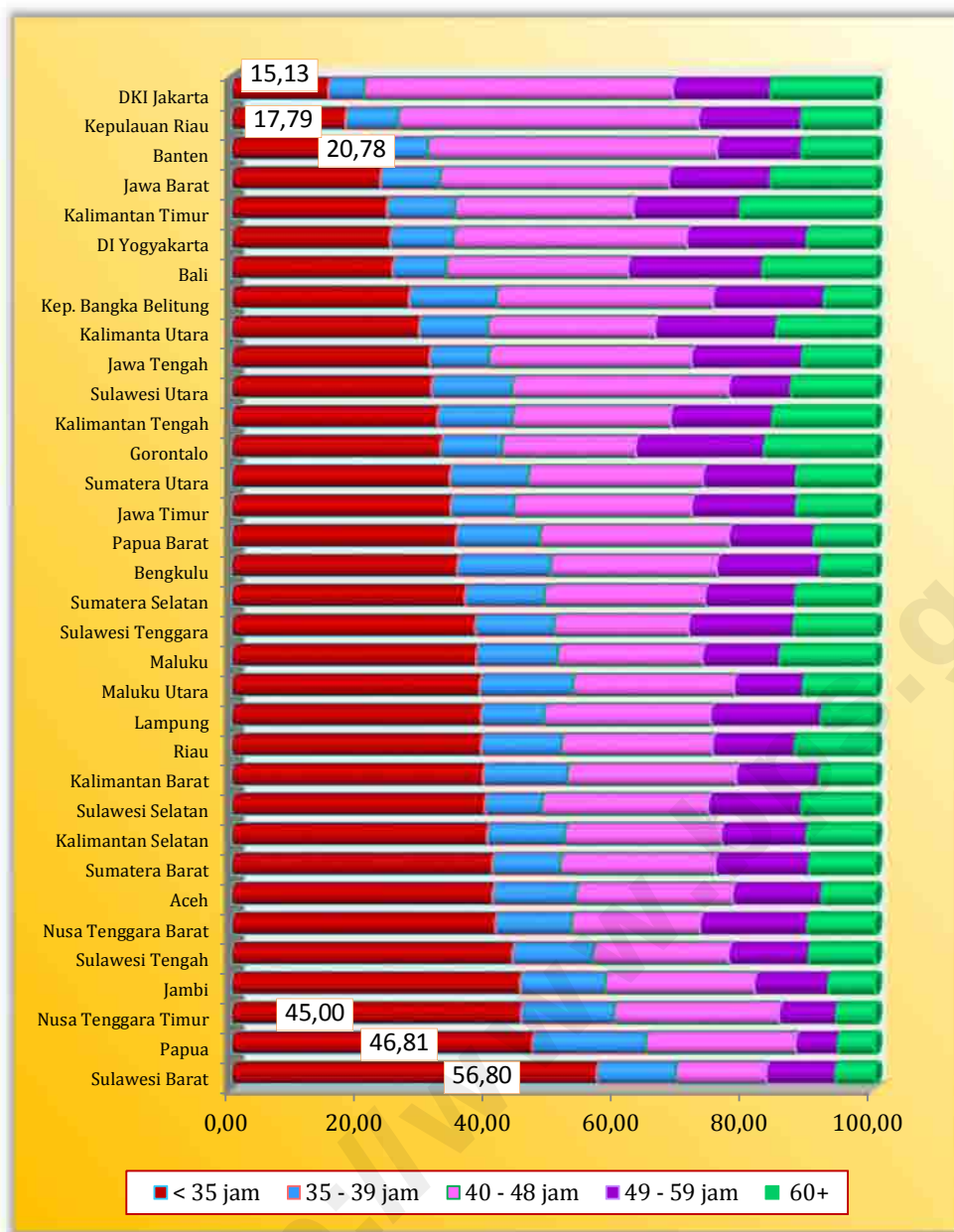
Apabila diamati lebih lanjut, terdapat perbedaan karakteristik menurut jam kerja antara penduduk yang bekerja di perdesaan dan di perkotaan. Penduduk di



perdesaan lebih banyak yang bekerja di bawah 35 jam per minggu dibanding penduduk perkotaan. Hasil Sakernas Februari 2015 menunjukkan bahwa persentase penduduk yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam per minggu) di daerah perdesaan mencapai 42,27 persen sementara di perkotaan hanya sebesar 22,75 persen.

“Provinsi dengan persentase penduduk yang bekerja dengan jam kerja di bawah 35 jam per minggu tertinggi adalah Provinsi Sulawesi Barat”

Berdasarkan Sakernas Februari 2015 seperti yang terlihat pada Grafik 23 dan Lampiran 14, menunjukkan bahwa tiga provinsi dengan persentase penduduk yang bekerja dengan jam kerja di bawah 35 jam per minggu terbanyak yaitu Provinsi Sulawesi Barat (56,80 persen), Papua (46,81 persen), dan Nusa Tenggara Timur (45,00 persen). Sedangkan sebaliknya tiga provinsi dengan persentase penduduk bekerja di bawah 35 jam seminggu yang terendah, yaitu Provinsi DKI Jakarta (15,13 persen), Kepulauan Riau (17,79 persen), dan Banten (20,78 persen).



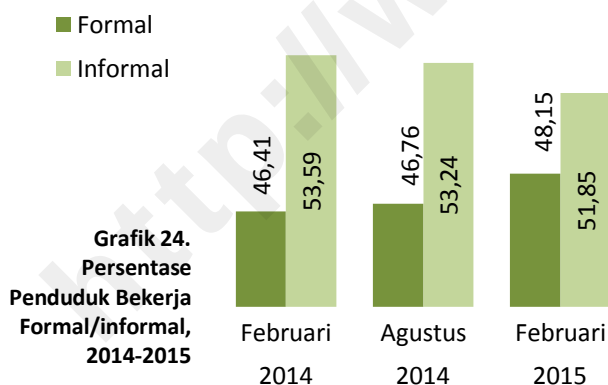
Grafik 23. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Provinsi dan Jumlah Jam Kerja, Februari 2015

KILM 7. PENDUDUK YANG BEKERJA DI SEKTOR INFORMAL

Sektor informal merupakan bagian penting dari kehidupan ekonomi, sosial, dan politik di sebagian besar negara berkembang, serta beberapa negara maju. Di negara-negara dengan tingkat pertumbuhan penduduk atau urbanisasi yang tinggi, ekonomi informal cenderung tumbuh untuk menyerap sebagian besar tenaga kerja. ICLS ke-15 mendefinisikan sektor informal sebagai unit produksi dalam usaha rumah tangga yang dimiliki oleh rumah tangga. Mereka yang bekerja di sektor informal terdiri dari semua orang yang selama periode acuan tertentu bekerja setidaknya di satu unit produksi yang memenuhi konsep sektor informal, terlepas dari status mereka dalam pekerjaan tersebut baik merupakan pekerjaan utama maupun sekunder. Resolusi ICLS memperbolehkan beberapa variasi konsep nasional. Akibatnya, informasi untuk indikator sering didasarkan pada definisi nasional dan pengukuran ekonomi informal.

“Mayoritas penduduk di Indonesia bekerja di sektor informal yaitu 51,85 persen”

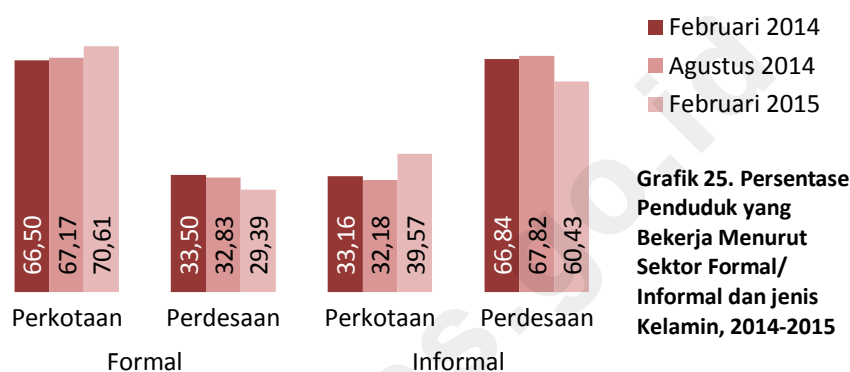
Berdasarkan hasil Sakernas Februari 2015 menunjukkan bahwa dari 120,85 juta orang yang bekerja, sebanyak 51,85 persen merupakan penduduk yang bekerja di sektor informal (62,66 juta orang). Pada periode Februari dan Agustus 2014, serta Februari 2015 tampak adanya penurunan persentase penduduk bekerja di sektor informal, sesuai dengan usaha pemerintah untuk terus menumbuhkan pekerjaan di sektor formal. Persentase penduduk yang bekerja di sektor informal



pada Februari 2014 sebesar 53,59 persen, turun menjadi 53,24 persen pada Agustus 2014, dan kembali turun pada Februari 2015 menjadi 51,85 persen. Sedangkan persentase sektor formal pada Februari 2014 mencapai 46,41 persen, naik menjadi 46,76 persen pada Agustus 2014, dan naik pada Februari 2015 hingga mencapai 48,15 persen.

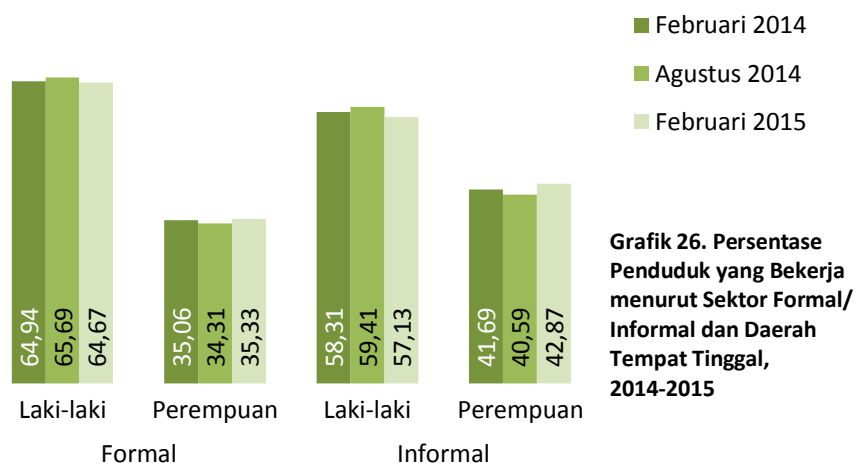
“Sektor formal masih didominasi laki-laki”

Berdasarkan perbedaan jenis kelamin, hasil Sakernas Februari 2015 menunjukkan bahwa sektor formal masih didominasi kaum laki-laki, yang mencapai 64,67 persen (hampir dua pertiga bagian), sedangkan pada Februari dan Agustus 2014 masing-masing mencapai 64,94 persen dan 65,69 persen. Sementara pada sektor informal kaum laki-laki juga mendominasi tetapi dengan perbedaan yang tidak terlalu besar. Pada Februari 2015 persentase penduduk informal yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 57,13 persen sedangkan perempuan sebesar 42,87 persen.



“Pekerja di sektor informal lebih banyak tinggal di daerah perdesaan”

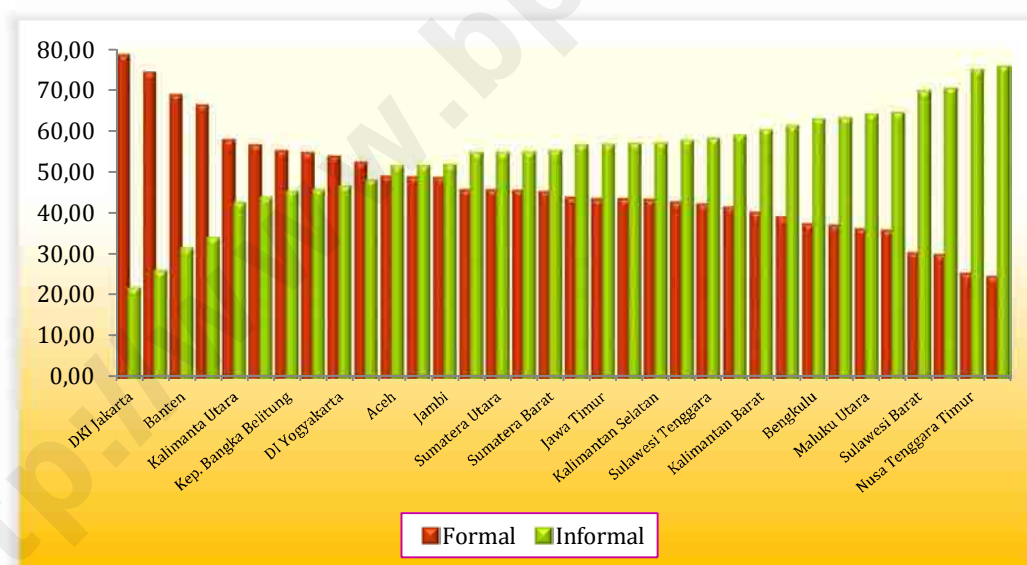
Berdasarkan Sakernas Februari 2015 seperti yang tampak pada Grafik 26 menunjukkan bahwa penduduk bekerja pada sektor formal yang tinggal di perkotaan mencapai 70,61 persen. Angka ini mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan keadaan Agustus 2014 yang mencapai 67,17 persen (naik 3,44 persen poin), begitu pula bila dibandingkan Februari 2014 juga mengalami peningkatan sebesar 4,11 persen poin. Di sisi lain, persentase penduduk yang bekerja pada sektor informal yang lebih mendominasi adalah daerah perdesaan, dan mengalami penurunan bila dibanding keadaan setahun yang lalu, yaitu dari 66,84 persen pada Februari 2014 turun menjadi 60,43 persen pada Februari 2015.



“Provinsi DKI Jakarta merupakan provinsi dengan persentase tertinggi penduduk bekerja di sektor formal ”

Apabila diamati berdasarkan perbedaan wilayah per provinsi, ternyata provinsi yang mendominasi sektor formal lebih banyak berada di wilayah barat Indonesia (lihat Grafik 27). Lima peringkat pertama provinsi dengan persentase tertinggi penduduk yang bekerja di sektor formal, tiga diantaranya berada di wilayah barat Indonesia, yaitu Provinsi DKI Jakarta (78,33 persen), Kepulauan Riau (74,07 persen), dan Banten (68,69 persen), sementara provinsi yang tidak terletak di wilayah barat Indonesia adalah Kalimantan Timur (66,11 persen) dan Kalimantan Utara (57,75 persen). Sementara itu di sisi lain, lima provinsi dengan persentase tertinggi penduduk yang bekerja di sektor informal secara berturut-turut diduduki oleh Provinsi Papua (75,49 persen), Nusa Tenggara Timur (74,83 persen), Nusa Tenggara Barat (70,29 persen), Sulawesi Barat (69,67 persen), dan Lampung (64,24 persen).

Grafik 27. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Berdasarkan Sektor Formal dan Informal Menurut Provinsi, Februari 2015



BAB 3

INDIKATOR PENGANGGURAN

KILM 8. PENGANGGURAN

“Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia masih sebesar 5,81 persen ”

Seperti yang terlihat pada Tabel 3, TPT berdasarkan Sakernas Februari 2015 mencapai 5,81 persen, yang berarti bahwa dari 100 orang angkatan kerja di Indonesia, terdapat sebanyak 6 orang yang masuk kategori penganggur. Hasil Sakernas Februari 2015 menunjukkan bahwa TPT di Indonesia mengalami fluktuasi bila dibandingkan dengan keadaan Februari dan Agustus 2014. Seperti yang tampak pada Tabel 3, TPT pada Februari 2015 mengalami penurunan sebesar 0,13 persen poin bila dibandingkan dengan Agustus 2014 (5,94 persen), namun mengalami kenaikan sebesar 0,11 persen poin dibandingkan Februari 2014 (5,70 persen).

Tabel 3. Tingkat Pengangguran Terbuka (persen), 2014–2015

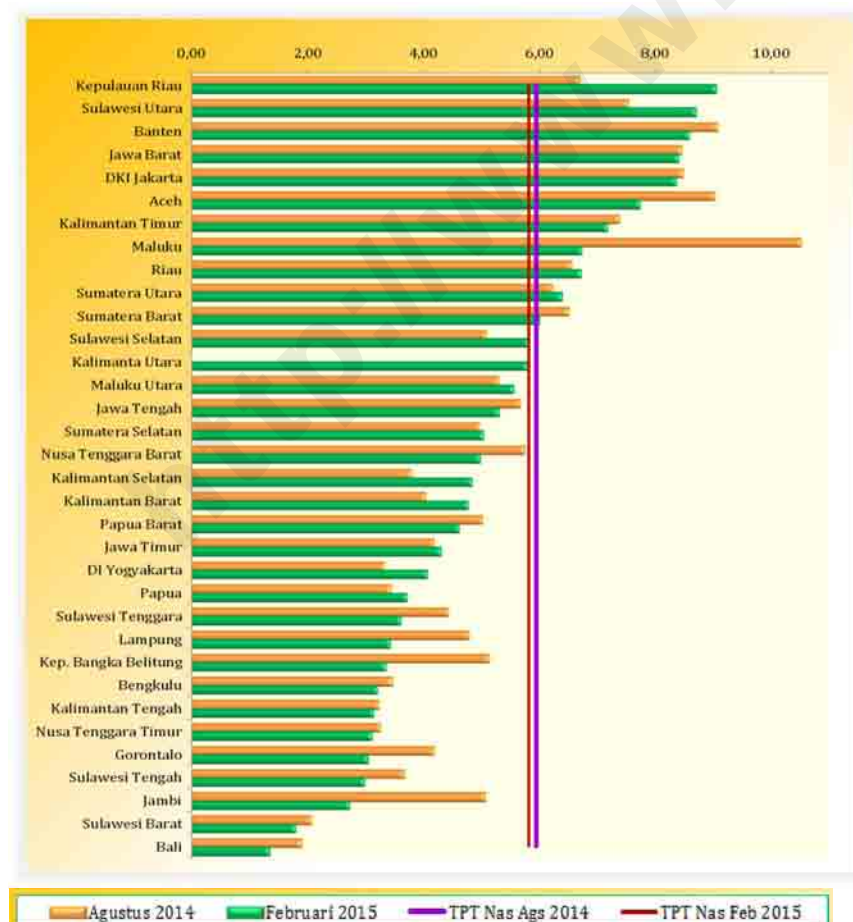
TPT	2014		2015
	Februari	Agustus	Februari
(1)	(2)	(3)	(4)
Total	5,70	5,94	5,81
Laki-laki	5,62	5,75	5,76
Perempuan	5,84	6,26	5,89
Perkotaan	6,97	7,12	7,02
Perdesaan	4,48	4,81	4,32

Adanya penurunan TPT berdasarkan jenis kelamin hanya ditunjukkan pada TPT perempuan pada periode Februari 2015 dibandingkan Agustus 2014, dengan penurunan sebesar 0,37 persen poin, sedangkan TPT laki-laki naik sebesar 0,01 persen poin. Berdasarkan wilayah tempat tinggal pada periode yang sama, penurunan TPT terjadi baik di daerah perkotaan maupun perdesaan dengan penurunan masing-masing sebesar 0,10 persen poin dan 0,49 persen poin. Sementara itu, seiring kenaikan TPT secara nasional pada Februari 2015 bila dibandingkan dengan Februari 2014, kenaikan juga terjadi pada laki-laki dan perempuan, masing-masing sebesar 0,14 dan 0,05 persen poin, sedangkan berdasarkan wilayah tempat tinggal kenaikan hanya terjadi pada wilayah

perkotaan sebesar 0,05 persen poin, sementara di wilayah perdesaan turun sebesar 0,16 persen poin.

“TPT tertinggi ada di Provinsi Kepulauan Riau, Sulawesi Utara, dan Banten”

Hasil Sakernas Februari 2015 menunjukkan bahwa TPT tertinggi menurut provinsi secara berturut-turut diduduki oleh Provinsi Kepulauan Riau (9,05 persen), Provinsi Sulawesi Utara (8,69 persen), dan Provinsi Banten (8,58 persen). Sementara hasil Sakernas Agustus 2014, TPT tertinggi berturut-turut diduduki oleh Provinsi Maluku (10,51 persen), Provinsi Banten (9,07 persen), dan Provinsi Aceh (9,02 persen). Sebaliknya, provinsi dengan TPT terendah berdasarkan Februari 2015 diduduki oleh Provinsi Bali dengan TPT sebesar 1,37 persen, kemudian posisi kedua diduduki oleh Provinsi Sulawesi Barat dengan TPT sebesar 1,81 persen, dan posisi ketiga diduduki Provinsi Jambi dengan TPT sebesar 2,73 persen. Sedangkan berdasarkan Sakernas Agustus 2014, provinsi dengan TPT terendah diduduki oleh Provinsi Bali (1,90 persen), kemudian posisi kedua diduduki oleh Provinsi Sulawesi Barat (2,08 persen), dan posisi ketiga diduduki Provinsi Kalimantan Tengah (3,24 persen). Selengkapnya dapat dilihat pada Grafik 28 dan Lampiran 17.



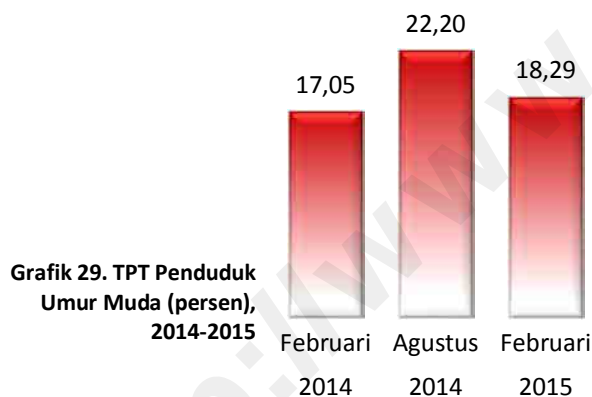
Grafik 28. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi (persen), Agustus 2014 dan Februari 2015

KILM 9. PENGANGGURAN PADA KELOMPOK UMUR MUDA

Penganggur pada kelompok umur muda merupakan masalah kebijakan yang penting bagi banyak negara yang tidak dapat dipisahkan dari proses pembangunan. Untuk tujuan indikator ini, istilah "umur muda" mencakup orang yang berumur 15 sampai 24 tahun, sedangkan "orang dewasa" didefinisikan sebagai orang yang berumur 25 tahun ke atas. Indikator pengangguran kaum muda disajikan dengan rincian sebagai berikut:

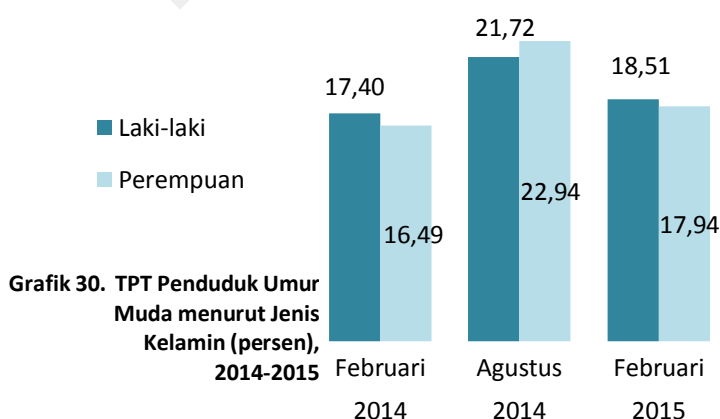
- 1) Tingkat pengangguran kaum muda;
- 2) Tingkat pengangguran kaum muda sebagai persentase dari tingkat pengangguran dewasa;
- 3) *Share* pengangguran kaum muda terhadap total penganggur;
- 4) Pengangguran kaum muda sebagai proporsi dari populasi kaum muda.

“TPT kelompok umur muda terus mengalami peningkatan”



Berdasarkan hasil Sakernas Februari 2015 TPT penduduk pada kelompok umur muda mencapai 18,29 persen, yang dapat diartikan bahwa dari 100 orang penduduk berumur 15–24 tahun yang termasuk angkatan kerja, terdapat sekitar 18 orang yang menganggur. Angka tersebut turun sebesar 3,91 persen poin bila dibandingkan dengan hasil Sakernas Agustus 2014 dan naik sebesar 1,24 persen poin apabila dibandingkan Februari 2014 (Grafik 29).

“TPT kelompok umur muda lebih tinggi pada laki-laki dibanding perempuan”



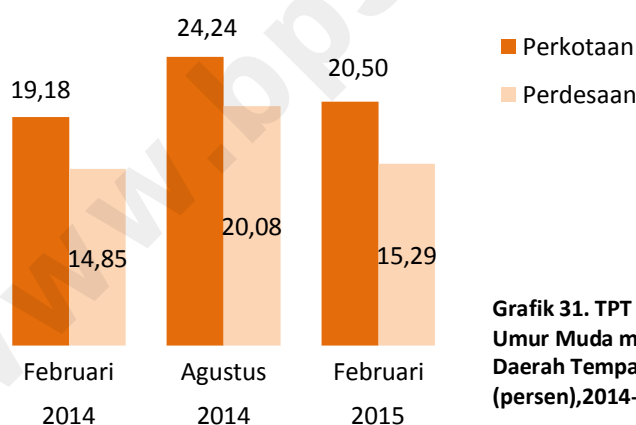
Ditinjau berdasarkan jenis kelamin, pada Februari 2014 maupun Februari 2015, TPT penduduk umur muda pada laki-laki cenderung lebih tinggi daripada perempuan. Berdasarkan hal tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa pada laki-laki umur 15–24 tahun lebih banyak yang tidak terserap pada pasar tenaga kerja

daripada perempuan di umur yang sama. Akan tetapi, pada tahun Agustus 2014, TPT penduduk umur muda laki-laki lebih rendah daripada perempuan.

Mengamati lebih lanjut TPT penduduk umur muda berdasarkan jenis kelamin, menunjukkan bahwa keadaan TPT umur muda pada Februari 2015 mengalami penurunan baik laki-laki maupun perempuan jika dibandingkan dengan keadaan Agustus 2014. Penurunan TPT pada perempuan lebih tinggi daripada laki-laki. TPT umur muda perempuan mengalami penurunan sebesar 5,00 persen poin, sedangkan laki-laki sebesar 3,21 persen poin.

“TPT kelompok umur muda lebih tinggi di wilayah perkotaan dibanding perdesaan”

Sementara itu, bila ditinjau berdasarkan klasifikasi daerah tempat tinggal, pada kelompok umur muda memperlihatkan bahwa pola TPT daerah perkotaan lebih tinggi daripada di daerah perdesaan. Seperti pada Februari 2015, TPT daerah perkotaan mencapai 20,50 persen, sementara di daerah perdesaan sebesar 15,29 persen. Hal tersebut bisa diartikan bahwa dari 100 penduduk usia 15–24 tahun yang termasuk angkatan kerja, untuk daerah perkotaan terdapat sekitar 21 orang yang menganggur, sementara untuk daerah perdesaan sekitar 15 orang.



Grafik 31. TPT Penduduk Umur Muda menurut Daerah Tempat Tinggal (persen), 2014-2015

“TPT kelompok umur muda enam kali lipat lebih tinggi daripada TPT dewasa”

Rasio TPT umur muda terhadap TPT dewasa pada Februari 2015 sebesar 5,58 yang dapat diartikan bahwa TPT umur muda enam kali lipat lebih tinggi dibandingkan dengan TPT dewasa. Sejalan dengan penurunan TPT umur muda pada Februari 2015 bila dibandingkan dengan Agustus 2014, rasio TPT umur muda terhadap TPT penduduk dewasa juga mengalami penurunan sebesar 2,55 poin, sementara jika dibandingkan dengan Februari 2014 rasio tersebut terlihat naik sebesar 0,45 poin. Apabila dibedakan menurut jenis kelamin, rasio TPT umur muda terhadap TPT penduduk dewasa pada laki-laki cenderung lebih tinggi dibandingkan pada perempuan seperti ditunjukkan berdasarkan hasil Sakernas

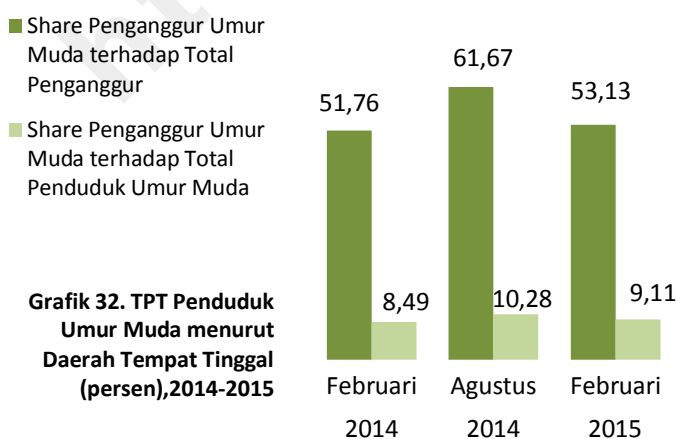
Februari 2014 maupun Februari 2015, sedangkan pada Agustus 2014 rasionya sedikit lebih tinggi pada perempuan. Sementara apabila dilihat menurut kategori kota-desa maka rasio ini cenderung lebih tinggi di daerah perdesaan dibandingkan dengan di daerah perkotaan baik pada Februari maupun Agustus 2014, serta Februari 2015.

Tabel 4. Indikator Pengangguran Umur Muda di Indonesia, 2014–2015

Indikator	2014		2015
	Februari	Agustus	Februari
(1)	(2)	(3)	(4)
Rasio TPT Umur Muda terhadap TPT Dewasa	5,13	8,13	5,58
Laki-laki	5,54	8,10	5,84
Perempuan	4,56	8,16	5,21
Perkotaan	4,45	6,77	4,95
Perdesaan	6,23	10,47	6,87

“*Share* penganggur umur muda terhadap total penganggur 53,13 persen sementara *share* penganggur terhadap total penduduk umur muda 9,11 persen”

Share penganggur umur muda terhadap total penganggur berdasarkan hasil Sakernas Februari 2015 cukup tinggi yaitu 53,13 persen. Angka ini dapat diartikan bahwa pada Februari 2015, dari 100 orang penganggur terdapat sejumlah 53 orang penganggur yang berumur antara 15 sampai 24 tahun. Seperti yang terlihat pada Grafik 32, angka ini mengalami penurunan sebesar 8,54 persen poin bila dibandingkan dengan Agustus 2014 (61,67 persen), namun naik sebesar 1,37 persen poin bila dibandingkan dengan Februari 2014 (51,76 persen). Sementara itu, *share* penganggur umur muda terhadap total penduduk umur muda pada Februari 2015 sebesar 9,11 persen, hal ini dapat diartikan bahwa



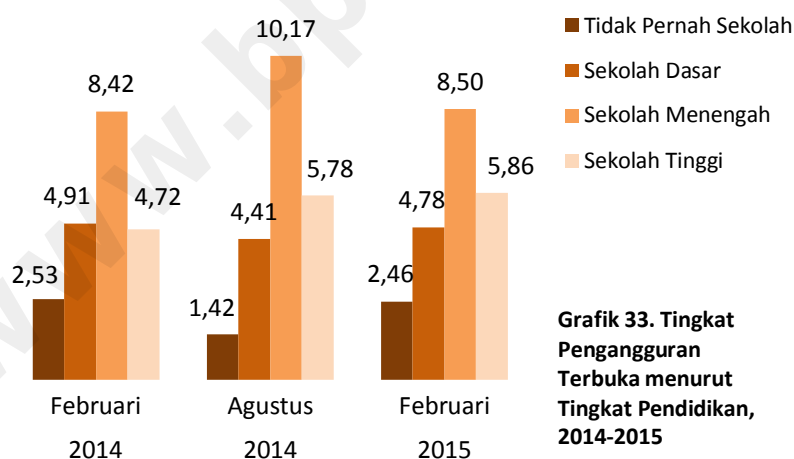
pada Februari 2015 dari 100 penduduk umur muda sebanyak 9 orang diantaranya merupakan penganggur yang berumur 15 sampai 24 tahun. Angka ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan angka Agustus 2014 (10,28 persen), namun mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan angka Februari 2014 (8,49 persen).

KILM 11. PENGANGGURAN DAN PENDIDIKAN

Indikator ini bertujuan untuk melihat hubungan antara pencapaian pendidikan penduduk yang bekerja dan pengangguran yang memberikan gambaran mengenai perubahan dalam permintaan tenaga kerja. Informasi yang diberikan dapat memiliki implikasi penting bagi penduduk yang bekerja dan kebijakan pendidikan. Jika diketahui bahwa orang dengan tingkat pendidikan yang rendah berada pada risiko yang lebih tinggi menjadi pengangguran, kebijakan yang mungkin adalah meningkatkan tingkat pendidikan mereka atau menciptakan lebih banyak pekerjaan dengan keterampilan rendah (*low skilled job*) di dalam negeri. Selain itu, apabila *share* pengangguran yang lebih tinggi di kalangan orang-orang dengan pendidikan tinggi bisa menunjukkan kurangnya pekerjaan teknis yang profesional dan tingkat tinggi.

“TPT tertinggi menurut tingkat pendidikan terdapat pada Sekolah Menengah”

Secara umum, berdasarkan hasil Sakernas Februari 2015, TPT tertinggi menurut tingkat pendidikan terdapat pada pendidikan sekolah menengah yaitu sebesar 8,50 persen, sementara yang terendah justru pada kelompok tidak pernah sekolah atau tidak pernah mengenyam bangku sekolah dengan TPT sebesar 2,46 persen.



Grafik 33. Tingkat Pengangguran Terbuka menurut Tingkat Pendidikan, 2014-2015

“Dibanding kondisi Agustus 2014 terjadi peningkatan TPT hampir pada semua jenjang pendidikan kecuali pendidikan Menengah”

Walaupun TPT nasional mengalami penurunan pada Februari 2015 dari Agustus 2014, peningkatan TPT justru terjadi pada hampir semua jenjang pendidikan. Penurunan TPT hanya terjadi pada sekolah menengah yaitu sebesar 1,67 persen poin.

Berdasarkan jenis kelamin, penurunan TPT periode Februari 2015 pada tingkat pendidikan sekolah menengah dibandingkan dengan Agustus 2014 tampak lebih nyata terjadi pada perempuan. Penurunan TPT sekolah menengah pada

perempuan sebesar 3,28 persen poin, sedangkan pada laki-laki hanya sebesar 0,91 persen poin. Begitu pula berdasarkan klasifikasi kota-desa terjadi penurunan baik di daerah perdesaan maupun perkotaan masing-masing sebesar 3,29 persen poin dan 0,95 persen poin.

Tabel 5. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Tingkat Pendidikan (persen), 2014-2015

Tingkat Pendidikan	2014		2015
	Februari	Agustus	Februari
(1)	(2)	(3)	(4)
Total	5,70	5,94	5,81
Tidak Pernah Sekolah	2,53	1,42	2,46
Laki-laki	3,07	1,74	1,89
Perempuan	2,13	1,19	2,85
Perkotaan	5,66	3,06	4,44
Perdesaan	1,65	0,97	1,54
Sekolah Dasar	4,91	4,41	4,78
Laki-laki	4,87	4,45	4,87
Perempuan	4,98	4,33	4,65
Perkotaan	6,63	5,50	6,23
Perdesaan	3,82	3,74	3,56
Sekolah Menengah	8,42	10,17	8,50
Laki-laki	7,82	8,99	8,08
Perempuan	9,66	12,65	9,37
Perkotaan	8,40	9,84	8,89
Perdesaan	8,45	10,89	7,60
Sekolah Tinggi	4,72	5,78	5,86
Laki-laki	4,41	5,26	5,01
Perempuan	5,07	6,38	6,80
Perkotaan	4,81	5,84	5,70
Perdesaan	4,45	5,59	6,43

“Dibanding kondisi Februari 2014 terjadi peningkatan TPT pada sekolah menengah dan sekolah tinggi”

Sementara itu jika dibandingkan dengan keadaan setahun sebelumnya peningkatan TPT terjadi pada tingkat pendidikan sekolah tinggi dan sekolah menengah yaitu masing-masing sebesar 1,14 persen poin dan 0,08 persen poin.

Berdasarkan jenis kelamin, peningkatan TPT periode 2015 pada tingkat pendidikan sekolah tinggi dibandingkan dengan Februari 2014 tampak lebih nyata terjadi pada perempuan yang mengalami peningkatan sebesar 1,73 persen poin, sedangkan pada laki-laki hanya sebesar 0,60 persen poin. Begitu pula berdasarkan klasifikasi kota-desa terjadi peningkatan baik di daerah perdesaan maupun perkotaan masing-masing sebesar 1,98 persen poin dan 0,89 persen poin.

“Persentase penganggur tertinggi terdapat pada tingkat sekolah dasar”

Sementara itu, mengamati komposisi penganggur berdasarkan tingkat pendidikan seperti yang terlihat pada Tabel 6, memberikan gambaran mengenai tenaga kerja yang tersedia yang tidak terserap berdasarkan tingkat keahlian atau pendidikan mereka. Pada Februari baik 2014 maupun 2015 menunjukkan bahwa persentase penganggur tertinggi pada tingkat pendidikan sekolah dasar, sementara pada Agustus 2014 menunjukkan bahwa persentase penganggur tertinggi pada tingkat pendidikan sekolah menengah.

Tabel 6. Persentase Penganggur Menurut Tingkat Pendidikan, 2014-2015

Tingkat Pendidikan	2014		2015
	Februari	Agustus	Februari
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak Pernah Sekolah	1,88	1,03	1,67
Laki-laki	1,59	0,90	0,86
Perempuan	2,31	1,24	2,89
Perkotaan	1,53	0,82	1,43
Perdesaan	2,40	1,34	2,14
Sekolah Dasar	51,47	43,98	47,94
Laki-laki	51,88	46,24	49,16
Perempuan	50,84	40,55	46,09
Perkotaan	44,75	35,48	42,84
Perdesaan	61,64	56,13	58,16
Sekolah Menengah	38,35	45,48	39,39
Laki-laki	39,74	45,21	41,77
Perempuan	36,23	45,90	35,81
Perkotaan	43,14	51,33	43,30
Perdesaan	31,09	37,13	31,57
Sekolah Tinggi	8,30	9,51	11,00
Laki-laki	6,79	7,65	8,21
Perempuan	10,62	12,31	15,21
Perkotaan	10,58	12,37	12,43
Perdesaan	4,87	5,40	8,13

Pada Februari 2015, persentase penganggur pada tingkat pendidikan sekolah dasar mencapai 47,94 persen, atau mengalami kenaikan sebesar 3,96 persen poin

jika dibandingkan Agustus 2014 (43,98 persen), dan turun sebesar 3,53 persen poin bila dibandingkan dengan Februari 2014 (51,47 persen).

Selama periode Agustus 2014- Februari 2015, penurunan persentase penganggur berdasarkan tingkat pendidikan terjadi pada tingkat pendidikan sekolah menengah dengan penurunan sebesar 6,09 persen poin. Penurunan persentase penganggur pada tingkat sekolah menengah terjadi baik menurut jenis kelamin maupun daerah tempat tinggal.

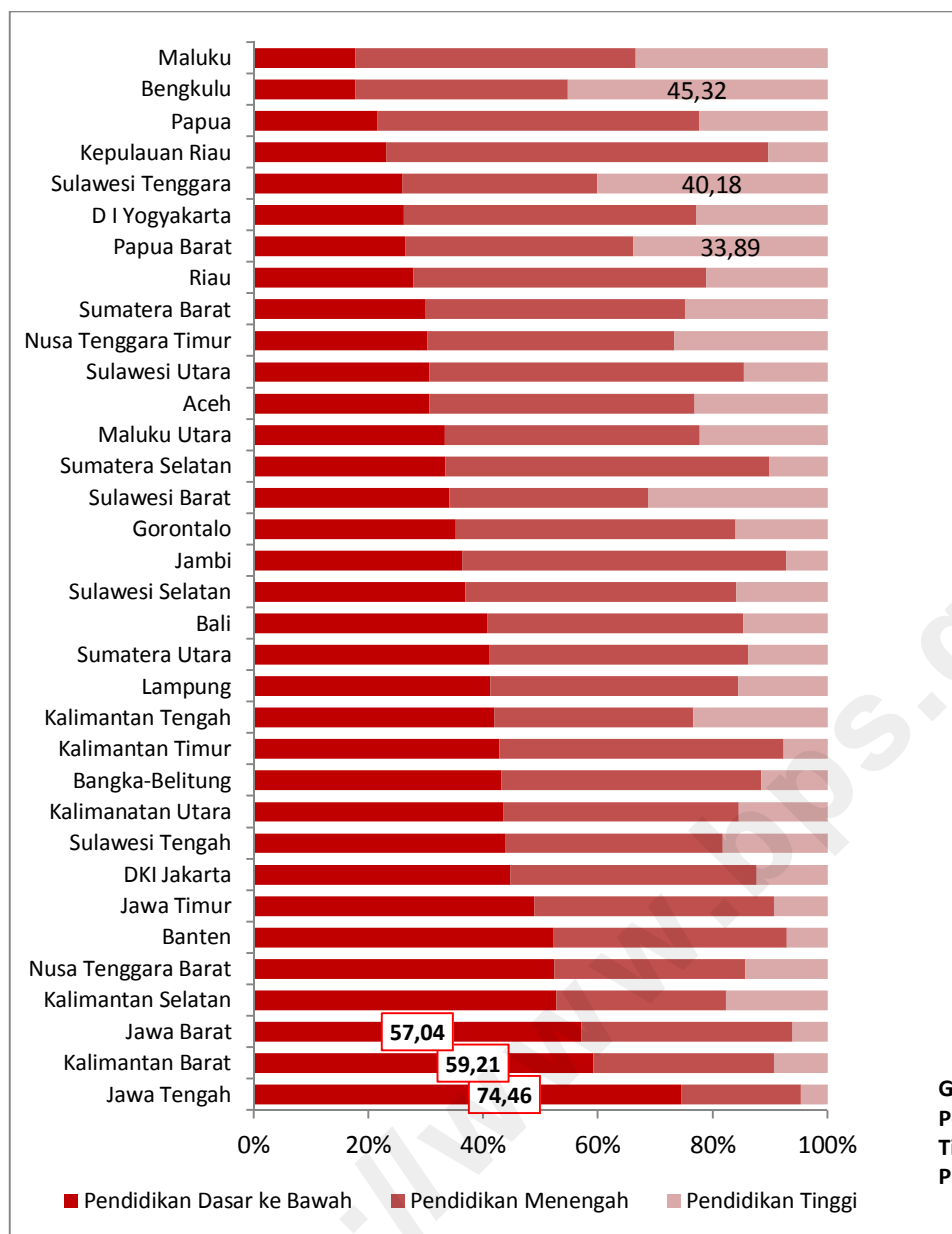
“Presentase penganggur berpendidikan sekolah tinggi pada perempuan lebih tinggi dibanding laki-laki”

Mengamati lebih lanjut Tabel 6, baik pada keadaan 2014, maupun Februari 2015 persentase perempuan yang menganggur dengan pendidikan sekolah tinggi lebih tinggi dibandingkan persentase laki-laki yang menganggur pada tingkat pendidikan yang sama. Seperti yang tampak pada Februari 2015, diantara seluruh penganggur perempuan, yang berpendidikan sekolah tinggi mencapai 15,21 persen, sementara diantara seluruh penganggur laki-laki, yang berpendidikan sekolah tinggi sebesar 8,21 persen.

Apabila dilihat berdasarkan klasifikasi perbedaan wilayah, pada 2014 dan Februari 2015, persentase penduduk perdesaan yang menganggur dengan jenjang pendidikan tidak pernah bersekolah dan sekolah dasar lebih tinggi daripada persentase penduduk perkotaan pada jenjang pendidikan yang sama. Seperti yang tampak pada Tabel 6, persentase pada Februari 2015 penduduk perdesaan yang menganggur dengan pendidikan tidak pernah sekolah dan sekolah dasar berturut-turut sebesar 2,14 persen dan 58,16 persen, sementara pada perkotaan hanya mencapai 1,43 persen dan 42,84 persen.

“Jawa Tengah, Kalimantan Barat, dan Jawa Barat adalah tiga provinsi dengan presentase pengangguran berpendidikan rendah paling tinggi”

Grafik 34 menunjukkan urutan provinsi dengan persentase pengangguran yang didominasi oleh mereka yang berpendidikan rendah pada Februari 2015, yaitu Provinsi Jawa Tengah (74,46 persen), Provinsi Kalimantan Barat (59,21 persen) dan Provinsi Jawa Barat (57,04 persen). Sedangkan tiga provinsi dengan persentase pengangguran yang didominasi oleh mereka yang berpendidikan tinggi secara berturut-turut yaitu Provinsi Bengkulu (45,32 persen), Provinsi Sulawesi Tenggara (40,18 persen) dan Provinsi Papua Barat (33,89 persen).



Grafik 34. Persentase Penganggur Menurut Tingkat Pendidikan dan Provinsi, Februari 2015

KILM 12. SETENGAH PENGANGGUR (*UNDEREMPLOYMENT*)

Penduduk yang dikategorikan sebagai setengah penganggur adalah mereka yang jam kerjanya di bawah ambang batas jam kerja normal (kurang dari 35 jam dalam seminggu), dan mereka masih mencari atau menerima pekerjaan tambahan.

“Jumlah setengah penganggur di Indonesia mencapai 10,04 juta orang, dan mengalami peningkatan dibanding Agustus 2014”

Jumlah setengah penganggur di Indonesia berdasarkan Sakernas Februari 2015, mencapai 10,04 juta orang (Tabel 7), yang terdiri dari 6,07 juta orang berjenis kelamin laki-laki dan sisanya sebanyak 3,97 juta orang adalah perempuan. Sedangkan menurut klasifikasi desa-kota, pada Februari 2015, jumlah setengah penganggur di daerah perdesaan mencapai hampir dua kali lipat dibandingkan dengan daerah perkotaan. Jumlah setengah penganggur di perdesaan mencapai 6,26 juta orang, sementara di perkotaan hanya sebanyak 3,78 juta orang.

Tabel 7. Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Termasuk Setengah Penganggur (juta), 2014–2015

Setengah Penganggur	2014		2015
	Februari	Agustus	Februari
(1)	(2)	(3)	(4)
Total	10,57	9,68	10,04
Laki-laki	6,35	6,06	6,07
Perempuan	4,22	3,62	3,97
Perkotaan	3,51	2,99	3,78
Perdesaan	7,06	6,69	6,26

Pada periode Sakernas Februari 2015 menunjukkan adanya peningkatan jumlah setengah penganggur sebanyak 360 ribu orang dibandingkan Agustus 2014. Peningkatan jumlah setengah penganggur tersebut lebih banyak pada perempuan yaitu sebanyak 350 ribu orang

“Persentase setengah penganggur terhadap total angkatan kerja maupun terhadap total penduduk bekerja cenderung menurun dibanding periode sebelumnya”

Persentase setengah penganggur terhadap total angkatan kerja pada Februari 2015 sebesar 7,83 persen yang berarti dari 100 orang penduduk yang termasuk dalam angkatan kerja, terdapat sekitar 8 orang yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu dan mereka masih mencari atau menerima pekerjaan.

Tren persentase setengah penganggur terhadap total angkatan kerja selama periode Februari 2014-Februari 2015 cenderung terus mengalami penurunan. Dari sebesar 8,43 persen pada Februari 2014 menjadi 7,94 persen pada Agustus 2014 dan terus turun menjadi 7,83 persen pada Februari 2015 (Tabel 8).

Hal yang sama juga terjadi pada persentase setengah penganggur terhadap total penduduk bekerja yang juga cenderung mengalami penurunan selama periode Februari 2014-Februari 2015. Pada Februari 2014, dari total penduduk bekerja, sekitar 8,94 persen diantaranya setengah penganggur. Kemudian pada Agustus 2014 menurun menjadi sebesar 8,45 persen dan terus menurun pada Februari 2015 menjadi sebesar 8,31 persen.

Tabel 8. Indikator Setengah Penganggur, 2014–2015

Indikator	2014		2015
	Februari	Agustus	Februari
(1)	(2)	(3)	(4)
Persentase setengah penganggur terhadap total angkatan kerja	8,43	7,94	7,83
Laki-laki	8,27	7,99	7,79
Perempuan	8,70	7,87	7,89
Perkotaan	5,68	4,99	5,33
Perdesaan	11,11	10,80	10,90
Persentase setengah penganggur terhadap total penduduk bekerja	8,94	8,45	8,31
Laki-laki	8,76	8,47	8,26
Perempuan	9,23	8,40	8,38
Perkotaan	6,10	5,37	5,74
Perdesaan	11,63	11,34	11,40

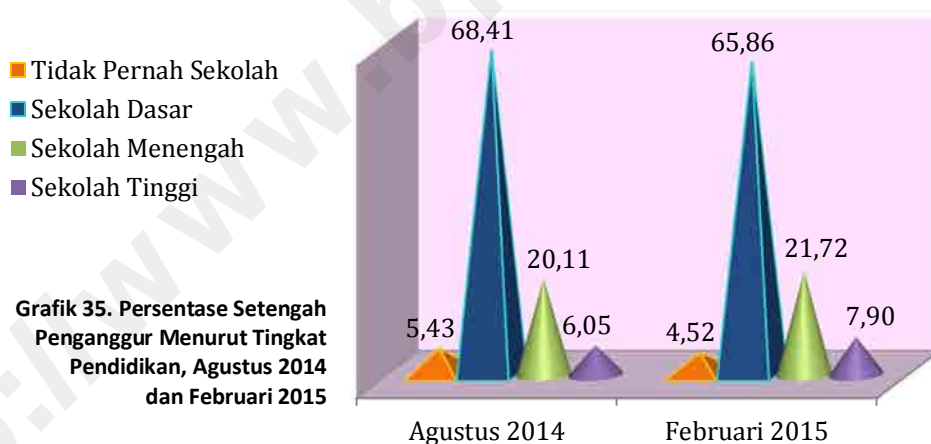
Ditinjau berdasarkan jenis kelamin selama Sakernas periode Februari 2014-Februari 2015, penurunan persentase setengah penganggur terhadap total penduduk bekerja terjadi baik pada laki-laki maupun perempuan. Akan tetapi penurunan pada perempuan jauh lebih tinggi daripada laki-laki. Persentase perempuan setengah penganggur terhadap total perempuan bekerja pada Februari 2014 sebesar 9,23 persen turun sebesar 0,85 persen poin menjadi sebesar 8,38 persen pada Februari 2015. Sedangkan persentase laki-laki setengah penganggur hanya mengalami penurunan sebesar 0,50 persen poin.

Menilik perbedaan klasifikasi wilayah, selama periode Februari 2014–Februari 2015 penurunan persentase setengah penganggur terhadap total penduduk bekerja juga terjadi di daerah perkotaan maupun perdesaan. Pada Februari 2015 bila dibandingkan dengan Februari 2014, terjadi penurunan sebesar 0,36 persen

poin di daerah perkotaan, sedangkan di daerah perdesaan hanya terjadi penurunan sebesar 0,23 persen poin.

“Persentase setengah penganggur paling tinggi pada tingkat sekolah dasar 65,86 persen”

Masih merujuk pada hasil Sakernas Februari 2015, persentase setengah penganggur paling tinggi pada tingkat pendidikan sekolah dasar yaitu sebesar 65,86 persen. Dengan kata lain dari 100 orang setengah penganggur 66 orang diantaranya berpendidikan sekolah dasar. Jika dibandingkan dengan kondisi Agustus 2014 terjadi penurunan persentase setengah penganggur pada tingkat sekolah dasar yaitu sebesar 2,55 persen poin. Penurunan pada tingkat pendidikan sekolah dasar ini diikuti dengan penurunan persentase setengah penganggur baik pada jenis kelamin laki-laki maupun perempuan yaitu masing-masing sebesar 2,36 persen poin dan 2,54 persen poin. Akan tetapi berdasarkan klasifikasi kota-deserta penurunan hanya terjadi di perdesaan sebesar 2,75 persen poin sementara di perkotaan naik sebesar 0,46 persen poin (Tabel 9).



Grafik 35. Persentase Setengah Penganggur Menurut Tingkat Pendidikan, Agustus 2014 dan Februari 2015

Tabel 9. Persentase Setengah Penganggur Menurut Tingkat Pendidikan, 2014-2015

Tingkat Pendidikan	2014		2015
	Februari	Agustus	Februari
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak Pernah Sekolah	5,52	5,43	4,52
Laki-laki	4,03	3,75	3,29
Perempuan	7,76	8,25	6,39
Perkotaan	2,93	3,21	2,94
Perdesaan	6,80	6,43	5,46
Sekolah Dasar	66,79	68,41	65,86
Laki-laki	69,29	70,44	68,08
Perempuan	63,01	65,02	62,48
Perkotaan	56,89	58,08	58,54
Perdesaan	71,71	73,03	70,28
Sekolah Menengah	20,58	20,11	21,72
Laki-laki	22,02	21,60	23,84
Perempuan	18,42	17,60	18,48
Perkotaan	28,33	27,90	27,15
Perdesaan	16,74	16,62	18,45
Sekolah Tinggi	7,11	6,05	7,90
Laki-laki	4,66	4,21	4,79
Perempuan	10,81	9,13	12,65
Perkotaan	11,85	10,81	11,37
Perdesaan	4,75	3,92	5,81

KILM 13. TINGKAT KETIDAKAKTIFAN

“Tingkat ketidakaktifan mencapai 30,50 persen”

Berdasarkan hasil Sakernas Februari 2015, tingkat ketidakaktifan di Indonesia mencapai 30,50 persen, artinya dari 100 orang penduduk usia kerja di Indonesia, yang tidak aktif dalam pasar kerja (bukan angkatan kerja) sebanyak 30 orang.

Tingkat ketidakaktifan pada Februari 2015 menurun jika dibandingkan dengan keadaan Agustus maupun Februari 2014, dengan penurunan masing-masing sebesar 2,90 persen poin dan 0,33 persen poin. Sejalan dengan dengan penurunan tingkat ketidakaktifan, jumlah penduduk umur 15 tahun ke atas yang tergolong bukan angkatan kerja juga mengalami penurunan, sebanyak 4,82 juta orang dari Agustus 2014 (61,12 juta orang) ke Februari 2015 (56,30 juta orang) (Lampiran 21).

Tabel 10. Indikator Ketidakaktifan (persen), 2014–2015

Tingkat ketidakaktifan	2014		2015
	Februari	Agustus	Februari
(1)	(2)	(3)	(4)
Total	30,83	33,40	30,50
Laki-laki	14,96	16,95	15,42
Perempuan	46,63	49,78	45,52
Perkotaan	32,82	35,53	31,98
Perdesaan	28,77	31,20	28,57

Apabila dilihat berdasarkan perbedaan jenis kelamin, terdapat kesenjangan yang cukup besar antara laki-laki dan perempuan terkait tingkat ketidakaktifan. Berdasarkan hasil Sakernas Februari 2015 untuk laki-laki, dari seratus orang penduduk usia kerja, yang tidak aktif dalam pasar kerja hanya sejumlah 15 orang, sementara untuk perempuan mencapai sejumlah 46 orang. Apabila dibandingkan dengan keadaan Agustus 2014, terjadi penurunan tingkat ketidakaktifan pada perempuan sebesar 4,26 persen poin, sedangkan pada laki-laki sebesar 1,53 persen poin.

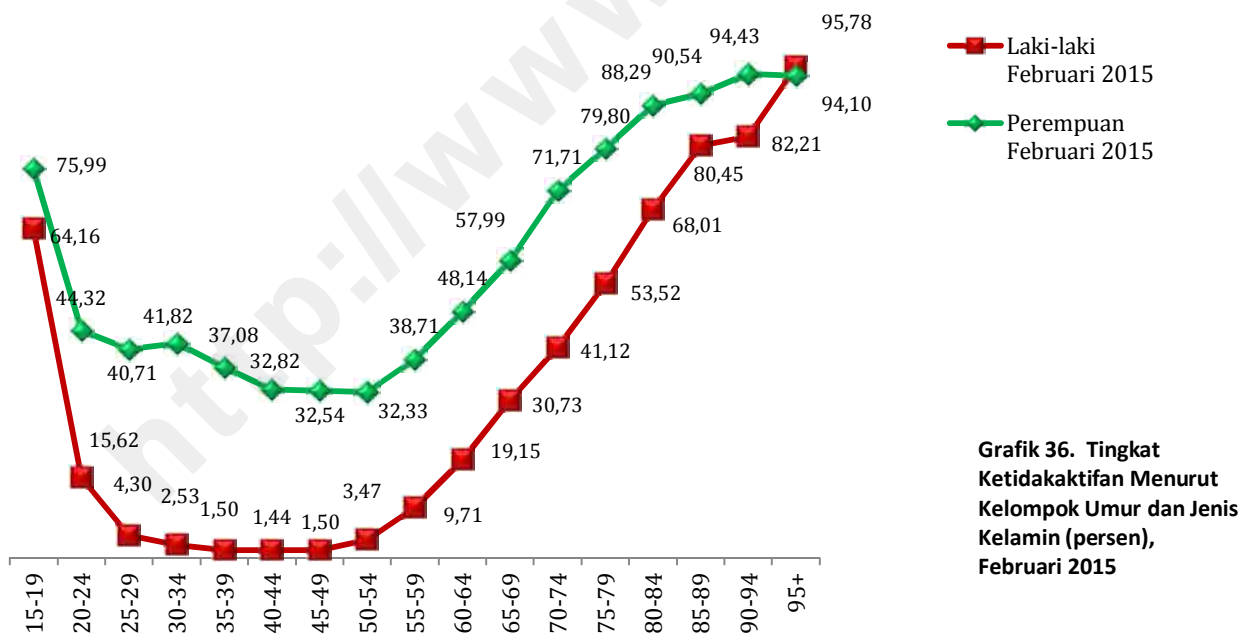
Ditinjau berdasarkan daerah tempat tinggal, tingkat ketidakaktifan ternyata lebih tinggi di daerah perkotaan dibandingkan di perdesaan. Pada Februari 2015 tingkat ketidakaktifan di perkotaan mencapai 31,98 persen, sementara di daerah

perdesaan hanya sebesar 28,57 persen. Tingkat ketidakaktifan di daerah perkotaan pada Februari 2015 mengalami penurunan sebesar 3,55 persen poin bila dibandingkan keadaan Agustus 2014. Begitupun di daerah perdesaan mengalami penurunan sebesar 2,63 persen poin, yaitu dari 31,20 persen pada Agustus 2014 menjadi 28,57 persen pada Februari 2015.

“Tingkat ketidakaktifan pada umur muda paling tinggi”

Pola tingkat ketidakaktifan seperti yang terlihat pada Grafik 36 mengindikasikan tingginya tingkat ketidakaktifan pada penduduk umur muda, lalu turun pada umur produktif dan kembali meningkat pada umur-umur tua (pola ini menyerupai bentuk huruf “J”).

Berdasarkan Grafik 36 ini kita juga dapat melihat perbedaan pola tingkat ketidakaktifan menurut kelompok umur antara laki-laki dan perempuan. Pada Februari 2015, tingkat ketidakaktifan laki-laki pada kelompok umur (15–19) tahun mencapai 64,16 persen kemudian terus mengalami penurunan hingga mencapai 1,44 persen pada kelompok umur (40–44) tahun, dan kembali meningkat pada kelompok umur (45–49) tahun.



Grafik 36. Tingkat Ketidakaktifan Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin (persen), Februari 2015

Sementara pada perempuan di kelompok umur (15–19) tahun tingkat ketidakaktifan mencapai 75,99 persen, kemudian terus mengalami penurunan hingga mencapai titik terendah di kelompok umur (50–54) tahun yaitu sebesar 32,33 persen, kembali meningkat pada kelompok umur (55–59) tahun.

BAB 4

INDIKATOR PENDIDIKAN DAN MELEK HURUF

KILM 14. PENCAPAIAN PENDIDIKAN DAN MELEK HURUF

Informasi mengenai tingkat pencapaian pendidikan saat ini adalah indikator terbaik yang tersedia untuk melihat tingkat keahlian tenaga kerja. Tingkat keahlian tenaga kerja merupakan faktor penentu kemampuan suatu negara untuk bersaing dengan sukses di pasar dunia dan membuat efisiensi penggunaan kemajuan teknologi yang cepat. KILM 14 menyajikan informasi mengenai tingkat pendidikan angkatan kerja sesuai dengan lima tingkat pendidikan yaitu kurang dari satu tahun, tingkat pradasar, tingkat dasar, tingkat menengah, dan tingkat tersier. Kategori yang digunakan dalam indikator ini secara konseptual berdasarkan tingkat *International Standard Classification of Education* (ISCED). Akan tetapi, Sakernas tidak menyediakan data mengenai kemampuan baca-tulis (melek huruf) penduduk yang bekerja, sehingga pendekatan yang digunakan untuk mengidentifikasi tingkat literasi (melek huruf) hanyalah pendidikan saja.

“Angkatan kerja didominasi oleh mereka yang berpendidikan SD yaitu sebesar 58,25 persen”

Berdasarkan hasil Sakernas Februari 2015, secara nasional tidak menunjukkan perubahan kontribusi angkatan kerja berdasarkan pendidikan yang signifikan jika dibandingkan dengan Sakernas pada Agustus 2014. Angkatan kerja pada Februari 2015 ini sebagian besar masih didominasi oleh mereka yang hanya tamat sekolah dasar yaitu sebesar 58,25 persen. Angkatan kerja yang menyelesaikan sekolah menengah sebesar 26,92 persen, sementara untuk tamatan sekolah tinggi hanya sebesar 10,90 persen. Kondisi yang kurang baik ini ditunjukkan pula dengan masih adanya angkatan kerja yang tidak pernah sekolah sekitar 3,93 persen.

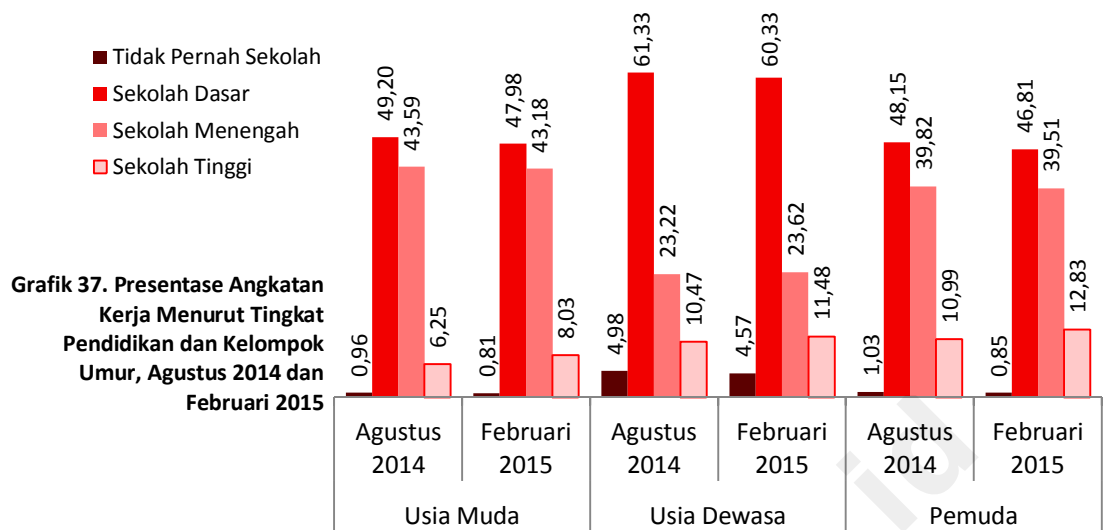
Perbedaan kualitas angkatan kerja antara laki-laki dan perempuan dilihat dari tingkat pendidikannya memang cukup menarik. Pada Februari 2015, persentase angkatan kerja perempuan yang tidak pernah sekolah lebih tinggi dari persentase angkatan kerja laki-laki (mencapai lebih dari dua kali lipat). Begitu pula untuk jenjang pendidikan sekolah tinggi persentase perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki yaitu 13,17 persen dibandingkan 9,43 persen.

Tabel 11. Persentase Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan, 2014–2015

Tingkat Pendidikan	2014		2015
	Februari	Agustus	Februari
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak Pernah Sekolah	4,23	4,32	3,93
Laki-laki	2,92	2,97	2,61
Perempuan	6,31	6,53	5,98
Perkotaan	1,88	1,91	2,26
Perdesaan	6,51	6,65	5,99
Sekolah Dasar	59,76	59,33	58,25
Laki-laki	59,87	59,73	58,19
Perempuan	59,59	58,67	58,34
Perkotaan	47,04	45,92	48,25
Perdesaan	72,13	72,29	70,58
Sekolah Menengah	25,98	26,58	26,92
Laki-laki	28,56	28,93	29,77
Perempuan	21,88	22,71	22,51
Perkotaan	35,77	37,10	34,19
Perdesaan	16,46	16,41	17,96
Sekolah Tinggi	10,03	9,77	10,90
Laki-laki	8,65	8,37	9,43
Perempuan	12,22	12,09	13,17
Perkotaan	15,31	15,07	15,30
Perdesaan	4,90	4,65	5,47

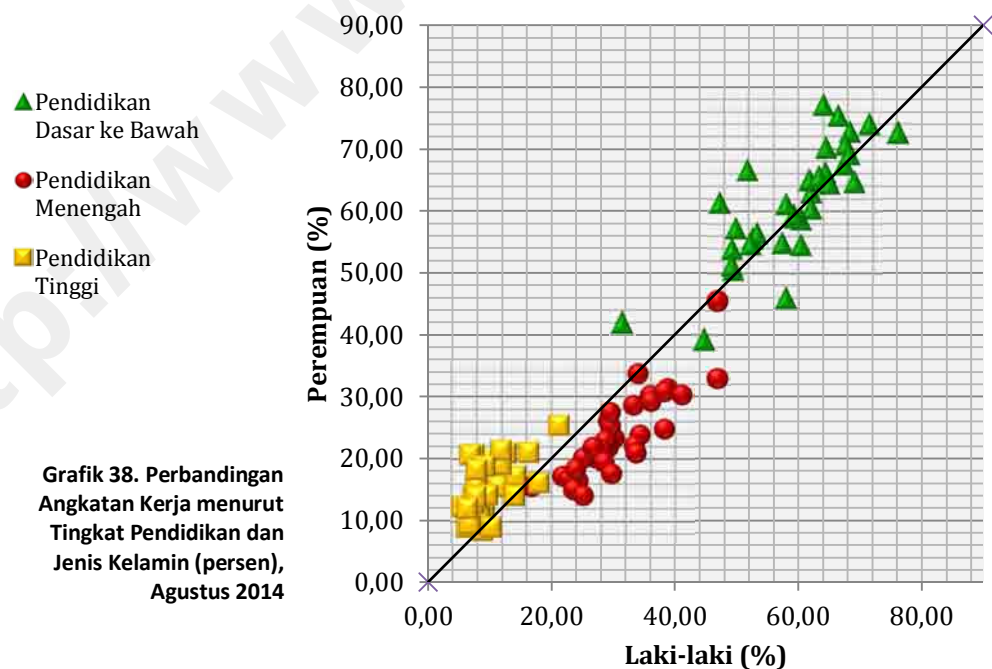
“Masih terdapat sekitar satu persen angkatan kerja usia muda dan pemuda yang tidak pernah sekolah ”

Pola yang sama juga terlihat pada kelompok umur dewasa dan pemuda dimana angkatan kerja juga didominasi oleh tamatan sekolah dasar dan disusul oleh mereka yang tamat sekolah menengah. Hal yang cukup menarik adalah bahwa pada kelompok umur muda dan pemuda, masih terdapat sekitar satu persen angkatan kerja yang tidak pernah mengenyam pendidikan di bangku sekolah, padahal program wajib belajar telah dicanangkan sejak tahun 1984.



“Angkatan kerja perempuan masih terkonsentrasi pada pendidikan rendah ”

Pada Februari 2015, persentase angkatan kerja perempuan lebih banyak terkonsentrasi pada jenjang pendidikan rendah (dasar kebawah) dan tinggi, sementara pada laki-laki justru lebih mengelompok pada jenjang pendidikan menengah.



Penjelasan Teknis

Konsep definisi ketenagakerjaan yang digunakan BPS merujuk pada rekomendasi ILO sebagaimana tercantum dalam buku *“Surveys of Economically Active Population, Employment, Unemployment and Under employment: An ILO Manual on Concepts and Methods”*, ILO 1992. Hal ini dimaksudkan, terutama agar data ketenagakerjaan yang dihasilkan dari berbagai survei di Indonesia dapat dibandingkan secara internasional, tanpa mengesampingkan kondisi ketenagakerjaan spesifik Indonesia.

Pendekatan teori ketenagakerjaan yang digunakan dalam Sakernas adalah Konsep Dasar Angkatan Kerja (*Standard Labor Force Concept*), seperti pada diagram dibawah ini:



Beberapa konsep umum yang digunakan dalam Sakernas yang juga diadopsi untuk penyusunan KILM, meliputi konsep dan definisi mengenai penduduk, umur kerja, angkatan kerja, bukan angkatan kerja, periode referensi, dan kriteria satu jam.

Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama enam bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Berdasarkan konsep dasar ketenagakerjaan, penduduk dikelompokkan menjadi penduduk umur kerja dan penduduk bukan umur kerja. Penduduk umur kerja dibedakan atas dua kelompok, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja.

Pengukurannya didasarkan pada periode rujukan (*time reference*), yaitu kegiatan yang dilakukan selama seminggu yang lalu sampai sehari sebelum pencacahan.

Umur kerja adalah batas umur yang ditetapkan untuk pengelompokan penduduk yang aktif secara ekonomi. Indonesia menggunakan batas bawah umur kerja (*economically active population*) 15 tahun (meskipun dalam survei dikumpulkan informasi mulai dari umur 10 tahun) dan tanpa batas atas umur kerja. Di negara lain, penentuan batas bawah dan batas atas umur kerja bervariasi sesuai dengan kebutuhan/situasinya. Sebagai contoh, beberapa negara yang menggunakan batas bawah adalah Mesir (6 tahun), Brazil (10 tahun), Swedia, USA (16 tahun), Kanada (14 dan 15 tahun), India (5 dan 15 tahun), Venezuela (10 dan 15 tahun). Sementara itu, negara-negara yang menggunakan batas atas adalah Denmark, Swedia, Norwegia, Finlandia (74 tahun), Mesir, Malaysia, dan Mexico (65 tahun). Banyak negara seperti Indonesia tidak menggunakan batas atas.

Angkatan kerja terdiri dari penduduk yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Sedangkan bukan angkatan kerja terdiri dari penduduk yang pada periode rujukan tidak mempunyai/melakukan aktivitas ekonomi, baik karena sekolah, mengurus rumah tangga atau lainnya (olahraga, kursus, piknik, dan kegiatan sosial (berorganisasi, kerja bakti)).

Yang dimaksud dengan bekerja adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan, paling sedikit selama satu jam dalam seminggu yang lalu. Bekerja selama satu jam tersebut harus dilakukan berturut-turut dan tidak terputus. Kegiatan bekerja ini mencakup, baik yang sedang bekerja maupun yang punya pekerjaan tetapi dalam seminggu yang lalu sementara tidak bekerja, misalnya karena cuti, sakit, dan sejenisnya. Konsep bekerja satu jam selama seminggu yang lalu juga digunakan oleh banyak negara, antara lain Pakistan, Filipina, Bulgaria, Hungaria, Polandia, Rumania, Federasi Rumania, dan lainnya. Penghasilan atau keuntungan mencakup upah/gaji/pendapatan, termasuk semua tunjangan dan bonus bagi buruh/ karyawan/pegawai dan hasil usaha berupa sewa, bunga, atau keuntungan, baik berupa uang atau barang bagi pengusaha. Kegiatan bekerja ini mencakup penduduk yang sedang bekerja maupun yang punya pekerjaan tetapi dalam seminggu yang lalu sementara tidak aktif bekerja, misal karena sakit, cuti, menunggu panen, mogok kerja, tugas belajar, dan sejenisnya.

Pengangguran meliputi penduduk yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan, atau mempersiapkan suatu usaha baru, atau merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan (putus asa), atau sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja. Yang dimaksud mencari pekerjaan adalah upaya yang dilakukan untuk memperoleh pekerjaan pada suatu periode rujukan. Mempersiapkan usaha baru adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang dalam rangka mempersiapkan suatu usaha yang 'baru', yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan/keuntungan atas risiko sendiri, baik dengan atau tanpa memperkerjakan buruh/karyawan/pegawai dibayar maupun tak dibayar. Mempersiapkan suatu usaha yang dimaksud adalah apabila 'tindakannya nyata', seperti mengumpulkan modal atau perlengkapan/alat, mencari lokasi/tempat, mengurus surat izin usaha, dan sebagainya, baik telah maupun sedang dilakukan. Merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (putus asa) adalah alasan bagi mereka yang berkali-kali mencari pekerjaan tetapi tidak berhasil mendapatkan pekerjaan, sehingga ia merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan yang diinginkan. Atau mereka yang merasa karena keadaan situasi/kondisi/iklim/musim menyebabkan tidak mungkin mendapatkan pekerjaan yang diinginkan. Sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja adalah alasan bagi mereka tidak mencari pekerjaan/ mempersiapkan usaha karena sudah diterima bekerja, tapi pada saat pencacahan belum mulai bekerja.

Periode referensi merupakan periode waktu yang ditetapkan untuk membatasi keterangan responden. Dalam survei rumah tangga atau individu, periode referensi yang pendek (*a short recent reference period*) akan meminimumkan kesalahan responden dalam mengingat (*recall*) dan juga mengurangi masalah (statistik) yang timbul oleh karena perpindahan penduduk dan perubahan status aktivitas, pekerjaan, dan karakteristik penduduk lainnya. Standar internasional untuk periode referensi yang pendek adalah satu hari atau satu minggu. Periode referensi satu minggu yang lalu paling banyak diterapkan di negara-negara yang melaksanakan survei angkatan kerja nasional, termasuk Indonesia.

Selain periode referensi seminggu yang lalu, dalam Sakernas juga dikenal kriteria satu jam. Kriteria satu jam secara berturut-turut digunakan dengan pertimbangan untuk mencakup semua jenis pekerjaan yang mungkin ada pada suatu negara, termasuk di dalamnya adalah pekerjaan dengan waktu singkat (*short-time work*), pekerja bebas, *stand-by work*, dan pekerjaan yang tak

beraturan lainnya. Kriteria satu jam juga dikaitkan dengan definisi bekerja dan penganggur yang digunakan, di mana penganggur adalah situasi dari ketiadaan pekerjaan secara total (*lack of work*), dimana apabila batas minimum dari jumlah jam kerja dinaikkan, maka akan mengubah definisi penganggur, yaitu bukan lagi ketiadaan pekerjaan secara total.

Di samping itu, juga untuk memastikan bahwa pada suatu tingkat agregasi tertentu, input tenaga kerja total berkaitan langsung dengan produksi total. Hal ini diperlukan, terutama ketika dilakukan analisis gabungan antara statistik ketenagakerjaan dan statistik produksi.

Berdasarkan argumen teknis, ILO merekomendasikan untuk memperhatikan *the one hour criterion*, yaitu digunakannya konsep/definisi satu jam dalam periode referensi tertentu untuk menentukan seseorang dikategorikan sebagai bekerja (*employed*).

BPS menggunakan konsep/definisi “bekerja paling sedikit 1 jam secara berturut-turut dalam seminggu yang lalu” untuk mengkategorikan seseorang sebagai bekerja (*currently economically active population*), tanpa melihat lapangan usaha, jabatan, maupun status pekerjaannya.

INDIKATOR PASAR TENAGA KERJA

Organisasi Perburuhan Internasional (*International Labour Organization-ILO*) meluncurkan *Key Indicator of Labour Market* (KILM) pada tahun 1999, untuk melengkapi program pengumpulan data secara rutin dan untuk meningkatkan penyebaran data pada elemen kunci dari pasar tenaga kerja dunia.

Terdapat 20 (dua puluh) indikator yang disusun oleh ILO, yang dikelompokkan ke dalam 8 (delapan) kelompok, yaitu:

1. Partisipasi di dunia kerja, yang terdiri dari KILM 1, yaitu Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja;
2. Indikator penduduk yang bekerja, terdiri dari KILM 2 (Rasio Penduduk yang Bekerja Terhadap Jumlah Penduduk), KILM 3 (Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama), KILM 4 (Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha), KILM 5 (Pekerja Paruh Waktu), KILM 6 (Penduduk yang Bekerja Menurut Jam Kerja), dan KILM 7 (Penduduk yang Bekerja di Sektor Informal);
3. Indikator pengangguran, *underemployment* (setengah penganggur), dan ketidakaktifan, yang terdiri dari KILM 8 (Pengangguran), KILM 9 (Pengangguran pada Kelompok Umur Muda), KILM 10 (Pengangguran Jangka Panjang), KILM 11 (Pengangguran dan Pendidikan), KILM 12 (Setengah Penganggur/*underemployment*), dan KILM 13 (Tingkat Ketidakaktifan);
4. Indikator pendidikan dan melek huruf, yang terdiri dari KILM 14 (Pencapaian Pendidikan dan Melek Huruf);
5. Indikator upah dan biaya tenaga kerja, yang terdiri dari KILM 15 (Indeks Upah Sektor Manufaktur), KILM 16 (Indikator Upah dan Pendapatan Berdasarkan Jabatan), dan KILM 17 (Upah per Jam);
6. Produktivitas Tenaga Kerja yang termuat dalam KILM 18 (Produktivitas Tenaga Kerja);
7. Indikator elastisitas tenaga kerja yang termuat dalam KILM 19 (Elastisitas Tenaga Kerja);
8. Indikator kemiskinan, pekerja miskin, dan distribusi pendapatan yang tertuang dalam KILM 20 (Indikator Kemiskinan, Penduduk Bekerja yang Miskin, dan Distribusi Pendapatan).

KILM 1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah ukuran proporsi penduduk umur kerja yang terlibat aktif di pasar tenaga kerja, baik dengan bekerja atau mencari pekerjaan, yang memberikan indikasi ukuran relatif dari pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk terlibat dalam produksi barang dan jasa. Rincian angkatan kerja menurut jenis kelamin dan kelompok umur memberikan profil distribusi penduduk yang aktif secara ekonomi. Secara umum, kegunaan indikator ini adalah untuk mengindikasikan besarnya penduduk umur kerja (15 tahun ke atas) yang aktif secara ekonomi di suatu negara atau wilayah, dan menunjukkan besaran relatif dan pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk produksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. TPAK diukur sebagai persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk umur kerja.

Tabel publikasi standar yang dikeluarkan ILO (*KILM 6th ed*) menyajikan estimasi tingkat partisipasi angkatan kerja menurut jenis kelamin dan kelompok umur, dengan standar sebagai berikut: 15+, 15–24, 15–64, 25–54, 25–34, 35–54, 55–64, dan 65 tahun ke atas. Penggunaan kelompok umur ini digunakan di lebih dari 190 negara selama tahun 1980 sampai 2010.

KILM 2. Rasio Penduduk yang Bekerja Terhadap Jumlah Penduduk (*Employment to Population Ratio-EPR*)

Rasio penduduk yang bekerja terhadap jumlah penduduk (*Employment to Population Ratio-EPR*) didefinisikan sebagai proporsi penduduk umur kerja suatu negara yang berstatus bekerja terhadap penduduk umur kerja. Rasio yang tinggi berarti sebagian besar penduduk suatu negara adalah bekerja, sementara rasio rendah berarti bahwa sebagian besar penduduk tidak terlibat langsung dalam kegiatan yang berhubungan dengan pasar, karena mereka menganggur atau (lebih mungkin) tidak termasuk dalam angkatan kerja, yang sering disebut sebagai Bukan Angkatan Kerja (BAK).

Rasio ini memberikan informasi tentang kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja, karena di banyak negara indikator ini menghasilkan analisis yang lebih mendalam dibandingkan dengan tingkat pengangguran. Meskipun secara keseluruhan rasio tinggi biasanya dianggap sebagai positif, indikator ini saja tidak cukup untuk menilai tingkat pekerjaan yang layak atau tingkat defisit pekerjaan yang layak. Indikator tambahan diperlukan untuk menilai isu-isu seperti upah/gaji, jam kerja, lapangan kerja sektor informal,

setengah pengangguran, dan kondisi kerja. Bahkan, nilai rasio ini bisa tinggi untuk alasan yang tidak selalu positif misalnya, pilihan pendidikan yang terbatas sehingga kaum muda mengambil pekerjaan yang tersedia daripada tinggal di sekolah untuk membangun sumber daya mereka (memilih bekerja demi melanjutkan sekolah/membiayai sekolah). Untuk alasan ini, sangat disarankan bahwa indikator ini harus ditinjau ulang secara kolektif dalam setiap evaluasi kebijakan tenaga kerja di suatu negara/wilayah.

KILM 3. Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama

Kategorisasi menurut status pekerjaan utama dapat membantu dalam memahami dinamika pasar tenaga kerja dan tingkat pembangunan suatu negara. Selama bertahun-tahun, dan dengan kemajuan pembangunan, suatu negara biasanya akan mengharapkan untuk dapat melihat pergeseran pekerjaan dari sektor pertanian ke sektor industri dan jasa, dengan peningkatan pada jumlah penduduk bekerja yang digaji (buruh/karyawan/pegawai) dan penurunan jumlah pekerja keluarga yang sebelumnya berkontribusi/bekerja di sektor pertanian.

Status pekerjaan adalah kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan di suatu unit usaha/kegiatan. Informasi mengenai status dalam pekerjaan utama yang dikumpulkan dalam Sakernas adalah:

1. Berusaha sendiri;
2. Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar;
3. Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar;
4. Buruh/karyawan/pegawai;
5. Pekerja bebas di pertanian;
6. Pekerja bebas di nonpertanian;
7. Pekerja keluarga/tak dibayar.

Dalam publikasi ini, pengelompokan status dalam pekerjaan utama adalah sebagai berikut:

- 1) Penduduk yang bekerja dengan upah/gaji adalah penduduk bekerja dengan status pekerjaan buruh/karyawan/pegawai;
- 2) Penduduk yang bekerja dengan status berusaha, terdiri dari :
 - a. Pengusaha, yaitu penduduk bekerja dengan status pekerjaan berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar;
 - b. Berusaha sendiri dan berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar;
 - c. Pekerja bebas yang terdiri dari pekerja bebas di pertanian dan nonpertanian;

3) Pekerja keluarga atau pekerja tak dibayar.

Selain itu, disajikan juga persentase pekerja rentan (*vulnerable employment*) terhadap total penduduk bekerja. Konsep pekerja rentan mengacu pada publikasi KILM-ILO, yaitu penduduk bekerja dengan status dalam pekerjaan utama adalah berusaha sendiri, pekerja bebas baik di pertanian dan nonpertanian, serta pekerja keluarga atau pekerja tak dibayar.

KILM 4. Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha

Informasi sektoral biasanya berguna untuk mengidentifikasi pergeseran yang besar dalam ketenagakerjaan dan tingkat pembangunan. Dalam buku teks pembangunan ekonomi, tenaga kerja bergeser dari pertanian dan aktivitas tenaga kerja intensif lainnya ke sektor industri dan akhirnya menuju ke sektor jasa-jasa, dalam prosesnya, penduduk yang bekerja berpindah dari desa ke kota.

Klasifikasi baku yang digunakan dalam penggolongan lapangan pekerjaan/lapangan usaha adalah Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2009. Untuk kepentingan penyajian/publikasi, digunakan kategori/sektor sebagai berikut:

- 1) Pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan;
- 2) Pertambangan dan penggalian;
- 3) Industri pengolahan;
- 4) Listrik, gas, dan air;
- 5) Bangunan;
- 6) Perdagangan besar, eceran, rumah makan, dan hotel;
- 7) Transportasi, pergudangan, dan komunikasi;
- 8) Keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah, dan jasa perusahaan;
- 9) Jasa kemasyarakatan.

Untuk kepentingan analisis, sektor dalam perekonomian dibagi menjadi 3 (tiga) sektor yaitu: **A (Agriculture)**/Sektor Pertanian, **M (Manufacture)**/Sektor Manufaktur dan **S (Services)**/Sektor Jasa-jasa, berdasarkan pada definisi sektor *International Standard Industrial Classification (ISIC) System* (Revisi 2 dan Revisi 3).

KILM 5. Pekerja Paruh Waktu

Jumlah jam kerja berdampak pada kesehatan dan kesejahteraan orang yang bekerja serta tingkat produktivitas dan biaya tenaga kerja yang harus dikeluarkan

oleh perusahaan. Mengukur tingkat dan tren di jam-jam bekerja di masyarakat, untuk berbagai kelompok penduduk bekerja dan untuk penduduk bekerja secara individu, menjadi penting ketika melakukan pemantauan kerja dan kondisi hidup maupun ketika menganalisis perkembangan ekonomi.

Indikator pekerja paruh waktu berfokus pada individu dengan jumlah jam kerja kurang dari pekerjaan penuh-waktu (*full time*), yang merupakan proporsi dari total penduduk yang bekerja. Dalam hal ini, pekerja paruh waktu yang dimaksud adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja penuh-waktu/normal, tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain.

Karena tidak ada definisi yang disepakati secara internasional untuk jumlah minimum jam dalam seminggu yang merupakan pekerjaan penuh-waktu (*full time*), biasanya digunakan batas 35 jam seminggu sebagai jam kerja normal. Beberapa negara yang menggunakan batas 35 jam adalah Republik Korea, Amerika, dan El Salvador¹⁾. Untuk kasus Indonesia, batas yang digunakan adalah kurang dari 35 jam seminggu dan mencari pekerjaan.

KILM 6. Penduduk yang Bekerja Menurut Jam Kerja

KILM ini bertujuan untuk menunjukkan jumlah orang yang dipekerjakan menurut jam bekerja (biasanya atau sebenarnya): kurang dari 25 jam kerja per minggu; antara 25 dan 34 jam; antara 35 dan 39 jam; antara 40 dan 48 jam; antara 49 dan 59 jam; dan 60 jam ke atas, sebagaimana data yang tersedia.

KILM 7. Penduduk yang Bekerja di Sektor Informal

Penduduk yang bekerja di sektor informal terkait perkiraan jumlah orang yang bekerja di sektor informal dibandingkan dengan jumlah orang bekerja. Dalam hal ukuran dan pertumbuhan, sektor informal merupakan bagian penting dari kehidupan ekonomi, sosial, dan politik di sebagian besar negara berkembang, serta beberapa negara maju. Di negara-negara dengan tingkat pertumbuhan penduduk atau urbanisasi yang tinggi, ekonomi informal cenderung tumbuh untuk menyerap sebagian besar tenaga kerja. Konferensi Internasional Statistik Tenaga Kerja (*The International Conference of Labour Statisticians-ICLS*) ke-15 mendefinisikan sektor informal sebagai unit produksi dalam usaha rumah tangga yang dimiliki oleh rumah tangga. Mereka yang bekerja di sektor informal terdiri

¹⁾ Hussmanns, R., Mehran, F., Verma, V. Surveys of economically active population, employment, unemployment and underemployment : An ILO manual in concepts and methods. Geneva, International Labour Office, 1990.

semua orang yang selama periode acuan tertentu yang bekerja pada setidaknya satu unit produksi yang memenuhi konsep sektor informal, terlepas dari status mereka dalam pekerjaan dan apakah itu pekerjaan utama atau pekerjaan sekunder. Resolusi ICLS memperbolehkan beberapa variasi konsep nasional. Akibatnya, informasi untuk indikator ini sering didasarkan pada definisi nasional dan pengukuran ekonomi informal.

Selain itu, pekerjaan informal dicirikan oleh ketiadaan kontrak, perlindungan sosial, hak untuk berbagai jaminan dan tidak tunduk pada undang-undang tenaga kerja dan pendapatan pajak, yang mungkin tidak sepenuhnya tertangkap dengan fokus hanya pada pekerjaan di sektor informal.

ICLS ke-17 mendefinisikan pekerja sektor informal sebagai "karyawan dengan hubungan kerja yang tidak tercakup dalam perundang-undangan atau dalam praktiknya, tidak tunduk pada undang-undang tenaga kerja, pajak, pendapatan, perlindungan sosial atau hak tertentu untuk jaminan kerja tertentu (pemberitahuan pemecatan sebelumnya, pembayaran yang buruk, dibayar tahunan atau izin sakit, dll)". Perlu diketahui bahwa definisi ini dibuat untuk tingkat pekerjaan dan bukan untuk perorangan karena setiap orang dapat secara bersamaan memiliki dua pekerjaan atau lebih.

Pekerjaan informal dapat diklasifikasikan lebih lanjut menjadi dua: usaha sendiri informal dan pekerjaan upahan informal yang mencakup karyawan tanpa kontrak resmi, jaminan pekerja atau perlindungan sosial yang dipekerjakan di usaha formal atau informal. Yang termasuk usaha sendiri informal adalah pengusaha pada sektor informal, berusaha sendiri pada usaha informal, pekerja keluarga tidak dibayar dan anggota koperasi produksi informal (Chen, 2006 seperti dikutip dalam Maligalig, dkk, 2008). Pembedaan ini menyarankan agar pekerja informal dibagi dalam seluruh kategori status pekerja: pengusaha, buruh, berusaha sendiri, pekerja keluarga tidak dibayar dan anggota koperasi produksi.

BPS melakukan pendekatan khusus dalam menentukan penduduk yang bekerja di sektor formal/informal, yaitu berdasarkan status dalam pekerjaan utama dan jenis pekerjaan/jabatan²⁾.

KILM 8. Pengangguran

²⁾ Lihat lampiran untuk matriks penentuan sektor formal/informal

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) atau biasanya disebut sebagai tingkat pengangguran menggambarkan proporsi angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif mencari dan bersedia untuk bekerja. Ini tidak boleh disalahartikan sebagai kesulitan ekonomi, meskipun korelasi antara tingkat pengangguran dan kemiskinan sering ada dan cenderung memiliki korelasi negatif³⁾. Definisi baku untuk penganggur adalah mereka yang tidak mempunyai pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, dan bersedia untuk bekerja.

Bersama dengan rasio penduduk bekerja terhadap jumlah penduduk (KILM 2), tingkat pengangguran menyediakan indikator situasi pasar tenaga kerja di negara-negara yang mengumpulkan informasi tentang tenaga kerja.

Secara spesifik, penganggur terbuka dalam Sakernas, terdiri atas:

- 1) Mereka yang tidak bekerja dan mencari pekerjaan;
- 2) Mereka yang tidak bekerja dan mempersiapkan usaha;
- 3) Mereka yang tidak bekerja, dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan;
- 4) Mereka yang tidak bekerja, dan tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja, tetapi belum mulai bekerja.

Tingkat pengangguran oleh banyak negara digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan. Jika bekerja diartikan sebagai situasi yang diinginkan bagi orang-orang dalam populasi yang secara ekonomi aktif (angkatan kerja), maka pengangguran menjadi situasi yang tidak diinginkan. Namun ada kalanya pengangguran jangka pendek menjadi suatu kondisi yang diinginkan dan diperlukan untuk memastikan penyesuaian (*adjustment*) terhadap fluktuasi ekonomi. Tingkat pengangguran pada kelompok tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan umur, jenis kelamin, dan pendidikan berguna dalam mengidentifikasi kelompok penduduk bekerja dan sektor-sektor yang paling rentan terhadap pengangguran.

Sementara tingkat pengangguran tenaga kerja, dapat dianggap sebagai indikator yang paling informatif yang mencerminkan indikasi pasar umum dan kinerja pasar tenaga kerja dan ekonomi secara keseluruhan, tidak harus ditafsirkan sebagai ukuran kesulitan ekonomi atau kesejahteraan. Bila didasarkan pada standar internasional yang direkomendasikan, tingkat pengangguran hanya memberikan gambaran proporsi angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan

³⁾ Tingkat pengangguran relatif rendah pada orang-orang miskin

tapi bersedia dan secara aktif mencari pekerjaan. Angka ini menggambarkan tentang sumber daya ekonomi penganggur atau anggota keluarga mereka. Penggunaannya harus dibatasi sebagai ukuran pemanfaatan tenaga kerja serta indikasi kegagalan untuk mencari pekerjaan. Tindakan-tindakan lain, termasuk indikator pendapatan yang terkait, akan diperlukan untuk mengevaluasi kesulitan ekonomi.

Tingkat pengangguran secara matematis didefinisikan sebagai hasil bagi dari jumlah pengangguran (untuk negara atau kelompok penduduk bekerja tertentu) dengan jumlah angkatan kerja. Harus ditekankan bahwa denominator/faktor pembagi yang berfungsi sebagai dasar statistik ini adalah tenaga kerja atau penduduk yang aktif secara ekonomi, **bukan** jumlah penduduk. Perbedaan ini tidak selalu dipahami oleh publik. Memang, istilah "angkatan kerja" dan "bekerja" kadang-kadang keliru digunakan secara bergantian. Misalnya, tingkat pengangguran adalah 6 persen, maka dapat dikatakan bahwa terdapat 6 persen dari penduduk yang aktif secara ekonomi (angkatan kerja) yang saat ini sedang tidak bekerja dan mencari pekerjaan atau bersedia bekerja.

KILM 9. Pengangguran pada Kelompok Umur Muda

Tingkat pengangguran penduduk umur muda memberikan gambaran kepada kita mengenai proporsi angkatan kerja pada kelompok umur muda dengan kondisi: (a) tidak memiliki pekerjaan, (b) secara aktif mencari pekerjaan, dan (c) tersedia untuk bekerja dalam pasar tenaga kerja. Penduduk umur muda yang menganggur merupakan salah satu masalah yang memerlukan penanganan kebijakan khusus yang penting bagi banyak negara, terlepas dari tahap pembangunan. Untuk tujuan indikator ini, istilah "umur muda" mencakup orang yang berumur 15 sampai 24 tahun, sedangkan "orang dewasa" didefinisikan sebagai orang yang berumur 25 tahun ke atas.

KILM 10. Pengangguran Jangka Panjang

Pengangguran jangka panjang merupakan stok tenaga kerja yang tidak dapat dimanfaatkan, merupakan bagian dari angkatan kerja, tetapi tidak memiliki pekerjaan (menganggur) dalam jangka waktu tertentu. Sayangnya, Sakernas tidak mengumpulkan informasi mengenai berapa lama seseorang menganggur. Indikator ini tidak dapat disajikan karena keterbatasan variabel yang dikumpulkan dalam Sakernas.

KILM 11. Pengangguran dan Pendidikan

Indikator ini melihat hubungan antara pencapaian pendidikan penduduk bekerja dan pengangguran yang memberikan gambaran mengenai perubahan dalam permintaan tenaga kerja. Informasi mengenai tingkat pengangguran berdasarkan pendidikan memiliki implikasi penting bagi penduduk bekerja dan kebijakan pendidikan. Jika diketahui bahwa orang dengan tingkat pendidikan yang rendah memiliki risiko yang lebih tinggi menjadi pengangguran, kebijakan yang mungkin diambil adalah meningkatkan tingkat pendidikan mereka atau menciptakan lebih banyak pekerjaan dengan keterampilan rendah (*low skilled job*) di dalam negeri. Di sisi lain, komposisi pengangguran yang lebih tinggi di kalangan orang-orang dengan pendidikan tinggi bisa menunjukkan kurangnya pekerjaan teknis yang profesional dan tingkat tinggi. Tabel yang biasanya disajikan menunjukkan distribusi persentase dari total pengangguran suatu negara sesuai dengan lima tingkat sekolah, tingkat pra-dasar, kurang dari satu tahun, tingkat dasar, tingkat menengah, dan tingkat tersier (dalam publikasi ini hanya dikategorikan dalam empat tingkat sekolah). Sebagai catatan, angka yang ditampilkan bisa berupa distribusi dan bisa berupa *rate*.

KILM12. Setengah Penganggur (*Underemployment*)

Mereka yang dikategorikan dalam setengah penganggur adalah mereka yang jumlah jam kerjanya di bawah ambang batas jam kerja normal (bekerja kurang dari 35 jam dalam seminggu yang lalu), dengan kondisi:

- 1) Mereka yang dengan sukarela mencari pekerjaan tambahan, meliputi:
 - a. Mereka yang menginginkan pekerjaan lain untuk menambah jam kerjanya dari pekerjaannya yang sekarang;
 - b. Mereka yang menginginkan mendapat ganti dari pekerjaannya yang sekarang dengan pekerjaan lain yang mempunyai jam kerja lebih banyak.
- 2) Mereka yang bersedia menerima pekerjaan tambahan.

KILM 13. Tingkat Ketidakaktifan

Tingkat ketidakaktifan adalah ukuran proporsi penduduk umur kerja suatu negara yang tidak terlibat aktif dalam pasar tenaga kerja, baik dengan bekerja atau mencari pekerjaan (bukan angkatan kerja). Tingkat ketidakaktifan ini jika dijumlahkan dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK-lihat KILM 1) maka hasilnya adalah 100 persen, dengan perkataan lain tingkat ketidakaktifan sama dengan 1 (satu) dikurang TPAK ($1 - \text{TPAK}$).

Dalam beberapa situasi, tingkat ketidakaktifan tinggi untuk kelompok populasi tertentu tidak harus selalu dilihat sebagai suatu kondisi "buruk", misalnya tingkat ketidakaktifan yang relatif tinggi untuk wanita umur 25–34 tahun mungkin karena mereka meninggalkan pasar kerja untuk mengurus keluarga dan melaksanakan tanggung jawab seperti melahirkan dan mengasuh anak. Dengan menggunakan data dalam KILM 13, pengguna dapat melihat sejauh mana ibu berkaitan dengan pola tenaga kerja perempuan. Telah lama diakui bahwa aspek-aspek struktur rumah tangga terkait dengan aktivitas pasar tenaga kerja, misalnya kepala rumah tangga perempuan cenderung memiliki tingkat ketidakaktifan yang relatif rendah. Pada pasangan yang menikah, suami biasanya memiliki tingkat ketidakaktifan yang rendah, terutama jika ada anak-anak dalam keluarga. Tingkat ketidakaktifan yang rendah pada wanita bisa berkorelasi dengan tingginya tingkat ketidakaktifan untuk laki-laki, yaitu suami, jika laki-laki sedang menyelesaikan pendidikan atau secara fisik tidak mampu bekerja, sehingga membuat istri sebagai pencari nafkah utama.

KILM 14. Pencapaian Pendidikan dan Melek Huruf

Informasi tentang tingkat pencapaian pendidikan saat ini adalah indikator terbaik yang tersedia untuk melihat tingkat keahlian tenaga kerja. Pendidikan merupakan salah satu faktor penentu penting untuk menilai kemampuan suatu negara untuk bersaing dengan sukses di pasar dunia dan membuat efisiensi penggunaan kemajuan teknologi yang cepat. Tabel KILM 14 menyajikan informasi mengenai tingkat pendidikan angkatan kerja dengan lima tingkat pendidikan, yaitu tidak pernah bersekolah, tingkat pra-dasar, tingkat dasar, tingkat menengah, dan tingkat tinggi (dalam publikasi ini hanya dikategorikan dalam empat tingkat pendidikan, yaitu tidak pernah bersekolah, tingkat dasar, tingkat menengah, dan tingkat tinggi).

Kategori yang digunakan dalam indikator ini secara konseptual berdasarkan tingkat Standar Internasional Klasifikasi Pendidikan (*International Standard Classification of Education-ISCED-97*). Pengelompokan tingkat pendidikan berdasarkan *ISCED-97* adalah sebagai berikut:

- 1) Tidak pernah bersekolah adalah mereka yang tidak/belum pernah bersekolah sama sekali;
- 2) Sekolah dasar, yaitu mereka yang memiliki pendidikan tidak/belum tamat SD, SD/Ibtidaiyah, Paket A, SMP/Tsanawiyah, SMP Kejuruan, dan Paket B;

- 3) Sekolah menengah, yaitu mereka dengan pendidikan SMA/Aliyah, SMK, dan Paket C;
- 4) Sekolah tinggi, yaitu mereka yang memiliki ijazah Diploma I/II, Diploma III, Diploma IV/Sarjana, dan S2/S3.

Disamping itu, disajikan pula pencapaian pendidikan angkatan kerja menurut kelompok umur sebagai berikut: umur muda (15–24 tahun), pemuda (16–30 tahun⁴⁾), dan "dewasa" yang didefinisikan sebagai orang yang berumur 25 tahun ke atas.

KILM 15. Indeks Upah Sektor Manufaktur

Sektor manufaktur yang dikenal sebagai sektor formal dapat memberikan gambaran mengenai tingkat kesejahteraan penduduk bekerja melalui indeks upah pada sektor ini. Tetapi, terdapat survei khusus (Survei Upah dan Survei Struktur Upah)–yang bukan merupakan bagian dari Sakernas–yang dilakukan untuk mengumpulkan data terkait dengan indikator ini. Oleh karena itu, indikator ini tidak dapat disajikan pada publikasi KILM ini.

KILM 16. Indikator Upah dan Pendapatan Berdasarkan Jabatan

Salah satu keterbatasan variabel pada Sakernas adalah hanya menanyakan upah/ pendapatan pada status pekerjaan tertentu. Akibatnya, tidak semua penduduk bekerja mempunyai informasi pendapatan/upah. Oleh karena itu, indikator ini juga tidak dapat disajikan pada publikasi ini.

KILM 17. Upah per Jam

Seperti KILM 15 dan 16 mengenai informasi upah, Sakernas tidak memiliki informasi upah per jam. Tidak adanya pertanyaan mengenai informasi upah per jam dikarenakan kebanyakan di Indonesia, orang yang bekerja tidak dibayar berdasarkan jam kerja, tetapi hari kerja. Hanya sedikit sekali lapangan pekerjaan yang membayar orang yang bekerja berdasarkan hitungan jam. Selain itu, dalam Sakernas yang ditanyakan adalah pendapatan sebulan terakhir, sementara untuk jam kerja, ditanyakan jumlah jam kerja seminggu terakhir. Estimasi upah kerja per jam akan sangat berisiko menimbulkan bias statistik. Oleh karena itu, indikator ini tidak dipublikasikan pada publikasi KILM ini.

KILM 18. Produktivitas Tenaga Kerja

Tingkat produktivitas tenaga kerja merupakan ukuran penting untuk melihat sejauh mana faktor produksi *L* (*Labour*/Tenaga Kerja) berperan dalam

⁴⁾ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan

proses produksi. Tingkat produktivitas tenaga kerja memberikan gambaran mengenai output yang dihasilkan oleh satu unit tenaga kerja. Semakin tinggi output yang dihasilkan, maka semakin produktif tenaga kerja tersebut, demikian sebaliknya. Indikator ini juga penting untuk melihat sektor mana saja yang memiliki tenaga kerja dengan produktivitas tinggi, dan sektor mana yang tidak. Identifikasi ini memberikan gambaran sektor padat karya (*labour intencive*) dan sektor padat modal (*capital intencive*). Akan tetapi karena keterbatasan variabel yang dikumpulkan pada Sakernas mengakibatkan indikator ini tidak dapat disajikan pada publikasi kali ini.

KILM 19. Elastisitas Tenaga Kerja

Tingkat elastisitas tenaga kerja memberikan gambaran mengenai banyaknya tenaga kerja yang terserap pada proses produksi untuk menghasilkan nilai tambah tertentu. Dengan kata lain, elastisitas tenaga kerja adalah banyaknya tenaga kerja terserap setiap peningkatan satu persen pertumbuhan ekonomi. Untuk melakukan analisis ini, diperlukan data nilai tambah (PDB/PDRB). Analisis ini merupakan analisis lintas sektor, sehingga tidak bisa ditampilkan dalam publikasi ini.

KILM 20. Indikator Kemiskinan, Penduduk Bekerja yang Miskin, dan Distribusi Pendapatan

Sebagaimana indikator elastisitas tenaga kerja, indikator kemiskinan, penduduk bekerja yang miskin, dan distribusi pendapatan juga memerlukan beberapa variabel tambahan yang tidak ditanyakan pada Sakernas. Selain itu, data lintas sektor juga penting untuk melengkapi analisis ini. Indikator ini tidak dapat disajikan karena keterbatasan variabel yang dikumpulkan dalam Sakernas.

Lampiran

<http://www.bps.go.id>

Lampiran 1. Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin (ribu), 2014–2015

Provinsi	Februari 2014			Agustus 2014			Februari 2015		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	1 643	1 685	3 327	1 663	1 704	3 367	1 683	1 724	3 407
Sumatera Utara	4 566	4 698	9 264	4 612	4 739	9 351	4 652	4 780	9 432
Sumatera Barat	1 740	1 806	3 546	1 757	1 820	3 577	1 773	1 836	3 610
Riau	2 155	2 033	4 188	2 190	2 067	4 257	2 222	2 098	4 320
Jambi	1 208	1 153	2 361	1 225	1 170	2 395	1 238	1 182	2 420
Sumatera Selatan	2 831	2 758	5 589	2 859	2 784	5 644	2 886	2 810	5 696
Bengkulu	663	639	1 302	671	647	1 318	678	654	1 332
Lampung	2 932	2 780	5 711	2 955	2 804	5 759	2 979	2 826	5 805
Kep. Bangka Belitung	500	458	959	508	465	973	515	471	986
Kepulauan Riau	672	643	1 315	680	652	1 332	691	662	1 353
DKI Jakarta	3 799	3 778	7 577	3 804	3 798	7 601	3 819	3 824	7 643
Jawa Barat	16 715	16 358	33 073	16 906	16 559	33 465	17 082	16 717	33 799
Jawa Tengah	12 247	12 731	24 978	12 348	12 834	25 182	12 427	12 913	25 339
DI Yogyakarta	1 383	1 446	2 830	1 393	1 455	2 848	1 404	1 466	2 870
Jawa Timur	14 329	15 048	29 377	14 435	15 143	29 579	14 515	15 224	29 739
Banten	4 198	4 045	8 243	4 258	4 103	8 362	4 313	4 155	8 468
Bali	1 533	1 534	3 066	1 546	1 546	3 093	1 559	1 559	3 118
Nusa Tenggara Barat	1 563	1 740	3 302	1 580	1 755	3 335	1 594	1 770	3 364
Nusa Tenggara Timur	1 571	1 648	3 219	1 593	1 668	3 261	1 611	1 687	3 298
Kalimantan Barat	1 670	1 611	3 281	1 689	1 629	3 318	1 706	1 646	3 352
Kalimantan Tengah	899	812	1 711	916	825	1 740	928	836	1 763
Kalimantan Selatan	1 393	1 373	2 766	1 409	1 386	2 795	1 425	1 401	2 825
Kalimantan Timur	1 474	1 305	2 779	1 499	1 326	2 825	1 286	1 146	2 432
Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	235	201	436
Sulawesi Utara	892	861	1 753	900	868	1 768	908	874	1 782
Sulawesi Tengah	1 015	974	1 989	1 026	985	2 011	1 037	995	2 032
Sulawesi Selatan	2 836	3 094	5 930	2 867	3 122	5 990	2 890	3 146	6 035
Sulawesi Tenggara	794	805	1 599	807	817	1 623	817	827	1 644
Gorontalo	390	396	786	395	400	796	400	405	805
Sulawesi Barat	419	425	844	425	431	856	430	436	867
Maluku	544	545	1 089	552	552	1 104	558	558	1 116
Maluku Utara	379	364	743	385	369	754	390	374	763
Papua Barat	306	268	574	312	272	583	316	276	593
Papua	1 118	979	2 097	1 136	994	2 129	1 150	1 007	2 157
Indonesia	90 378	90 792	181 170	91 302	91 691	182 992	92 114	92 485	184 600

Lampiran 2. Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas Menurut Kelompok Umur (juta), 2014–2015

Kelompok Umur	2014		2015
	Februari	Agustus	Februari
(1)	(2)	(3)	(4)
15 Tahun ke atas	181,17	182,99	184,60
Laki-laki	90,38	91,30	92,11
Perempuan	90,79	91,69	92,49
Perkotaan	91,96	92,93	104,17
Perdesaan	89,21	90,07	80,43
(15–64)	168,57	169,70	171,02
Laki-laki	84,75	85,32	85,98
Perempuan	83,81	84,38	85,04
Perkotaan	86,34	86,84	97,13
Perdesaan	82,23	82,86	73,89
(15–24)	43,58	43,47	43,49
Laki-laki	22,08	22,05	22,08
Perempuan	21,50	21,42	21,41
Perkotaan	22,57	22,50	24,93
Perdesaan	21,01	20,98	18,56
(25–54)	107,34	108,15	108,91
Laki-laki	53,73	54,12	54,49
Perempuan	53,60	54,03	54,41
Perkotaan	55,13	55,61	62,11
Perdesaan	52,20	52,54	46,80
(25–34)	41,39	41,24	41,22
Laki-laki	20,65	20,59	20,60
Perempuan	20,74	20,64	20,62
Perkotaan	21,76	21,69	23,95
Perdesaan	19,63	19,54	17,27
(35–54)	65,95	66,91	67,69
Laki-laki	33,09	33,53	33,89
Perempuan	32,86	33,39	33,79
Perkotaan	33,37	33,91	38,15
Perdesaan	32,57	33,00	29,53
(55–64)	17,66	18,07	18,63
Laki-laki	8,95	9,14	9,40
Perempuan	8,71	8,93	9,22
Perkotaan	8,64	8,73	10,09
Perdesaan	9,01	9,34	8,54
65 Tahun ke atas	12,60	13,29	13,58
Laki-laki	5,62	5,98	6,13
Perempuan	6,98	7,31	7,44
Perkotaan	5,62	6,09	7,04
Perdesaan	6,98	7,21	6,53

Lampiran 3. Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Termasuk Angkatan Kerja Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin (ribu), 2014–2015

Provinsi	Februari 2014			Agustus 2014			Februari 2015		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	1 363	810	2 173	1 344	779	2 123	1 363	898	2 261
Sumatera Utara	3 895	2 871	6 766	3 838	2 434	6 272	3 874	2 719	6 593
Sumatera Barat	1 487	1 015	2 503	1 410	922	2 332	1 457	1 023	2 481
Riau	1 844	957	2 801	1 822	873	2 695	1 896	1 078	2 974
Jambi	1 020	551	1 570	1 027	544	1 571	1 049	643	1 692
Sumatera Selatan	2 440	1 582	4 022	2 412	1 473	3 886	2 478	1 540	4 018
Bengkulu	569	399	968	554	346	900	584	391	975
Lampung	2 571	1 458	4 029	2 523	1 335	3 858	2 565	1 496	4 061
Kep. Bangka Belitung	433	208	641	433	204	637	440	252	692
Kepulauan Riau	593	299	892	586	292	878	600	295	895
DKI Jakarta	3 230	1 959	5 189	3 193	1 871	5 063	3 327	2 222	5 548
Jawa Barat	14 182	7 105	21 287	14 001	7 005	21 006	14 477	7 856	22 333
Jawa Tengah	10 399	7 318	17 716	10 240	7 307	17 547	10 562	7 731	18 293
DI Yogyakarta	1 075	958	2 033	1 127	896	2 023	1 178	920	2 098
Jawa Timur	12 242	8 475	20 718	12 098	8 052	20 150	12 288	8 404	20 692
Banten	3 540	1 939	5 479	3 547	1 791	5 338	3 646	2 051	5 697
Bali	1 299	1 111	2 410	1 277	1 040	2 317	1 336	1 123	2 459
Nusa Tenggara Barat	1 340	995	2 335	1 277	944	2 222	1 315	1 096	2 411
Nusa Tenggara Timur	1 302	1 081	2 383	1 274	973	2 247	1 309	1 097	2 406
Kalimantan Barat	1 422	947	2 369	1 414	907	2 320	1 430	941	2 370
Kalimantan Tengah	790	458	1 248	781	412	1 193	806	482	1 288
Kalimantan Selatan	1 233	785	2 018	1 203	738	1 941	1 240	828	2 068
Kalimantan Timur	1 279	645	1 924	1 251	561	1 811	1 088	561	1 649
Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	200	87	287
Sulawesi Utara	768	392	1 159	718	343	1 061	752	429	1 180
Sulawesi Tengah	874	554	1 428	869	474	1 343	893	533	1 427
Sulawesi Selatan	2 330	1 348	3 678	2 301	1 415	3 716	2 350	1 405	3 756
Sulawesi Tenggara	673	463	1 136	663	423	1 086	690	478	1 168
Gorontalo	323	197	521	321	179	500	329	205	534
Sulawesi Barat	356	245	601	362	247	608	376	272	648
Maluku	439	289	728	420	252	672	428	283	711
Maluku Utara	311	182	493	310	171	482	322	197	519
Papua Barat	258	150	408	254	144	398	257	151	408
Papua	977	712	1 689	975	701	1 675	1 008	701	1 710
Indonesia	76 859	48 458	125 317	75 826	46 047	121 873	77 912	50 390	128 302

Lampiran 4. Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas Menurut Kelompok Umur (juta), 2014–2015

Kelompok Umur	2014		2015
	Februari	Agustus	Februari
(1)	(2)	(3)	(4)
Umur 15 Tahun ke atas	181,17	182,99	184,60
Laki-laki	90,38	91,30	92,11
Perempuan	90,79	91,69	92,49
Perkotaan	91,96	92,93	104,17
Perdesaan	89,21	90,07	80,43
Umur Muda (15–24)	43,58	43,47	43,49
Laki-laki	22,08	22,05	22,08
Perempuan	21,50	21,42	21,41
Perkotaan	22,57	22,50	24,93
Perdesaan	21,01	20,98	18,56
Umur Dewasa (25+)	137,59	139,52	141,11
Laki-laki	68,30	69,25	70,03
Perempuan	69,29	70,27	71,08
Perkotaan	69,39	70,43	79,24
Perdesaan	68,20	69,09	61,87
Umur 15 Tahun ke atas yang Bekerja	118,17	114,63	120,85
Laki-laki	72,54	71,46	73,42
Perempuan	45,63	43,16	47,42
Perkotaan	57,47	55,64	65,88
Perdesaan	60,70	58,98	54,97
Umur Muda (15–24) yang Bekerja	18,00	15,66	17,70
Laki-laki	11,03	9,58	10,73
Perempuan	6,97	6,08	6,97
Perkotaan	8,92	7,77	9,89
Perdesaan	9,07	7,89	7,81
Umur Dewasa (25+) yang Bekerja	100,17	98,97	103,15
Laki-laki	61,51	61,88	62,70
Perempuan	38,66	37,09	40,45
Perkotaan	48,55	47,88	55,99
Perdesaan	51,62	51,09	47,16

**Lampiran 5. Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Termasuk Angkatan Kerja
Menurut Kelompok Umur (juta), 2014–2015**

Kelompok Umur	2014		2015
	Februari	Agustus	Februari
(1)	(2)	(3)	(4)
15 Tahun ke atas	125,32	121,87	128,30
Laki-laki	76,86	75,83	77,91
Perempuan	48,46	46,05	50,39
Perkotaan	61,78	59,91	70,85
Perdesaan	63,54	61,97	57,45
(15–64)	120,15	116,78	122,67
Laki-laki	73,67	72,60	74,43
Perempuan	46,48	44,18	48,24
Perkotaan	59,94	58,05	68,41
Perdesaan	60,21	58,72	54,26
(15–24)	21,70	20,13	21,66
Laki-laki	13,35	12,24	13,16
Perempuan	8,35	7,89	8,50
Perkotaan	11,04	10,25	12,45
Perdesaan	10,66	9,88	9,22
(25–54)	85,85	84,19	87,60
Laki-laki	52,59	52,60	53,15
Perempuan	33,27	31,60	34,45
Perkotaan	43,36	42,43	49,25
Perdesaan	42,49	41,76	38,35
(25–34)	31,99	31,00	32,01
Laki-laki	20,09	19,87	19,90
Perempuan	11,90	11,13	12,11
Perkotaan	16,81	16,31	18,60
Perdesaan	15,18	14,69	13,41
(35–54)	53,86	53,19	55,59
Laki-laki	32,49	32,72	33,26
Perempuan	21,37	20,46	22,34
Perkotaan	26,55	26,12	30,65
Perdesaan	27,31	27,07	24,94
(55–64)	12,60	12,46	13,41
Laki-laki	7,74	7,76	8,12
Perempuan	4,86	4,70	5,29
Perkotaan	5,54	5,37	6,72
Perdesaan	7,06	7,09	6,69
65 Tahun ke atas	5,17	5,09	5,63
Laki-laki	3,19	3,23	3,48
Perempuan	1,98	1,87	2,15
Perkotaan	1,83	1,85	2,44
Perdesaan	3,33	3,24	3,19

Lampiran 6. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Kelompok Umur (persen), 2014–2015

Kelompok Umur	2014		2015
	Februari	Agustus	Februari
(1)	(2)	(3)	(4)
Total	69,17	66,60	69,50
Laki-laki	85,04	83,05	84,58
Perempuan	53,37	50,22	54,48
Perkotaan	67,18	64,47	68,02
Perdesaan	71,23	68,80	71,43
(15–64)	71,28	68,81	71,73
Laki-laki	86,92	85,09	86,57
Perempuan	55,45	52,36	56,72
Perkotaan	69,42	66,85	70,44
Perdesaan	73,22	70,87	73,43
(15–24)	49,79	46,30	49,81
Laki-laki	60,47	55,51	59,60
Perempuan	38,83	36,82	39,71
Perkotaan	48,93	45,58	49,92
Perdesaan	50,72	47,08	49,67
(25–54)	79,99	77,85	80,44
Laki-laki	97,86	97,18	97,54
Perempuan	62,06	58,48	63,31
Perkotaan	78,65	76,30	79,30
Perdesaan	81,40	79,48	81,95
(25–34)	77,29	75,18	77,65
Laki-laki	97,32	96,49	96,57
Perempuan	57,36	53,93	58,74
Perkotaan	77,25	75,18	77,65
Perdesaan	77,35	75,19	77,65
(35–54)	81,67	79,49	82,14
Laki-laki	98,21	97,60	98,12
Perempuan	65,03	61,29	66,10
Perkotaan	79,56	77,02	80,34
Perdesaan	83,84	82,02	84,46
(55–64)	71,35	68,93	71,97
Laki-laki	86,48	84,87	86,33
Perempuan	55,82	52,61	57,34
Perkotaan	64,09	61,49	66,57
Perdesaan	78,32	75,88	78,36
65 Tahun ke atas	41,02	38,33	41,48
Laki-laki	56,71	53,99	56,73
Perempuan	28,37	25,51	28,91
Perkotaan	32,65	30,44	34,64
Perdesaan	47,75	44,99	48,85

**Lampiran 7. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin (persen),
2014–2015**

Provinsi	Februari 2014			Agustus 2014			Februari 2015		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	83,00	48,08	65,32	80,80	45,74	63,06	80,99	52,10	66,37
Sumatera Utara	85,31	61,11	73,04	83,23	51,35	67,07	83,27	56,88	69,90
Sumatera Barat	85,49	56,22	70,58	80,25	50,65	65,19	82,19	55,73	68,73
Riau	85,57	47,08	66,88	83,23	42,21	63,31	85,33	51,39	68,85
Jambi	84,40	47,75	66,51	83,85	46,46	65,59	84,76	54,39	69,92
Sumatera Selatan	86,20	57,34	71,96	84,37	52,91	68,85	85,86	54,81	70,54
Bengkulu	85,89	62,44	74,38	82,59	53,46	68,29	86,13	59,86	73,24
Lampung	87,70	52,45	70,55	85,37	47,62	66,99	86,10	52,93	69,95
Kep. Bangka Belitung	86,48	45,40	66,84	85,09	43,97	65,45	85,55	53,42	70,20
Kepulauan Riau	88,20	46,55	67,83	86,18	44,83	65,95	86,82	44,60	66,16
DKI Jakarta	85,04	51,85	68,49	83,94	49,26	66,61	87,10	58,11	72,60
Jawa Barat	84,84	43,44	64,36	82,82	42,30	62,77	84,75	47,00	66,08
Jawa Tengah	84,91	57,48	70,93	82,93	56,93	69,68	84,99	59,87	72,19
DI Yogyakarta	77,70	66,24	71,84	80,93	61,60	71,05	83,95	62,72	73,10
Jawa Timur	85,44	56,32	70,52	83,81	53,17	68,12	84,66	55,20	69,58
Banten	84,33	47,94	66,47	83,30	43,65	63,84	84,54	49,36	67,28
Bali	84,78	72,43	78,61	82,55	67,26	74,91	85,67	72,05	78,86
Nusa Tenggara Barat	85,76	57,19	70,71	80,87	53,81	66,63	82,50	61,91	71,66
Nusa Tenggara Timur	82,88	65,60	74,04	80,00	58,33	68,91	81,24	65,04	72,95
Kalimantan Barat	85,15	58,79	72,21	83,71	55,65	69,93	83,80	57,17	70,73
Kalimantan Tengah	87,82	56,42	72,93	85,30	49,97	68,56	86,87	57,71	73,05
Kalimantan Selatan	88,51	57,16	72,95	85,41	53,25	69,46	87,04	59,15	73,21
Kalimantan Timur	86,77	49,43	69,23	83,42	42,26	64,10	84,63	48,93	67,81
Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	85,05	43,10	65,70
Sulawesi Utara	86,04	45,50	66,14	79,76	39,47	59,99	82,81	49,04	66,24
Sulawesi Tengah	86,08	56,91	71,79	84,66	48,11	66,76	86,14	53,60	70,21
Sulawesi Selatan	82,15	43,56	62,02	80,23	45,33	62,04	81,34	44,68	62,23
Sulawesi Tenggara	84,77	57,54	71,05	82,16	51,76	66,87	84,43	57,82	71,04
Gorontalo	82,82	49,89	66,25	81,25	44,66	62,84	82,36	50,58	66,37
Sulawesi Barat	85,02	57,56	71,18	85,15	57,18	71,06	87,38	62,28	74,74
Maluku	80,72	52,99	66,84	76,19	45,66	60,92	76,66	50,77	63,71
Maluku Utara	82,11	50,09	66,43	80,63	46,42	63,88	82,69	52,68	67,99
Papua Barat	84,19	56,01	71,05	81,47	53,18	68,30	81,14	54,70	68,81
Papua	87,41	72,69	80,54	85,83	70,49	78,67	87,67	69,66	79,26
Indonesia	85,04	53,37	69,17	83,05	50,22	66,60	84,58	54,48	69,50

Lampiran 8. Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin (ribu), 2014–2015

Provinsi	Februari 2014			Agustus 2014			Februari 2015		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	1 274	752	2 027	1 240	692	1 932	1 264	823	2 087
Sumatera Utara	3 703	2 661	6 364	3 631	2 251	5 881	3 660	2 512	6 171
Sumatera Barat	1 401	944	2 344	1 323	857	2 180	1 386	946	2 332
Riau	1 764	897	2 661	1 720	798	2 518	1 773	1 002	2 774
Jambi	998	533	1 531	984	507	1 491	1 020	626	1 646
Sumatera Selatan	2 337	1 530	3 868	2 278	1 415	3 693	2 341	1 474	3 816
Bengkulu	560	392	952	538	331	869	571	372	944
Lampung	2 455	1 370	3 824	2 420	1 254	3 673	2 496	1 425	3 921
Kep. Bangka Belitung	420	203	624	413	191	604	424	245	669
Kepulauan Riau	570	275	845	553	266	820	552	262	814
DKI Jakarta	2 919	1 760	4 679	2 941	1 694	4 634	3 068	2 016	5 085
Jawa Barat	12 975	6 468	19 444	12 871	6 360	19 231	13 278	7 179	20 457
Jawa Tengah	9 810	6 941	16 751	9 672	6 879	16 551	10 023	7 299	17 322
DI Yogyakarta	1 046	943	1 989	1 083	873	1 956	1 117	896	2 013
Jawa Timur	11 756	8 130	19 885	11 577	7 729	19 307	11 734	8 066	19 800
Banten	3 188	1 750	4 938	3 227	1 627	4 854	3 313	1 895	5 208
Bali	1 277	1 100	2 377	1 249	1 024	2 273	1 317	1 108	2 425
Nusa Tenggara Barat	1 266	945	2 211	1 195	899	2 094	1 244	1 047	2 291
Nusa Tenggara Timur	1 273	1 063	2 336	1 233	941	2 174	1 275	1 055	2 331
Kalimantan Barat	1 386	923	2 309	1 356	870	2 227	1 349	908	2 257
Kalimantan Tengah	771	443	1 214	756	399	1 154	779	468	1 248
Kalimantan Selatan	1 184	753	1 936	1 156	712	1 867	1 178	791	1 968
Kalimantan Timur	1 176	577	1 753	1 167	511	1 677	1 015	516	1 531
Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	192	78	270
Sulawesi Utara	730	345	1 075	675	306	981	703	374	1 078
Sulawesi Tengah	848	538	1 386	842	452	1 293	865	519	1 384
Sulawesi Selatan	2 215	1 249	3 465	2 202	1 325	3 527	2 201	1 337	3 538
Sulawesi Tenggara	660	452	1 112	636	402	1 037	668	457	1 126
Gorontalo	317	191	508	309	170	479	320	197	518
Sulawesi Barat	352	240	591	358	238	596	370	266	636
Maluku	418	262	680	382	220	602	408	255	663
Maluku Utara	299	167	465	297	159	456	306	184	490
Papua Barat	249	143	393	242	136	378	244	145	389
Papua	943	687	1 630	940	678	1 617	969	677	1 646
Indonesia	72 540	45 630	118 170	71 463	43 165	114 628	73 425	47 422	120 847

**Lampiran 9. Rasio Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Terhadap Jumlah Penduduk (EPR)
Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2014–2015**

Provinsi	Februari 2014			Agustus 2014			Februari 2015		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	77,58	44,66	60,91	74,52	40,64	57,38	75,11	47,71	61,25
Sumatera Utara	81,09	56,65	68,69	78,73	47,49	62,90	78,68	52,54	65,43
Sumatera Barat	80,50	52,26	66,12	75,29	47,10	60,95	78,14	51,55	64,61
Riau	81,86	44,13	63,55	78,56	38,62	59,16	79,77	47,75	64,22
Jambi	82,65	46,19	64,84	80,32	43,34	62,25	82,36	52,99	68,01
Sumatera Selatan	82,56	55,48	69,20	79,67	50,81	65,43	81,13	52,46	66,99
Bengkulu	84,49	61,43	73,17	80,21	51,10	65,92	84,29	56,98	70,89
Lampung	83,72	49,28	66,96	81,87	44,71	63,78	83,78	50,43	67,55
Kep. Bangka Belitung	84,02	44,34	65,05	81,22	41,17	62,09	82,35	52,00	67,85
Kepulauan Riau	84,78	42,83	64,26	81,36	40,85	61,53	79,90	39,59	60,18
DKI Jakarta	76,85	46,57	61,75	77,31	44,60	60,97	80,33	52,73	66,53
Jawa Barat	77,63	39,54	58,79	76,13	38,41	57,47	77,73	42,94	60,52
Jawa Tengah	80,10	54,52	67,06	78,32	53,60	65,72	80,66	56,52	68,36
DI Yogyakarta	75,62	65,18	70,28	77,79	59,97	68,69	79,56	61,09	70,13
Jawa Timur	82,04	54,03	67,69	80,20	51,04	65,27	80,84	52,99	66,58
Banten	75,94	43,26	59,91	75,78	39,66	58,05	76,83	45,60	61,51
Bali	83,31	71,75	77,53	80,74	66,22	73,48	84,46	71,10	77,78
Nusa Tenggara Barat	81,02	54,33	66,96	75,68	51,20	62,80	78,02	59,15	68,09
Nusa Tenggara Timur	81,03	64,52	72,58	77,42	56,40	66,67	79,19	62,55	70,67
Kalimantan Barat	82,97	57,33	70,38	80,33	53,40	67,10	79,11	55,16	67,35
Kalimantan Tengah	85,67	54,64	70,95	82,53	48,36	66,34	84,00	56,05	70,75
Kalimantan Selatan	84,96	54,84	70,01	82,05	51,35	66,82	82,66	56,47	69,68
Kalimantan Timur	79,80	44,20	63,08	77,82	38,51	59,37	78,94	45,00	62,95
Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	81,61	38,87	61,90
Sulawesi Utara	81,80	40,11	61,33	74,95	35,25	55,47	77,50	42,81	60,48
Sulawesi Tengah	83,55	55,26	69,70	82,01	45,86	64,31	83,47	52,11	68,11
Sulawesi Selatan	78,11	40,38	58,43	76,81	42,42	58,88	76,17	42,49	58,61
Sulawesi Tenggara	83,12	56,16	69,54	78,78	49,21	63,91	81,79	55,31	68,47
Gorontalo	81,32	48,16	64,63	78,09	42,55	60,21	80,14	48,74	64,34
Sulawesi Barat	83,98	56,32	70,04	84,16	55,22	69,58	85,93	61,03	73,39
Maluku	76,84	48,07	62,44	69,17	39,87	54,52	73,09	45,77	59,43
Maluku Utara	78,82	45,85	62,67	77,09	43,20	60,50	78,54	49,29	64,21
Papua Barat	81,36	53,61	68,42	77,63	50,23	64,87	77,14	52,48	65,64
Papua	84,36	70,16	77,73	82,77	68,17	75,96	84,28	67,21	76,31
Indonesia	80,26	50,26	65,23	78,27	47,08	62,64	79,71	51,28	65,46

Lampiran 10 Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Provinsi dan Status Pekerjaan Utama, 2014–2015

Provinsi	Penduduk Bekerja dengan Upah/Gaji			Pengusaha			Berusaha Sendiri + Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap/Tak Dibayar		
	Februari 2014	Agustus 2014	Februari 2015	Februari 2014	Agustus 2014	Februari 2015	Februari 2014	Agustus 2014	Februari 2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	32,51	35,35	39,42	3,91	4,50	5,19	37,27	37,60	33,47
Sumatera Utara	30,51	38,95	37,43	3,26	3,55	2,67	36,73	34,01	34,12
Sumatera Barat	30,60	31,11	31,79	5,20	4,38	5,13	40,12	41,64	36,97
Riau	41,84	40,87	44,15	5,20	4,69	4,19	32,61	33,95	30,13
Jambi	35,38	33,29	40,26	4,91	4,15	4,24	37,86	39,11	34,07
Sumatera Selatan	33,59	34,61	33,98	2,34	2,85	2,54	36,37	37,13	37,10
Bengkulu	26,21	30,91	28,15	3,11	3,30	3,12	39,78	39,61	38,52
Lampung	25,18	26,22	26,68	3,54	3,11	3,16	38,29	39,36	38,77
Kep. Bangka Belitung	40,94	43,21	43,60	7,44	5,75	6,03	35,46	31,63	35,33
Kepulauan Riau	60,46	63,87	68,48	2,23	5,25	2,69	28,31	23,62	20,87
DKI Jakarta	67,85	67,77	68,03	3,80	4,72	4,67	20,41	20,70	19,10
Jawa Barat	43,86	42,45	44,70	3,30	3,54	3,22	29,20	31,73	30,05
Jawa Tengah	34,25	31,72	35,13	3,69	3,86	3,29	34,29	36,53	34,87
DI Yogyakarta	41,81	43,22	41,94	4,10	3,90	3,92	32,11	30,51	30,06
Jawa Timur	30,74	30,99	32,66	3,54	3,93	4,03	34,20	35,61	33,60
Banten	56,45	57,26	58,95	4,42	3,18	4,41	24,57	23,53	24,49
Bali	38,27	43,35	43,64	3,64	4,33	3,69	33,31	30,07	32,38
Nusa Tenggara Barat	22,10	23,39	20,56	2,59	2,49	2,58	39,46	40,59	43,52
Nusa Tenggara Timur	17,33	19,59	20,42	1,33	1,50	1,88	41,75	46,92	40,15
Kalimantan Barat	30,93	31,26	33,38	3,50	3,32	2,74	37,89	35,37	37,62
Kalimantan Tengah	38,66	37,13	38,83	2,22	3,51	3,84	37,47	38,61	34,65
Kalimantan Selatan	33,55	34,04	32,25	3,02	2,93	2,68	41,66	39,61	39,74
Kalimantan Timur	54,32	52,14	58,94	3,14	3,79	2,05	27,56	29,95	27,11
Kalimantan Utara	-	-	51,37	-	-	3,43			31,84
Sulawesi Utara	35,52	38,78	34,22	4,01	3,43	4,42	36,92	36,19	38,80
Sulawesi Tengah	29,59	28,98	26,73	3,35	4,29	4,07	38,27	40,20	39,70
Sulawesi Selatan	32,61	32,67	33,07	4,37	3,78	3,49	41,23	39,22	40,92
Sulawesi Tenggara	28,11	28,36	30,13	3,86	3,78	3,90	40,83	39,84	40,21
Gorontalo	34,55	30,01	30,36	2,99	3,41	3,73	40,85	40,61	40,60
Sulawesi Barat	27,75	24,81	22,11	2,66	2,01	2,32	39,06	40,99	45,00
Maluku	29,08	32,45	33,14	1,87	1,15	1,45	44,97	44,63	46,12
Maluku Utara	32,02	26,95	28,66	1,95	3,36	3,03	43,55	43,37	42,44
Papua Barat	36,61	35,65	37,99	1,63	2,76	1,63	34,95	37,07	35,08
Papua	16,69	16,50	21,57	1,28	0,82	1,00	41,74	41,93	42,13
Indonesia	36,68	36,97	38,58	3,51	3,65	3,48	33,90	34,69	33,47

Lampiran 10 Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Provinsi dan Status Pekerjaan Utama, 2014–2015 (lanjutan)

Provinsi	Pekerja Bebas			Pekerja Keluarga			Pekerja Rentan ^{*)}		
	Februari	Agustus	Februari	Februari	Agustus	Februari	Februari	Agustus	Februari
	2014	2014	2015	2014	2014	2015	2014	2014	2015
(1)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Aceh	7,29	6,89	7,50	19,03	15,67	14,43	63,59	60,15	55,39
Sumatera Utara	6,50	6,01	8,65	23,00	17,47	17,12	66,23	57,50	59,90
Sumatera Barat	8,94	9,93	10,42	15,14	12,94	15,69	64,20	64,51	63,08
Riau	5,72	7,53	8,47	14,62	12,95	13,06	52,96	54,44	51,67
Jambi	5,11	6,66	6,02	16,75	16,80	15,41	59,72	62,56	55,50
Sumatera Selatan	5,45	4,48	6,07	22,26	20,93	20,30	64,08	62,54	63,47
Bengkulu	6,48	6,37	7,95	24,42	19,80	22,27	70,67	65,79	68,73
Lampung	11,19	11,87	12,25	21,79	19,45	19,14	71,28	70,67	70,16
Kep. Bangka Belitung	4,30	6,92	3,71	11,85	12,49	11,33	51,61	51,04	50,37
Kepulauan Riau	3,56	2,82	3,60	5,44	4,43	4,36	37,31	30,88	28,83
DKI Jakarta	2,91	2,25	2,60	5,02	4,56	5,60	28,35	27,51	27,30
Jawa Barat	14,78	14,18	13,18	8,87	8,10	8,84	52,85	54,01	52,08
Jawa Tengah	13,69	13,18	13,01	14,09	14,71	13,69	62,06	64,42	61,58
DI Yogyakarta	5,13	7,62	9,46	16,85	14,75	14,61	54,09	52,88	54,13
Jawa Timur	12,71	13,03	13,09	18,80	16,45	16,63	65,71	65,08	63,32
Banten	6,38	9,92	6,15	8,17	6,12	6,01	39,13	39,57	36,64
Bali	8,67	8,94	6,45	16,10	13,31	13,85	58,09	52,32	52,67
Nusa Tenggara Barat	12,91	17,33	14,79	22,94	16,20	18,55	75,31	74,13	76,86
Nusa Tenggara Timur	5,17	3,06	3,79	34,42	28,94	33,76	81,35	78,91	77,70
Kalimantan Barat	4,46	4,97	6,43	23,21	25,09	19,83	65,56	65,42	63,88
Kalimantan Tengah	3,86	3,48	4,33	17,80	17,27	18,34	59,13	59,36	57,32
Kalimantan Selatan	5,27	6,32	4,97	16,50	17,11	20,36	63,43	63,04	65,08
Kalimantan Timur	2,71	3,99	2,90	12,28	10,12	9,00	42,54	44,07	39,01
Kalimantan Utara	-	-	6,58	-	-	6,79	-	-	45,21
Sulawesi Utara	12,18	13,51	11,55	11,37	8,10	11,02	60,47	57,79	61,36
Sulawesi Tengah	7,90	7,38	9,44	20,88	19,14	20,06	67,05	66,72	69,20
Sulawesi Selatan	3,84	5,55	4,62	17,96	18,78	17,90	63,02	63,55	63,44
Sulawesi Tenggara	3,00	5,42	3,33	24,19	22,59	22,44	68,02	67,86	65,97
Gorontalo	9,68	12,26	9,18	11,92	13,71	16,12	62,46	66,58	65,90
Sulawesi Barat	5,77	6,59	7,15	24,76	25,59	23,42	69,59	73,18	75,58
Maluku	1,73	3,08	3,85	22,35	18,69	15,44	69,05	66,40	65,41
Maluku Utara	5,10	5,37	6,13	17,39	20,95	19,73	66,03	69,69	68,30
Papua Barat	2,17	3,49	4,73	24,64	21,03	20,57	61,77	61,59	60,38
Papua	2,33	1,60	1,17	37,96	39,15	34,12	82,03	82,67	77,43
Indonesia	9,72	10,03	9,83	16,19	14,66	14,64	59,81	59,38	57,94

Keterangan: ^{*)} Pekerja rentan mencakup berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/tak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga

Lampiran 11 Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Provinsi dan Lapangan Pekerjaan Utama, 2014–2015

Provinsi	Februari 2014			Agustus 2014			Februari 2015		
	Pertanian	Manufaktur	Jasa-jasa	Pertanian	Manufaktur	Jasa-jasa	Pertanian	Manufaktur	Jasa-jasa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	47,15	13,39	39,46	44,09	12,27	43,64	41,20	14,55	44,25
Sumatera Utara	48,05	11,23	40,72	42,52	15,09	42,38	40,24	15,63	44,13
Sumatera Barat	41,68	14,24	44,08	37,55	14,32	48,13	39,00	14,92	46,08
Riau	42,41	13,08	44,50	44,28	13,87	41,85	46,09	11,18	42,72
Jambi	49,35	8,09	42,56	49,38	10,23	40,40	49,88	13,60	36,53
Sumatera Selatan	52,26	11,93	35,80	53,37	10,77	35,87	49,83	13,24	36,93
Bengkulu	58,30	7,71	33,99	50,62	9,39	39,99	46,48	12,26	41,26
Lampung	48,51	12,98	38,51	48,87	13,47	37,66	47,12	15,81	37,07
Kep. Bangka Belitung	28,54	30,73	40,73	31,41	28,74	39,85	28,64	24,24	47,12
Kepulauan Riau	13,96	31,38	54,65	10,21	33,87	55,92	14,56	32,03	53,42
DKI Jakarta	2,17	19,48	78,35	0,58	19,82	79,59	0,77	19,66	79,58
Jawa Barat	19,80	29,68	50,52	19,87	29,07	51,06	20,37	29,04	50,59
Jawa Tengah	30,99	28,58	40,44	31,26	27,54	41,20	31,11	27,94	40,96
DI Yogyakarta	25,42	20,04	54,54	25,41	22,32	52,27	25,10	26,50	48,40
Jawa Timur	36,86	21,48	41,65	37,61	21,83	40,56	36,42	22,15	41,42
Banten	14,42	28,31	57,27	12,46	33,83	53,71	13,35	31,80	54,85
Bali	24,82	24,66	50,52	23,26	23,75	53,00	23,48	24,23	52,29
Nusa Tenggara Barat	45,48	13,07	41,46	43,13	15,86	41,01	44,56	16,33	39,11
Nusa Tenggara Timur	65,04	9,81	25,15	60,77	12,40	26,83	63,30	7,53	29,17
Kalimantan Barat	57,19	12,28	30,54	57,76	13,04	29,21	51,30	12,60	36,10
Kalimantan Tengah	51,59	13,99	34,42	53,11	13,06	33,83	42,76	19,36	37,88
Kalimantan Selatan	36,84	22,70	40,46	39,81	15,91	44,28	39,55	15,66	44,79
Kalimantan Timur	24,27	21,38	54,36	27,84	22,78	49,38	20,49	19,05	60,46
Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	38,74	15,50	45,76
Sulawesi Utara	31,87	17,63	50,50	32,73	17,82	49,46	34,48	12,65	52,87
Sulawesi Tengah	46,35	14,12	39,52	47,68	11,90	40,42	50,68	10,97	38,35
Sulawesi Selatan	40,65	12,53	46,82	41,81	12,48	45,71	40,97	13,61	45,42
Sulawesi Tenggara	41,90	13,56	44,54	42,62	13,83	43,55	39,23	14,28	46,49
Gorontalo	33,34	15,53	51,13	39,24	17,01	43,75	33,79	14,54	51,66
Sulawesi Barat	59,95	9,92	30,13	56,84	10,69	32,47	56,18	12,60	31,22
Maluku	50,55	10,44	39,01	48,09	8,79	43,12	40,86	10,51	48,64
Maluku Utara	47,83	11,99	40,18	52,51	9,48	38,02	49,99	9,92	40,09
Papua Barat	48,83	12,04	39,13	45,28	12,37	42,35	43,27	12,59	44,14
Papua	73,43	3,84	22,72	70,59	4,59	24,82	68,76	6,19	25,05
Indonesia	34,56	20,76	44,68	34,00	21,16	44,84	33,20	21,37	45,42

**Lampiran 12 Indikator Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Termasuk Pekerja Paruh Waktu
Menurut Provinsi, 2014–2015**

Provinsi	Pekerja Paruh Waktu (ribu)			Tingkat Pekerja Paruh Waktu (persen)			Share Perempuan pada Pekerja Paruh Waktu (persen)		
	Februari 2014	Agustus 2014	Februari 2015	Februari 2014	Agustus 2014	Februari 2015	Februari 2014	Agustus 2014	Februari 2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	587	570	532	28,95	29,49	25,51	53,26	51,54	61,65
Sumatera Utara	1 503	1 371	1 417	23,62	23,30	22,96	58,28	56,22	57,70
Sumatera Barat	570	548	554	24,33	25,15	23,75	58,67	54,29	57,38
Riau	714	695	756	26,83	27,61	27,24	49,12	44,44	48,79
Jambi	526	535	522	34,37	35,87	31,71	45,20	44,12	49,82
Sumatera Selatan	1 092	1 166	927	28,24	31,59	24,29	54,47	49,33	52,85
Bengkulu	251	225	216	26,37	25,95	22,92	57,28	53,63	55,62
Lampung	1 114	1 098	1 090	29,13	29,91	27,80	51,26	50,07	50,95
Kep. Bangka Belitung	136	127	119	21,82	21,04	17,77	57,29	50,66	54,99
Kepulauan Riau	111	86	105	13,14	10,51	12,85	51,33	50,86	43,17
DKI Jakarta	451	345	553	9,64	7,44	10,88	58,36	61,12	56,00
Jawa Barat	3 037	3 245	2 870	15,62	16,88	14,03	58,60	54,16	56,97
Jawa Tengah	3 571	3 713	3 732	21,32	22,44	21,55	58,04	58,53	59,20
DI Yogyakarta	472	398	372	23,75	20,35	18,50	60,87	63,04	59,01
Jawa Timur	4 768	4 807	4 779	23,98	24,90	24,14	59,62	57,05	58,39
Banten	633	602	684	12,83	12,40	13,13	60,49	56,23	55,77
Bali	483	456	491	20,30	20,04	20,23	60,93	60,68	60,35
Nusa Tenggara Barat	482	404	423	21,79	19,28	18,48	60,06	56,74	64,80
Nusa Tenggara Timur	841	814	763	36,01	37,44	32,73	60,26	56,44	61,45
Kalimantan Barat	704	655	619	30,48	29,40	27,42	55,22	57,86	56,08
Kalimantan Tengah	297	334	241	24,45	28,89	19,33	57,62	50,63	61,37
Kalimantan Selatan	540	571	553	27,89	30,59	28,09	57,47	53,26	59,68
Kalimantan Timur	298	297	251	17,01	17,69	16,38	59,33	47,89	56,76
Kalimantan Utara	-	-	42	-	-	15,65	-	-	58,14
Sulawesi Utara	213	191	221	19,80	19,44	20,48	48,96	42,03	51,33
Sulawesi Tengah	368	369	383	26,54	28,54	27,66	61,34	49,64	53,59
Sulawesi Selatan	1 115	1 014	928	32,19	28,75	26,23	48,75	50,02	52,76
Sulawesi Tenggara	304	309	275	27,31	29,80	24,46	61,04	57,58	59,48
Gorontalo	103	93	109	20,18	19,37	20,97	57,92	56,61	50,98
Sulawesi Barat	240	245	276	40,53	41,15	43,42	53,31	50,32	49,22
Maluku	164	145	154	24,11	24,10	23,27	56,21	55,19	56,72
Maluku Utara	119	124	103	25,57	27,22	20,95	62,71	56,10	61,63
Papua Barat	101	86	76	25,72	22,77	19,64	60,23	57,89	56,39
Papua	493	449	499	30,24	27,73	30,29	54,48	54,63	47,73
Indonesia	26 401	26 087	25 634	22,34	22,76	21,21	57,06	54,67	56,72

**Lampiran 13 Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja
Menurut Jenis Kelamin, Daerah Tempat Tinggal, dan Jumlah Jam Kerja, 2014–2015**

Jumlah Jam Kerja	2014		2015
	Februari	Agustus	Februari
(1)	(2)	(3)	(4)
Total	100,00	100,00	100,00
0 jam*	2,19	2,41	2,10
1–14 jam	6,16	5,83	6,24
15–24 jam	11,67	11,97	10,89
25–34 jam	13,45	13,40	12,39
35–39 jam	10,09	9,66	10,35
40–48 jam	30,38	30,76	30,34
49–59 jam	14,93	14,78	15,30
60 jam ke atas	11,13	11,19	12,39
Laki-Laki	100,00	100,00	100,00
0 jam*	2,33	2,58	2,25
1–14 jam	3,85	3,66	4,00
15–24 jam	8,44	9,22	8,39
25–34 jam	12,10	12,14	10,99
35–39 jam	9,55	9,14	8,84
40–48 jam	34,82	34,69	34,77
49–59 jam	17,42	17,21	18,09
60 jam ke atas	11,49	11,36	12,67
Perempuan	100,00	100,00	100,00
0 jam*	1,97	2,13	1,87
1–14 jam	9,83	9,43	9,71
15–24 jam	16,81	16,52	14,77
25–34 jam	15,61	15,50	14,57
35–39 jam	10,94	10,50	12,68
40–48 jam	23,31	24,25	23,48
49–59 jam	10,98	10,76	10,98
60 jam ke atas	10,55	10,91	11,94
Perkotaan	100,00	100,00	100,00
0 jam*	2,30	2,17	2,00
1–14 jam	4,19	3,73	4,48
15–24 jam	7,27	7,04	7,46
25–34 jam	9,40	8,67	8,81
35–39 jam	8,47	8,06	9,18
40–48 jam	37,68	39,23	36,68
49–59 jam	16,14	15,98	16,08
60 jam ke atas	14,56	15,12	15,31
Perdesaan	100,00	100,00	100,00
0 jam*	2,09	2,64	2,22
1–14 jam	8,02	7,81	8,34
15–24 jam	15,84	16,62	15,02
25–34 jam	17,30	17,87	16,69
35–39 jam	11,62	11,16	11,75
40–48 jam	23,46	22,77	22,74
49–59 jam	13,79	13,64	14,36
60 jam ke atas	7,88	7,49	8,88

*0 jam: Sementara tidak bekerja

**Lampiran 14 Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja
Menurut Provinsi dan Jumlah Jam Kerja, 2014**

Provinsi	0 jam*			1–14 jam			15–24 jam		
	Februari 2014	Agustus 2014	Februari 2015	Februari 2014	Agustus 2014	Februari 2015	Februari 2014	Agustus 2014	Februari 2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	2,00	3,81	2,62	9,93	8,62	7,87	15,92	18,35	13,60
Sumatera Utara	2,23	2,02	1,77	6,10	5,52	5,73	13,10	12,46	11,76
Sumatera Barat	3,15	3,20	3,22	7,02	7,57	8,19	13,87	14,35	15,02
Riau	1,24	2,79	2,11	7,02	6,70	8,01	12,94	12,98	15,28
Jambi	2,43	2,83	1,56	6,11	7,17	5,97	16,70	19,49	18,32
Sumatera Selatan	2,98	2,48	1,79	6,28	5,25	5,69	14,55	18,00	13,81
Bengkulu	2,18	3,10	2,07	7,15	6,43	8,02	11,03	13,70	11,74
Lampung	1,45	2,25	2,85	7,13	6,54	7,27	16,00	16,42	14,34
Kep. Bangka Belitung	2,53	3,27	2,34	3,38	4,54	4,71	10,85	11,82	9,76
Kepulauan Riau	2,30	2,00	1,40	2,59	2,65	4,57	4,96	5,41	5,40
DKI Jakarta	1,34	1,56	1,13	2,61	2,13	4,48	3,35	3,57	4,53
Jawa Barat	1,97	2,31	1,64	4,43	3,76	4,11	9,59	9,59	8,06
Jawa Tengah	3,29	2,97	2,46	6,34	6,07	5,79	10,56	11,03	10,41
DI Yogyakarta	2,01	2,35	1,37	7,36	7,46	5,79	10,24	8,36	8,41
Jawa Timur	1,43	1,82	1,71	7,25	6,84	7,24	11,88	12,47	11,66
Banten	1,37	2,09	2,27	3,06	4,12	4,05	7,14	7,47	6,82
Bali	2,28	1,93	1,99	4,30	4,31	5,03	8,17	7,88	7,88
Nusa Tenggara Barat	2,50	2,79	3,15	11,12	9,04	9,85	13,53	15,25	13,25
Nusa Tenggara Timur	2,58	3,77	2,13	9,51	11,22	8,51	18,35	17,84	15,66
Kalimantan Barat	1,78	2,15	2,40	3,94	5,14	6,54	19,04	18,04	15,37
Kalimantan Tengah	1,34	2,11	3,17	5,90	5,56	6,18	13,11	15,34	11,22
Kalimantan Selatan	2,47	2,63	2,55	5,55	6,82	7,59	13,70	14,32	14,18
Kalimantan Timur	1,72	2,01	2,17	3,92	3,81	4,29	7,54	8,70	8,34
Kalimantan Utara	-	-	6,03	-	-	2,95	-	-	9,83
Sulawesi Utara	2,57	2,33	1,43	5,65	4,14	5,42	11,30	11,45	10,19
Sulawesi Tengah	3,57	4,19	3,68	7,58	8,62	9,24	14,50	13,61	15,44
Sulawesi Selatan	3,47	2,75	3,05	9,74	9,05	10,59	15,62	13,57	13,03
Sulawesi Tenggara	2,95	3,51	3,57	9,39	9,37	8,63	14,19	15,34	11,73
Gorontalo	3,49	3,69	4,05	7,42	5,32	8,41	9,18	11,22	9,36
Sulawesi Barat	4,28	3,95	3,55	15,38	15,45	16,18	19,41	19,91	17,33
Maluku	4,96	3,30	2,93	7,42	4,95	6,62	14,62	16,01	13,40
Maluku Utara	3,43	3,09	1,99	6,82	7,80	6,97	14,98	14,29	14,67
Papua Barat	2,10	3,20	3,36	5,26	4,52	5,53	11,71	13,12	9,98
Papua	0,68	0,48	1,49	5,08	3,16	7,99	18,03	15,01	12,15
Indonesia	2,19	2,41	2,10	6,16	5,83	6,24	11,67	11,97	10,89

*0 jam: Sementara tidak bekerja

**Lampiran 14 Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Provinsi dan Jumlah Jam Kerja, 2014
(lanjutan)**

Provinsi	25–34 jam			35–39 jam			40–48 jam		
	Februari 2014	Agustus 2014	Februari 2015	Februari 2014	Agustus 2014	Februari 2015	Februari 2014	Agustus 2014	Februari 2015
(1)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Aceh	17,75	17,65	16,55	13,14	11,45	12,94	21,78	21,10	24,34
Sumatera Utara	14,24	13,60	14,70	13,77	11,14	12,28	27,19	32,70	27,07
Sumatera Barat	12,71	14,99	14,15	11,76	10,26	10,61	26,27	24,32	24,05
Riau	14,79	15,57	13,44	9,96	9,36	12,46	26,95	27,34	23,51
Jambi	22,29	18,83	19,06	14,32	13,44	13,23	20,35	20,51	23,17
Sumatera Selatan	18,05	18,74	15,03	11,60	10,67	12,41	22,67	22,40	24,87
Bengkulu	15,94	15,93	13,31	11,58	12,06	14,50	28,33	26,04	25,84
Lampung	14,95	14,39	14,37	10,82	10,56	9,84	24,85	24,98	25,85
Kep. Bangka Belitung	13,88	12,59	10,85	9,90	11,03	13,58	35,90	33,30	33,67
Kepulauan Riau	9,51	5,73	6,43	9,24	5,52	8,20	39,61	42,92	46,66
DKI Jakarta	5,09	4,34	4,99	4,39	3,74	5,51	51,28	51,71	48,03
Jawa Barat	11,29	11,64	9,41	8,16	8,41	9,26	35,86	36,17	35,55
Jawa Tengah	12,05	12,50	12,17	9,17	9,08	9,27	31,64	30,34	31,44
DI Yogyakarta	11,30	9,61	9,14	10,03	9,33	9,90	31,96	34,87	36,21
Jawa Timur	14,22	14,27	13,49	10,12	9,53	9,86	27,90	28,00	27,61
Banten	8,83	8,83	7,64	6,05	7,15	9,80	46,91	45,07	44,94
Bali	10,49	10,39	10,20	9,49	8,87	8,35	27,98	30,62	28,25
Nusa Tenggara Barat	14,97	15,79	14,80	11,04	11,27	11,85	20,54	20,85	19,95
Nusa Tenggara Timur	20,68	19,83	18,71	14,76	13,26	14,53	22,64	22,39	25,64
Kalimantan Barat	15,49	16,19	14,85	10,99	11,38	13,08	29,29	28,59	26,28
Kalimantan Tengah	15,30	16,61	11,48	10,83	11,70	11,69	28,91	24,26	24,59
Kalimantan Selatan	17,84	16,92	15,46	13,73	11,67	12,14	24,46	24,78	24,25
Kalimantan Timur	10,90	11,11	9,42	11,14	10,63	10,55	27,31	27,54	27,76
Kalimantan Utara	-	-	10,40	-	-	10,75	-	-	25,95
Sulawesi Utara	11,26	12,23	14,08	10,82	10,24	12,54	36,19	36,21	33,67
Sulawesi Tengah	14,60	16,33	15,36	13,15	12,22	12,56	23,63	23,14	21,06
Sulawesi Selatan	16,18	14,19	12,74	10,11	10,07	8,89	22,45	26,26	25,87
Sulawesi Tenggara	15,22	16,54	13,99	12,38	11,08	12,28	20,80	21,17	20,91
Gorontalo	13,34	12,44	10,68	9,11	10,38	9,62	19,81	22,65	20,76
Sulawesi Barat	19,80	17,10	19,73	11,34	10,69	12,30	16,26	16,12	14,05
Maluku	15,90	16,29	15,13	13,00	13,42	12,64	26,04	21,09	22,52
Maluku Utara	17,08	18,57	14,98	14,63	14,64	14,53	24,81	25,18	25,06
Papua Barat	19,05	17,05	16,06	14,55	12,47	13,09	25,43	27,89	29,36
Papua	26,27	24,60	25,19	17,88	19,86	17,65	18,95	25,81	23,26
Indonesia	13,45	13,40	12,39	10,09	9,66	10,35	30,38	30,76	30,34

**Lampiran 14 Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja
Menurut Provinsi dan Jumlah Jam Kerja, 2014
(lanjutan)**

Provinsi	49–59 jam			60 jam ke atas		
	Februari 2014	Agustus 2014	Februari 2015	Februari 2014	Agustus 2014	Februari 2015
(1)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
Aceh	11,15	11,14	13,81	8,34	7,88	8,27
Sumatera Utara	11,40	11,92	14,48	11,96	10,64	12,22
Sumatera Barat	14,25	14,98	14,60	10,98	10,34	10,17
Riau	15,40	13,79	12,79	11,70	11,47	12,40
Jambi	10,05	11,62	11,48	7,74	6,11	7,20
Sumatera Selatan	13,77	12,86	14,04	10,11	9,60	12,35
Bengkulu	16,10	13,51	16,05	7,68	9,21	8,46
Lampung	16,66	17,34	17,10	8,14	7,53	8,37
Kep. Bangka Belitung	16,51	14,58	17,18	7,06	8,87	7,92
Kepulauan Riau	19,33	18,72	15,90	12,47	17,05	11,44
DKI Jakarta	14,72	14,22	15,12	17,21	18,71	16,20
Jawa Barat	15,34	14,46	15,79	13,36	13,65	16,18
Jawa Tengah	16,76	17,70	17,16	10,20	10,32	11,29
DI Yogyakarta	18,27	16,95	18,68	8,82	11,06	10,51
Jawa Timur	16,41	16,25	16,22	10,79	10,83	12,20
Banten	15,41	12,84	13,05	11,23	12,44	11,42
Bali	20,68	21,18	20,84	16,61	14,81	17,46
Nusa Tenggara Barat	15,27	15,92	16,75	11,03	9,10	10,41
Nusa Tenggara Timur	6,28	6,11	8,86	5,20	5,58	5,98
Kalimantan Barat	11,22	11,70	12,85	8,25	6,81	8,64
Kalimantan Tengah	13,32	14,58	15,79	11,30	9,84	15,88
Kalimantan Selatan	13,95	13,24	13,30	8,29	9,61	10,54
Kalimantan Timur	17,36	16,66	16,53	20,11	19,53	20,94
Kalimantan Utara	-	-	18,82	-	-	15,29
Sulawesi Utara	13,50	11,89	9,63	8,72	11,50	13,03
Sulawesi Tengah	14,11	12,91	12,44	8,87	8,98	10,23
Sulawesi Selatan	12,41	14,40	14,41	10,02	9,70	11,42
Sulawesi Tenggara	15,95	14,13	16,29	9,11	8,85	12,60
Gorontalo	19,48	20,29	19,94	18,18	14,00	17,17
Sulawesi Barat	10,03	11,78	10,79	3,51	5,01	6,07
Maluku	9,79	12,76	11,99	8,26	12,16	14,75
Maluku Utara	11,33	9,28	10,67	6,93	7,15	11,13
Papua Barat	12,35	10,23	13,14	9,56	11,52	9,48
Papua	5,93	5,06	6,55	7,18	6,02	5,73
Indonesia	14,93	14,78	15,30	11,13	11,19	12,39

**Lampiran 15 Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja
Menurut Provinsi dan Sektor Formal dan Informal, 2014**

Provinsi	Formal			Informal		
	Februari 2014	Agustus 2014	Februari 2015	Februari 2014	Agustus 2014	Februari 2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	40,72	44,21	48,72	59,28	55,79	51,28
Sumatera Utara	38,83	47,34	45,42	61,17	52,66	54,58
Sumatera Barat	41,99	42,85	44,92	58,01	57,15	55,08
Riau	51,29	50,38	52,19	48,71	49,62	47,81
Jambi	44,84	42,20	48,45	55,16	57,80	51,55
Sumatera Selatan	39,69	41,76	41,25	60,31	58,24	58,75
Bengkulu	35,05	38,83	37,35	64,95	61,17	62,65
Lampung	35,90	34,73	35,76	64,10	65,27	64,24
Kep. Bangka Belitung	53,64	54,49	55,06	46,36	45,51	44,94
Kepulauan Riau	67,33	73,35	74,07	32,67	26,65	25,93
DKI Jakarta	76,31	78,40	78,33	23,69	21,60	21,67
Jawa Barat	54,02	53,20	54,48	45,98	46,80	45,52
Jawa Tengah	44,89	43,22	45,26	55,11	56,78	54,74
DI Yogyakarta	55,09	53,94	53,55	44,91	46,06	46,45
Jawa Timur	41,63	41,63	43,34	58,37	58,37	56,66
Banten	66,08	65,64	68,69	33,92	34,36	31,31
Bali	50,29	55,61	56,39	49,71	44,39	43,61
Nusa Tenggara Barat	30,93	31,49	29,71	69,07	68,51	70,29
Nusa Tenggara Timur	21,95	24,89	25,17	78,05	75,11	74,83
Kalimantan Barat	38,47	37,74	39,89	61,53	62,26	60,11
Kalimantan Tengah	46,67	44,76	48,64	53,33	55,24	51,36
Kalimantan Selatan	43,49	43,07	43,09	56,51	56,93	56,91
Kalimantan Timur	63,84	61,21	66,11	36,16	38,79	33,89
Kalimantan Utara	-	-	57,75	-	-	42,25
Sulawesi Utara	44,49	45,78	43,64	55,51	54,22	56,36
Sulawesi Tengah	40,17	38,87	36,98	59,83	61,13	63,02
Sulawesi Selatan	43,72	42,45	43,30	56,28	57,55	56,70
Sulawesi Tenggara	39,29	38,93	41,97	60,71	61,07	58,03
Gorontalo	44,34	39,73	42,42	55,66	60,27	57,58
Sulawesi Barat	35,14	32,36	30,33	64,86	67,64	69,67
Maluku	35,15	36,95	38,84	64,85	63,05	61,16
Maluku Utara	38,46	34,41	36,01	61,54	65,59	63,99
Papua Barat	41,09	43,27	45,48	58,91	56,73	54,52
Papua	19,90	19,27	24,51	80,10	80,73	75,49
Indonesia	46,41	46,76	48,15	53,59	53,24	51,85

Lampiran 16 Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin (persen), 2014

Provinsi	Februari 2014			Agustus 2014			Februari 2015		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	6,53	7,12	6,75	7,78	11,16	9,02	7,27	8,42	7,73
Sumatera Utara	4,95	7,30	5,95	5,41	7,52	6,23	5,52	7,63	6,39
Sumatera Barat	5,84	7,04	6,32	6,18	7,00	6,50	4,92	7,51	5,99
Riau	4,33	6,27	4,99	5,62	8,52	6,56	6,51	7,08	6,72
Jambi	2,08	3,27	2,50	4,21	6,73	5,08	2,83	2,57	2,73
Sumatera Selatan	4,22	3,25	3,84	5,57	3,97	4,96	5,50	4,28	5,03
Bengkulu	1,63	1,61	1,62	2,88	4,42	3,47	2,14	4,81	3,21
Lampung	4,53	6,05	5,08	4,09	6,10	4,79	2,69	4,71	3,44
Kep. Bangka Belitung	2,85	2,32	2,67	4,56	6,37	5,14	3,74	2,66	3,35
Kepulauan Riau	3,88	8,00	5,26	5,60	8,87	6,69	7,98	11,23	9,05
DKI Jakarta	9,63	10,17	9,84	7,90	9,45	8,47	7,77	9,25	8,36
Jawa Barat	8,51	8,97	8,66	8,07	9,21	8,45	8,28	8,62	8,40
Jawa Tengah	5,66	5,15	5,45	5,55	5,86	5,68	5,10	5,59	5,31
DI Yogyakarta	2,67	1,60	2,16	3,88	2,65	3,33	5,23	2,59	4,07
Jawa Timur	3,98	4,08	4,02	4,31	4,01	4,19	4,51	4,02	4,31
Banten	9,94	9,75	9,87	9,02	9,15	9,07	9,13	7,61	8,58
Bali	1,73	0,95	1,37	2,19	1,55	1,90	1,41	1,31	1,37
Nusa Tenggara Barat	5,52	5,00	5,30	6,41	4,85	5,75	5,43	4,45	4,98
Nusa Tenggara Timur	2,24	1,65	1,97	3,23	3,30	3,26	2,53	3,83	3,12
Kalimantan Barat	2,56	2,49	2,53	4,04	4,04	4,04	5,60	3,52	4,78
Kalimantan Tengah	2,45	3,15	2,71	3,25	3,24	3,24	3,30	2,87	3,14
Kalimantan Selatan	4,01	4,06	4,03	3,94	3,56	3,80	5,03	4,54	4,83
Kalimantan Timur	8,04	10,59	8,89	6,71	8,87	7,38	6,72	8,04	7,17
Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	4,04	9,82	5,79
Sulawesi Utara	4,93	11,85	7,27	6,03	10,71	7,54	6,41	12,69	8,69
Sulawesi Tengah	2,94	2,90	2,92	3,13	4,68	3,68	3,10	2,79	2,99
Sulawesi Selatan	4,92	7,30	5,79	4,26	6,41	5,08	6,36	4,90	5,81
Sulawesi Tenggara	1,94	2,40	2,13	4,11	4,93	4,43	3,12	4,34	3,62
Gorontalo	1,81	3,47	2,44	3,89	4,72	4,18	2,70	3,63	3,06
Sulawesi Barat	1,22	2,15	1,60	1,16	3,43	2,08	1,66	2,01	1,81
Maluku	4,81	9,30	6,59	9,20	12,69	10,51	4,65	9,85	6,72
Maluku Utara	4,00	8,47	5,65	4,39	6,93	5,29	5,02	6,43	5,56
Papua Barat	3,36	4,28	3,70	4,71	5,55	5,02	4,93	4,07	4,61
Papua	3,49	3,48	3,48	3,56	3,28	3,44	3,87	3,51	3,72
Indonesia	5,62	5,84	5,70	5,75	6,26	5,94	5,76	5,89	5,81

**Lampiran 17 Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi dan Tingkat Pendidikan (persen),
2014**

Provinsi	Pendidikan Dasar ke Bawah			Pendidikan Menengah			Pendidikan Tinggi		
	Februari 2014	Agustus 2014	Februari 2015	Februari 2014	Agustus 2014	Februari 2015	Februari 2014	Agustus 2014	Februari 2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	4,70	5,91	4,40	10,09	14,07	11,83	7,47	9,95	11,18
Sumatera Utara	4,86	4,02	4,80	8,47	9,03	8,06	4,01	8,68	9,19
Sumatera Barat	4,45	4,64	3,08	10,57	9,89	9,69	5,66	7,69	10,63
Riau	2,39	4,31	3,30	8,33	9,35	10,82	8,32	10,84	12,03
Jambi	1,30	2,81	1,59	5,15	9,43	5,60	2,58	8,44	1,98
Sumatera Selatan	2,31	2,61	2,59	6,72	10,78	10,72	7,45	6,16	6,04
Bengkulu	0,75	1,90	0,96	2,43	6,15	4,45	4,84	5,31	10,31
Lampung	3,80	2,95	2,10	9,37	9,66	6,07	3,46	5,85	6,56
Kep. Bangka Belitung	1,44	3,60	2,35	5,27	8,44	5,40	4,96	6,66	3,71
Kepulauan Riau	3,90	4,80	4,87	8,19	9,20	12,94	3,12	3,11	8,92
DKI Jakarta	11,20	10,10	10,46	11,50	8,70	8,69	4,75	5,31	4,51
Jawa Barat	8,20	6,55	7,62	10,80	14,27	11,59	5,51	4,78	4,92
Jawa Tengah	4,82	4,74	5,45	7,59	9,67	5,53	5,75	3,42	3,31
DI Yogyakarta	0,85	1,42	2,00	3,29	5,65	6,21	3,42	4,48	7,02
Jawa Timur	3,12	2,71	3,16	7,57	8,73	7,38	2,22	3,74	4,58
Banten	12,30	7,98	8,78	9,01	12,35	10,39	1,85	4,85	3,96
Bali	0,21	0,90	1,03	3,24	3,09	1,90	1,86	2,89	1,43
Nusa Tenggara Barat	5,10	3,47	3,71	6,83	12,45	7,97	2,79	6,69	8,18
Nusa Tenggara Timur	1,11	1,58	1,35	4,91	7,67	6,65	5,03	8,49	8,78
Kalimantan Barat	1,38	2,58	4,11	6,67	8,56	6,47	3,22	5,78	5,58
Kalimantan Tengah	2,04	2,09	2,05	3,00	6,22	4,25	6,48	4,37	7,23
Kalimantan Selatan	3,21	2,54	3,72	7,76	7,60	6,55	2,29	4,11	8,88
Kalimantan Timur	8,43	5,21	6,15	10,00	10,95	9,94	7,39	5,87	3,82
Kalimantan Utara	-	-	4,20	-	-	8,23	-	-	8,02
Sulawesi Utara	5,38	4,26	4,96	10,26	11,71	14,06	8,31	10,32	10,20
Sulawesi Tengah	1,37	2,15	2,02	6,63	7,05	4,53	3,87	5,70	5,36
Sulawesi Selatan	4,11	2,36	3,61	8,94	9,08	10,90	7,24	9,58	5,98
Sulawesi Tenggara	0,68	1,77	1,77	3,60	8,94	4,27	5,36	7,01	7,94
Gorontalo	1,53	2,31	1,60	5,06	10,36	7,31	4,04	7,19	4,02
Sulawesi Barat	0,52	1,93	0,82	2,91	2,71	3,83	6,97	1,99	6,35
Maluku	3,26	3,25	2,37	10,78	19,89	8,93	13,80	16,35	17,16
Maluku Utara	2,22	2,22	3,13	9,65	10,26	8,54	12,26	8,57	10,40
Papua Barat	1,78	1,76	2,12	6,45	8,05	7,24	6,96	11,36	8,98
Papua	1,72	1,77	1,16	9,17	8,44	10,08	8,55	9,88	8,44
Indonesia	4,75	4,20	4,64	8,42	10,17	8,50	4,72	5,78	5,86

Lampiran 18 Persentase Pengangguran Menurut Provinsi dan Tingkat Pendidikan, 2014

Provinsi	Pendidikan Dasar Kebawah			Pendidikan Menengah			Pendidikan Tinggi		
	Februari 2014	Agustus 2014	Februari 2015	Februari 2014	Agustus 2014	Februari 2015	Februari 2014	Agustus 2014	Februari 2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	38,97	35,86	30,66	47,44	48,56	46,15	13,58	15,58	23,18
Sumatera Utara	47,84	35,65	41,10	45,99	51,44	45,08	6,17	12,91	13,82
Sumatera Barat	41,33	42,54	29,84	46,71	43,30	45,27	11,97	14,16	24,89
Riau	26,91	38,37	27,81	53,81	45,31	51,01	19,28	16,32	21,18
Jambi	31,64	35,47	36,30	55,76	47,54	56,48	12,61	16,98	7,22
Sumatera Selatan	40,18	34,54	33,44	43,75	53,16	56,38	16,07	12,30	10,19
Bengkulu	29,19	33,11	17,71	39,80	48,72	36,97	31,01	18,16	45,32
Lampung	51,00	41,93	41,26	43,49	48,39	43,13	5,51	9,67	15,61
Kep. Bangka Belitung	36,22	45,22	43,15	49,83	42,12	45,24	13,95	12,66	11,61
Kepulauan Riau	36,86	28,65	23,12	53,83	65,60	66,54	9,31	5,75	10,34
DKI Jakarta	37,87	41,68	44,65	50,94	45,16	42,98	11,19	13,16	12,37
Jawa Barat	61,98	50,35	57,04	32,73	44,82	36,87	5,29	4,83	6,09
Jawa Tengah	64,45	60,47	74,46	28,63	35,43	20,82	6,92	4,10	4,72
DI Yogyakarta	18,55	21,52	26,19	55,28	57,22	50,94	26,17	21,26	22,86
Jawa Timur	53,40	44,91	48,91	41,56	48,32	41,72	5,03	6,77	9,37
Banten	69,12	48,70	52,18	28,37	45,11	40,73	2,51	6,18	7,09
Bali	8,64	24,95	40,64	76,24	54,01	44,61	15,11	21,04	14,74
Nusa Tenggara Barat	65,49	41,09	52,41	29,95	47,02	33,23	4,56	11,89	14,35
Nusa Tenggara Timur	43,64	35,69	30,33	38,13	41,34	42,91	18,23	22,97	26,76
Kalimantan Barat	40,08	46,20	59,21	50,43	43,40	31,44	9,49	10,40	9,36
Kalimantan Tengah	50,64	43,72	41,87	24,88	43,81	34,75	24,48	12,47	23,38
Kalimantan Selatan	56,95	46,19	52,76	38,09	44,14	29,53	4,96	9,67	17,71
Kalimantan Timur	45,17	36,60	42,75	43,23	54,11	49,59	11,60	9,29	7,66
Kalimantan Utara	-	-	43,42	-	-	41,13	-	-	15,45
Sulawesi Utara	42,17	30,42	30,61	45,37	53,95	54,82	12,46	15,64	14,57
Sulawesi Tengah	30,47	38,39	43,83	55,92	44,18	37,88	13,61	17,43	18,29
Sulawesi Selatan	42,84	28,26	36,83	39,51	42,72	47,24	17,65	29,02	15,93
Sulawesi Tenggara	18,62	23,60	25,88	46,55	54,81	33,94	34,83	21,59	40,18
Gorontalo	44,63	40,24	35,25	37,45	42,74	48,68	17,92	17,02	16,07
Sulawesi Barat	22,56	66,26	34,06	38,70	23,79	34,76	38,73	9,95	31,17
Maluku	30,10	16,42	17,67	42,87	59,70	48,85	27,04	23,88	33,49
Maluku Utara	23,18	24,82	33,33	44,81	54,44	44,38	32,01	20,74	22,29
Papua Barat	29,07	19,53	26,41	43,61	47,87	39,70	27,32	32,59	33,89
Papua	37,48	39,18	21,58	44,52	43,38	56,02	18,00	17,43	22,40
Indonesia	53,35	45,01	49,61	38,35	45,48	39,39	8,30	9,51	11,00

Lampiran 19 Persentase Setengah Penganggur Menurut Provinsi dan Tingkat Pendidikan, 2014

Provinsi	Pendidikan Dasar Kebawah			Pendidikan Menengah			Pendidikan Tinggi		
	Februari 2014	Agustus 2014	Februari 2015	Februari 2014	Agustus 2014	Februari 2015	Februari 2014	Agustus 2014	Februari 2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	50,39	56,71	53,56	36,03	31,53	31,58	13,58	11,75	14,86
Sumatera Utara	57,64	55,31	52,48	34,86	36,47	37,73	7,50	8,22	9,79
Sumatera Barat	65,12	65,86	67,04	22,48	23,07	19,51	12,40	11,07	13,46
Riau	66,57	63,14	65,02	27,30	29,78	24,04	6,13	7,07	10,94
Jambi	56,48	65,61	57,56	33,15	25,79	31,57	10,37	8,60	10,86
Sumatera Selatan	67,90	71,75	67,01	25,44	22,43	26,45	6,66	5,83	6,55
Bengkulu	64,77	62,80	53,76	27,79	28,71	31,30	7,44	8,50	14,94
Lampung	70,27	70,79	61,23	24,13	22,02	28,70	5,59	7,19	10,07
Kep. Bangka Belitung	75,72	70,14	66,98	19,73	24,00	22,81	4,56	5,85	10,22
Kepulauan Riau	56,59	58,26	61,83	33,45	35,99	26,31	9,96	5,75	11,86
DKI Jakarta	37,68	46,21	34,14	50,45	33,18	52,34	11,87	20,61	13,52
Jawa Barat	79,31	82,94	76,63	13,82	12,96	15,81	6,87	4,10	7,56
Jawa Tengah	79,41	80,51	82,27	15,10	15,93	13,22	5,49	3,56	4,52
DI Yogyakarta	53,90	51,02	53,87	28,20	38,21	33,77	17,90	10,78	12,37
Jawa Timur	79,53	80,22	78,52	15,47	15,44	15,23	5,00	4,35	6,26
Banten	72,01	75,74	79,95	19,76	18,08	16,39	8,23	6,18	3,66
Bali	54,76	58,75	60,90	37,74	32,98	33,57	7,50	8,27	5,54
Nusa Tenggara Barat	70,32	74,81	74,81	20,69	19,40	17,31	8,99	5,79	7,87
Nusa Tenggara Timur	79,95	74,21	73,59	16,73	20,06	22,31	3,32	5,73	4,10
Kalimantan Barat	74,69	80,39	68,49	17,69	15,35	24,08	7,61	4,26	7,44
Kalimantan Tengah	64,63	69,47	64,58	26,61	22,69	29,06	8,76	7,84	6,36
Kalimantan Selatan	80,53	76,63	76,75	15,56	17,42	14,61	3,91	5,96	8,64
Kalimantan Timur	53,79	66,12	57,29	37,28	26,77	38,06	8,92	7,11	4,64
Kalimantan Utara	-	-	68,44	-	-	27,73	-	-	3,83
Sulawesi Utara	65,99	64,31	57,34	31,44	30,96	34,53	2,57	4,73	8,13
Sulawesi Tengah	69,73	73,44	71,47	19,17	21,63	22,50	11,10	4,93	6,03
Sulawesi Selatan	51,33	60,45	58,98	32,13	25,05	27,94	16,54	14,50	13,09
Sulawesi Tenggara	51,16	59,35	53,00	30,50	30,52	32,68	18,34	10,13	14,31
Gorontalo	76,67	81,46	75,74	18,91	14,86	16,93	4,41	3,69	7,32
Sulawesi Barat	68,52	58,00	57,78	27,99	32,82	33,33	3,49	9,18	8,89
Maluku	65,03	61,71	53,25	31,15	31,26	36,52	3,82	7,03	10,24
Maluku Utara	67,98	62,79	62,93	24,56	30,61	30,63	7,46	6,59	6,44
Papua Barat	67,82	64,91	59,78	24,60	27,78	31,30	7,58	7,32	8,92
Papua	88,43	88,25	80,91	10,07	10,41	14,70	1,50	1,34	4,39
Indonesia	72,31	73,85	70,38	20,58	20,11	21,72	7,11	6,05	7,90

Lampiran 20 Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Termasuk Bukan Angkatan Kerja Menurut Provinsi (ribu), 2014–2015

Provinsi	Februari	Mei	Agustus
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	1 154	1 244	1 146
Sumatera Utara	2 498	3 079	2 839
Sumatera Barat	1 043	1 245	1 129
Riau	1 387	1 562	1 346
Jambi	791	824	728
Sumatera Selatan	1 567	1 758	1 678
Bengkulu	333	418	356
Lampung	1 682	1 901	1 744
Kep. Bangka Belitung	318	336	294
Kepulauan Riau	423	454	458
DKI Jakarta	2 388	2 538	2 095
Jawa Barat	11 786	12 459	11 466
Jawa Tengah	7 262	7 635	7 047
DI Yogyakarta	797	824	772
Jawa Timur	8 659	9 429	9 046
Banten	2 764	3 024	2 771
Bali	656	776	659
Nusa Tenggara Barat	967	1 113	953
Nusa Tenggara Timur	836	1 014	892
Kalimantan Barat	912	998	981
Kalimantan Tengah	463	547	475
Kalimantan Selatan	748	853	757
Kalimantan Timur	855	1 014	783
Kalimantan Utara	-	-	150
Sulawesi Utara	594	707	602
Sulawesi Tengah	561	668	605
Sulawesi Selatan	2 252	2 274	2 280
Sulawesi Tenggara	463	538	476
Gorontalo	265	296	271
Sulawesi Barat	243	248	219
Maluku	361	431	405
Maluku Utara	249	272	244
Papua Barat	166	185	185
Papua	408	454	447
Indonesia	55 853	61 119	56 298

Lampiran 21 Tingkat Ketidakefektifan Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin (persen), 2014

Provinsi	Februari 2014			Agustus 2014			Februari 2015		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	17,00	51,92	34,68	19,20	54,26	36,94	19,01	47,90	33,63
Sumatera Utara	14,69	38,89	26,96	16,77	48,65	32,93	16,73	43,12	30,10
Sumatera Barat	14,51	43,78	29,42	19,75	49,35	34,81	17,81	44,27	31,27
Riau	14,43	52,92	33,12	16,77	57,79	36,69	14,67	48,61	31,15
Jambi	15,60	52,25	33,49	16,15	53,54	34,41	15,24	45,61	30,08
Sumatera Selatan	13,80	42,66	28,04	15,63	47,09	31,15	14,14	45,19	29,46
Bengkulu	14,11	37,56	25,62	17,41	46,54	31,71	13,87	40,14	26,76
Lampung	12,30	47,55	29,45	14,63	52,38	33,01	13,90	47,07	30,05
Kep. Bangka Belitung	13,52	54,60	33,16	14,91	56,03	34,55	14,45	46,58	29,80
Kepulauan Riau	11,80	53,45	32,17	13,82	55,17	34,05	13,18	55,40	33,84
DKI Jakarta	14,96	48,15	31,51	16,06	50,74	33,39	12,90	41,89	27,40
Jawa Barat	15,16	56,56	35,64	17,18	57,70	37,23	15,25	53,00	33,92
Jawa Tengah	15,09	42,52	29,07	17,07	43,07	30,32	15,01	40,13	27,81
DI Yogyakarta	22,30	33,76	28,16	19,07	38,40	28,95	16,05	37,28	26,90
Jawa Timur	14,56	43,68	29,48	16,19	46,83	31,88	15,34	44,80	30,42
Banten	15,67	52,06	33,53	16,70	56,35	36,16	15,46	50,64	32,72
Bali	15,22	27,57	21,39	17,45	32,74	25,09	14,33	27,95	21,14
Nusa Tenggara Barat	14,24	42,81	29,29	19,13	46,19	33,37	17,50	38,09	28,34
Nusa Tenggara Timur	17,12	34,40	25,96	20,00	41,67	31,09	18,76	34,96	27,05
Kalimantan Barat	14,85	41,21	27,79	16,29	44,35	30,07	16,20	42,83	29,27
Kalimantan Tengah	12,18	43,58	27,07	14,70	50,03	31,44	13,13	42,29	26,95
Kalimantan Selatan	11,49	42,84	27,05	14,59	46,75	30,54	12,96	40,85	26,79
Kalimantan Timur	13,23	50,57	30,77	16,58	57,74	35,90	15,37	51,07	32,19
Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	14,95	56,90	34,30
Sulawesi Utara	13,96	54,50	33,86	20,24	60,53	40,01	17,19	50,96	33,76
Sulawesi Tengah	13,92	43,09	28,21	15,34	51,89	33,24	13,86	46,40	29,79
Sulawesi Selatan	17,85	56,44	37,98	19,77	54,67	37,96	18,66	55,32	37,77
Sulawesi Tenggara	15,23	42,46	28,95	17,84	48,24	33,13	15,57	42,18	28,96
Gorontalo	17,18	50,11	33,75	18,75	55,34	37,16	17,64	49,42	33,63
Sulawesi Barat	14,98	42,44	28,82	14,85	42,82	28,94	12,62	37,72	25,26
Maluku	19,28	47,01	33,16	23,81	54,34	39,08	23,34	49,23	36,29
Maluku Utara	17,89	49,91	33,57	19,37	53,58	36,12	17,31	47,32	32,01
Papua Barat	15,81	43,99	28,95	18,53	46,82	31,70	18,86	45,30	31,19
Papua	12,59	27,31	19,46	14,17	29,51	21,33	12,33	30,34	20,74
Indonesia	14,96	46,63	30,83	16,95	49,78	33,40	15,42	45,52	30,50

Lampiran 22 Persentase Angkatan Kerja Menurut Provinsi dan Tingkat Pendidikan, 2014

Provinsi	Pendidikan Dasar Ke Bawah			Pendidikan Menengah			Pendidikan Tinggi		
	Februari	Agustus	Februari	Februari	Agustus	Februari	Februari	Agustus	Februari
	2014	2014	2015	2014	2014	2015	2014	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	55,98	54,75	53,82	31,75	31,13	30,15	12,28	14,12	16,03
Sumatera Utara	58,55	55,25	54,66	32,30	35,48	35,72	9,14	9,27	9,61
Sumatera Barat	58,71	59,55	57,97	27,93	28,47	27,99	13,36	11,97	14,03
Riau	56,17	58,33	56,51	32,26	31,80	31,66	11,56	9,87	11,83
Jambi	60,69	64,18	62,45	27,09	25,60	27,58	12,21	10,22	9,97
Sumatera Selatan	66,73	65,61	65,04	24,99	24,49	26,48	8,28	9,91	8,48
Bengkulu	63,05	60,61	59,26	26,56	27,52	26,65	10,38	11,87	14,10
Lampung	68,30	68,09	67,43	23,59	24,00	24,40	8,11	7,91	8,17
Kep. Bangka Belitung	67,21	64,58	61,47	25,27	25,66	28,04	7,52	9,77	10,49
Kepulauan Riau	49,68	39,97	42,98	34,59	47,69	46,53	15,73	12,35	10,49
DKI Jakarta	33,27	34,98	35,70	43,58	44,01	41,36	23,14	21,01	22,94
Jawa Barat	65,43	64,92	62,88	26,25	26,53	26,72	8,32	8,54	10,40
Jawa Tengah	72,89	72,40	72,49	20,56	20,80	19,96	6,55	6,81	7,56
DI Yogyakarta	47,13	50,42	53,33	36,30	33,77	33,41	16,56	15,82	13,26
Jawa Timur	68,83	69,25	66,79	22,07	23,18	24,38	9,09	7,57	8,82
Banten	55,51	55,31	50,98	31,09	33,12	33,64	13,40	11,56	15,38
Bali	56,67	52,82	53,78	32,20	33,29	32,11	11,13	13,88	14,12
Nusa Tenggara Barat	68,10	68,07	70,47	23,24	21,71	20,78	8,66	10,22	8,75
Nusa Tenggara Timur	77,57	73,64	70,34	15,30	17,54	20,14	7,14	8,82	9,52
Kalimantan Barat	73,44	72,27	68,79	19,11	20,47	23,21	7,45	7,26	8,00
Kalimantan Tengah	67,30	67,92	64,17	22,48	22,82	25,67	10,22	9,26	10,16
Kalimantan Selatan	71,50	68,98	68,59	19,77	22,08	21,77	8,73	8,95	9,64
Kalimantan Timur	47,61	51,84	49,87	38,43	36,48	35,77	13,96	11,68	14,36
Kalimantan Utara	-	-	59,91	-	-	28,93	-	-	11,16
Sulawesi Utara	56,99	53,84	53,69	32,11	34,73	33,89	10,90	11,43	12,42
Sulawesi Tengah	65,07	65,71	64,82	24,65	23,04	24,99	10,27	11,25	10,19
Sulawesi Selatan	60,29	60,70	59,32	25,59	23,91	25,19	14,12	15,39	15,49
Sulawesi Tenggara	58,65	59,20	52,90	27,54	27,16	28,78	13,82	13,64	18,32
Gorontalo	71,12	72,84	67,40	18,05	17,26	20,36	10,83	9,90	12,24
Sulawesi Barat	69,91	71,32	74,75	21,21	18,27	16,39	8,88	10,41	8,86
Maluku	60,85	53,12	50,09	26,23	31,54	36,79	12,92	15,34	13,12
Maluku Utara	59,01	59,10	59,21	26,24	28,09	28,89	14,75	12,81	11,91
Papua Barat	60,47	55,78	57,32	25,01	29,83	25,27	14,51	14,39	17,41
Papua	75,76	76,22	69,44	16,91	17,71	20,69	7,33	6,07	9,87
Indonesia	63,99	63,65	62,18	25,98	26,58	26,92	10,03	9,77	10,90

**Lampiran 23 Rata-rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Lapangan Usaha dan Jenis Kelamin
(rupiah), 2014**

Lapangan Usaha	Februari 2014			Agustus 2014			Februari 2015		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	1 319 035	820 542	1 225 675	1 402 699	925 513	1 293 505	1 294 772	847 582	1 195 354
2	3 114 981	2 907 368	3 099 772	3 474 547	2 942 757	3 448 002	3 578 284	1 453 346	3 409 696
3	1 811 330	1 205 595	1 593 805	1 927 994	1 403 925	1 737 621	1 809 063	1 288 604	1 621 450
4	2 452 028	2 331 811	2 441 991	2 639 697	2 279 074	2 609 639	2 341 149	2 895 814	2 408 970
5	1 788 546	2 007 305	1 797 004	1 842 929	2 287 079	1 862 171	1 838 107	6 832 622	2 071 807
6	1 604 160	1 178 644	1 437 260	1 696 287	1 367 794	1 567 419	1 757 402	1 367 474	1 612 073
7	2 217 898	2 194 993	2 215 624	2 336 269	2 373 005	2 340 062	2 801 113	3 422 077	2 868 441
8	2 765 632	2 747 162	2 760 118	2 811 474	2 730 049	2 787 567	2 935 842	2 786 232	2 891 453
9	2 533 164	1 750 155	2 153 079	2 480 644	1 805 146	2 160 627	2 516 192	1 855 327	2 187 924
Total	2 065 294	1 551 915	1 885 815	2 115 072	1 644 458	1 952 589	2 132 279	1 705 548	1 981 725

Keterangan lapangan usaha:

- 1) Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan
- 2) Pertambangan dan Penggalian
- 3) Industri
- 4) Listrik, Gas, dan Air
- 5) Konstruksi
- 6) Perdagangan, Rumah Makan, dan Jasa Akomodasi
- 7) Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi
- 8) Lembaga Keuangan, *Real Estate*, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan
- 9) Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Perorangan

**Lampiran 24 Rata-rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai
Menurut Lapangan Usaha dan Klasifikasi Daerah (rupiah), 2014**

Lapangan Usaha	Februari 2014			Agustus 2014			Februari 2015		
	Perkotaan	Perdesaan	Total	Perkotaan	Perdesaan	Total	Perkotaan	Perdesaan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	1 472 630	1 145 669	1 225 675	1 407 011	1 260 602	1 293 505	1 228 003	1 178 841	1 195 354
2	4 112 825	1 900 052	3 099 772	4 821 528	2 173 551	3 448 002	4 798 405	2 078 741	3 409 696
3	1 719 890	1 258 490	1 593 805	1 867 934	1 327 201	1 737 621	1 694 153	1 364 800	1 621 450
4	2 885 854	1 648 699	2 441 991	2 815 446	1 998 499	2 609 639	2 570 791	1 702 898	2 408 970
5	1 993 979	1 441 285	1 797 004	2 047 982	1 491 818	1 862 171	2 328 792	1 531 041	2 071 807
6	1 540 016	1 063 004	1 437 260	1 673 473	1 096 871	1 567 419	1 711 545	1 171 826	1 612 073
7	2 485 679	1 539 916	2 215 624	2 565 399	1 636 000	2 340 062	3 145 564	1 852 034	2 868 441
8	2 992 418	1 623 274	2 760 118	2 976 694	1 689 214	2 787 567	3 060 280	1 730 314	2 891 453
9	2 308 551	1 790 794	2 153 079	2 318 348	1 803 007	2 160 627	2 342 996	1 806 271	2 187 924
Total	2 083 499	1 451 969	1 885 815	2 141 850	1 514 434	1 952 589	2 153 567	1 528 212	1 981 725

Keterangan lapangan usaha:

- 1) Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan
- 2) Pertambangan dan Penggalian
- 3) Industri
- 4) Listrik, Gas, dan Air
- 5) Konstruksi
- 6) Perdagangan, Rumah Makan, dan Jasa Akomodasi
- 7) Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi
- 8) Lembaga Keuangan, *Real Estate*, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan
- 9) Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Perorangan

**Lampiran 25 Rata-rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin (rupiah),
2014**

Provinsi	Februari 2014			Agustus 2014			Februari 2015		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	1 806 821	1 576 408	1 731 183	1 774 938	1 714 430	1 753 751	1 767 835	1 699 469	1 744 567
Sumatera Utara	1 750 767	1 534 584	1 676 004	1 833 122	1 509 880	1 730 339	1 893 043	1 473 549	1 741 630
Sumatera Barat	1 939 195	1 795 816	1 881 098	1 959 921	1 703 652	1 861 014	1 981 611	1 766 586	1 899 477
Riau	2 187 134	2 002 132	2 134 079	2 206 692	1 778 790	2 089 740	2 232 999	1 833 777	2 099 410
Jambi	1 884 525	1 503 491	1 764 244	1 892 222	1 740 027	1 844 704	1 911 628	1 750 627	1 860 039
Sumatera Selatan	1 753 307	1 282 414	1 596 162	1 900 868	1 667 763	1 820 905	1 874 605	1 681 602	1 807 585
Bengkulu	2 064 465	1 578 290	1 867 602	2 019 242	1 660 036	1 888 086	2 060 574	1 704 084	1 931 307
Lampung	1 693 333	1 326 362	1 564 318	1 797 969	1 496 871	1 695 552	1 752 187	1 644 717	1 714 314
Kep. Bangka Belitung	2 087 042	1 566 615	1 933 808	2 089 795	1 642 200	1 963 690	2 093 789	1 663 905	1 956 133
Kepulauan Riau	2 828 017	2 561 745	2 744 863	3 711 878	2 616 902	3 371 942	3 714 374	2 730 488	3 411 132
DKI Jakarta	3 170 590	2 384 748	2 871 802	3 146 622	2 483 226	2 906 219	3 151 995	2 537 948	2 918 226
Jawa Barat	2 070 636	1 515 986	1 900 760	2 062 306	1 707 562	1 950 345	2 078 954	1 846 392	2 004 484
Jawa Tengah	1 557 914	1 109 196	1 378 134	1 596 315	1 129 938	1 408 241	1 651 437	1 159 054	1 454 952
DI Yogyakarta	1 896 435	1 446 697	1 690 938	1 904 565	1 460 626	1 724 646	1 846 538	1 596 780	1 745 684
Jawa Timur	1 673 407	1 196 316	1 490 826	1 746 745	1 278 808	1 574 956	1 775 956	1 329 469	1 612 501
Banten	2 571 199	1 943 546	2 366 672	2 533 041	2 104 649	2 396 002	2 550 687	2 078 821	2 392 637
Bali	2 086 253	1 588 813	1 883 179	2 073 797	1 655 067	1 908 186	2 088 703	1 687 440	1 930 920
Nusa Tenggara Barat	1 808 685	1 469 797	1 692 031	2 041 830	1 456 986	1 829 422	2 001 895	1 456 292	1 795 693
Nusa Tenggara Timur	1 841 382	1 678 586	1 784 355	1 885 578	1 678 921	1 808 374	1 896 464	1 745 037	1 845 059
Kalimantan Barat	1 931 814	1 577 399	1 831 499	2 054 414	1 719 178	1 954 650	2 106 746	1 676 563	1 978 910
Kalimantan Tengah	2 177 724	1 794 736	2 065 872	2 192 645	1 861 323	2 094 590	2 234 853	1 896 528	2 137 820
Kalimantan Selatan	2 444 596	1 411 412	2 149 149	2 359 900	1 708 269	2 160 629	2 325 198	1 907 553	2 184 686
Kalimantan Timur	3 090 285	2 139 938	2 823 438	3 088 267	2 009 649	2 819 213	3 177 061	1 959 716	2 825 155
Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	2 710 932	2 208 367	2 559 358
Sulawesi Utara	1 906 266	2 410 320	2 077 495	2 178 380	2 097 990	2 150 512	2 107 747	2 294 974	2 179 352
Sulawesi Tengah	1 985 523	1 548 577	1 831 205	1 987 608	1 781 225	1 910 130	2 143 027	1 599 744	1 955 729
Sulawesi Selatan	2 078 912	1 561 014	1 887 418	2 199 648	1 603 702	1 978 161	2 238 195	1 647 864	2 021 331
Sulawesi Tenggara	2 193 690	1 700 497	2 017 945	2 129 013	1 831 009	2 026 599	2 175 540	1 875 055	2 063 540
Gorontalo	1 624 520	1 583 986	1 606 871	1 837 800	1 538 448	1 704 388	1 846 076	1 584 140	1 734 347
Sulawesi Barat	1 843 822	1 568 252	1 749 757	2 263 345	1 681 491	2 062 204	2 180 422	1 808 641	2 054 723
Maluku	2 116 910	1 886 466	2 036 042	2 496 777	2 021 515	2 328 409	2 439 363	1 964 723	2 279 362
Maluku Utara	2 041 210	2 109 350	2 061 758	2 369 924	1 926 792	2 204 898	2 225 818	2 193 644	2 215 427
Papua Barat	3 004 801	1 988 494	2 729 619	2 891 122	2 289 808	2 730 795	2 851 515	2 446 418	2 750 392
Papua	2 978 830	2 465 210	2 847 628	3 287 953	2 730 793	3 149 950	3 307 942	2 662 819	3 114 182
Indonesia	2 065 294	1 551 915	1 885 815	2 115 072	1 644 458	1 952 589	2 132 279	1 705 548	1 981 725

Lampiran 26 Rata-rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Provinsi dan Klasifikasi Daerah (rupiah), 2014

Provinsi	Februari 2014			Agustus 2014			Februari 2015		
	Perkotaan	Perdesaan	Total	Perkotaan	Perdesaan	Total	Perkotaan	Perdesaan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	2 062 616	1 510 909	1 731 183	2 134 934	1 501 691	1 753 751	2 164 164	1 419 514	1 744 567
Sumatera Utara	1 763 002	1 475 881	1 676 004	1 840 177	1 504 465	1 730 339	1 869 940	1 461 401	1 741 630
Sumatera Barat	2 077 620	1 640 093	1 881 098	2 060 423	1 619 396	1 861 014	2 079 544	1 606 761	1 899 477
Riau	2 465 641	1 742 852	2 134 079	2 436 621	1 720 053	2 089 740	2 468 194	1 729 974	2 099 410
Jambi	2 189 906	1 491 377	1 764 244	2 360 359	1 505 281	1 844 704	2 302 149	1 530 004	1 860 039
Sumatera Selatan	1 826 174	1 360 969	1 596 162	2 232 270	1 367 454	1 820 905	2 233 849	1 364 217	1 807 585
Bengkulu	2 192 171	1 535 217	1 867 602	2 194 059	1 572 735	1 888 086	2 421 966	1 603 505	1 931 307
Lampung	2 022 925	1 225 356	1 564 318	2 047 625	1 397 977	1 695 552	2 100 446	1 400 244	1 714 314
Kep. Bangka Belitung	2 095 350	1 700 805	1 933 808	2 113 480	1 735 120	1 963 690	2 022 025	1 854 746	1 956 133
Kepulauan Riau	2 838 138	1 844 900	2 744 863	3 499 831	1 910 495	3 371 942	3 515 417	1 951 075	3 411 132
DKI Jakarta	2 871 802	-	2 871 802	2 906 219	-	2 906 219	2 918 226	-	2 918 226
Jawa Barat	2 022 626	1 386 039	1 900 760	2 069 232	1 420 737	1 950 345	2 080 971	1 448 856	2 004 484
Jawa Tengah	1 467 970	1 240 351	1 378 134	1 473 894	1 292 029	1 408 241	1 515 115	1 339 436	1 454 952
DI Yogyakarta	1 773 427	1 419 393	1 690 938	1 807 434	1 409 563	1 724 646	1 814 425	1 421 971	1 745 684
Jawa Timur	1 651 212	1 152 983	1 490 826	1 721 697	1 242 788	1 574 956	1 762 135	1 239 833	1 612 501
Banten	2 540 565	1 536 380	2 366 672	2 538 521	1 638 351	2 396 002	2 496 198	1 593 671	2 392 637
Bali	1 982 494	1 631 901	1 883 179	2 019 804	1 625 230	1 908 186	2 004 655	1 636 722	1 930 920
Nusa Tenggara Barat	1 927 643	1 320 942	1 692 031	1 985 042	1 564 155	1 829 422	2 006 668	1 414 494	1 795 693
Nusa Tenggara Timur	2 202 896	1 448 533	1 784 355	2 197 832	1 479 006	1 808 374	2 193 411	1 510 352	1 845 059
Kalimantan Barat	2 054 009	1 614 026	1 831 499	2 166 662	1 754 767	1 954 650	2 187 974	1 778 527	1 978 910
Kalimantan Tengah	2 222 622	1 967 142	2 065 872	2 274 953	1 968 557	2 094 590	2 304 037	1 985 779	2 137 820
Kalimantan Selatan	2 184 921	2 100 019	2 149 149	2 200 492	2 112 316	2 160 629	2 221 909	2 132 007	2 184 686
Kalimantan Timur	3 075 879	2 171 259	2 823 438	3 093 978	2 202 371	2 819 213	3 049 206	2 136 431	2 825 155
Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	2 545 435	2 589 378	2 559 358
Sulawesi Utara	2 249 806	1 772 864	2 077 495	2 271 457	1 936 899	2 150 512	2 284 288	1 993 497	2 179 352
Sulawesi Tengah	2 224 630	1 561 568	1 831 205	2 314 770	1 541 486	1 910 130	2 321 177	1 579 492	1 955 729
Sulawesi Selatan	2 156 733	1 524 952	1 887 418	2 269 105	1 562 297	1 978 161	2 287 734	1 606 162	2 021 331
Sulawesi Tenggara	2 301 083	1 726 920	2 017 945	2 303 727	1 769 268	2 026 599	2 372 376	1 767 376	2 063 540
Gorontalo	1 862 167	1 347 513	1 606 871	1 993 771	1 332 281	1 704 388	1 993 329	1 351 318	1 734 347
Sulawesi Barat	2 032 646	1 581 976	1 749 757	2 090 169	2 046 373	2 062 204	2 103 143	2 025 734	2 054 723
Maluku	2 247 200	1 714 500	2 036 042	2 655 739	1 732 405	2 328 409	2 669 544	1 839 322	2 279 362
Maluku Utara	2 278 030	1 916 359	2 061 758	2 329 754	2 079 512	2 204 898	2 346 757	2 105 506	2 215 427
Papua Barat	2 747 086	2 714 311	2 729 619	2 695 281	2 754 945	2 730 795	2 743 797	2 756 444	2 750 392
Papua	3 033 472	2 510 532	2 847 628	3 335 429	2 750 479	3 149 950	3 337 007	2 762 486	3 114 182
Indonesia	2 083 499	1 451 969	1 885 815	2 141 850	1 514 434	1 952 589	2 153 567	1 528 212	1 981 725

Lampiran 27 Tabulasi Silang Batasan Kegiatan Formal dan Informal Berdasarkan Status Pekerjaan dan Jenis Pekerjaan Utama

Batasan Kegiatan Informal

Status Pekerjaan	Jenis Pekerjaan Utama								Lainnya
	Tenaga Profesional	Tenaga Keperawatan	Rydhut Relawan dan/atau Usaha	Tenaga Relawan	Tenaga Usaha Rata-rata	Tenaga Relasi Rutin	Tenaga Relasi Khusus	Tenaga Relasi Lain	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Batas Sardi	F	F	F	INF	INF	INF	INF	INF	INF
Batas Dharu Buthid K Tapp/Buthid Dhar	F	F	F	F	F	INF	F	F	INF
Batas Dharu Buth Tapp/Buthid Dhar	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Buth/Kayawan/Rigawi	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Relasi Bhasd Rutan	F	F	F	INF	INF	INF	INF	INF	INF
Relasi Bhasd Nupatan	F	F	F	INF	INF	INF	INF	INF	INF
Relasi Kelung/tak Dhar	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF

Keterangan F=Formal INF=Informal

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK

Jl. dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710
Telp : (021) 3841195, 3842508, 3810291-4, Fax : (021) 3857046
Homepage : <http://www.bps.go.id> E-mail : bpsHQ@bps.go.id

ISSN 2088-5679



9 772088 567003